



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**SATKER** BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL  
SUMATERA BARAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Tahun 2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Padang, 08 Januari 2025

Ka. Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat,

**Thabrani ST., MT**  
NIP. 19670811 199803 1 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## 1. Tujuan dan Sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah konsekuensi logis dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang menjadi tugas dan wewenang Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat di tahun 2024 dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

## 2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 103 menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## 3. Isu Strategis

- a. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.
- b. Mendukung pembangunan jalan daerah,
- c. Mendukung penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023.

#### **4. Pencapaian**

Pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024 dengan rincian :

- Jumlah Output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan ditargetkan 6 dokumen. Output ini terealisasi sebesar 100 % terhadap revisinya, dengan progres keuangan sebesar 99,62%
- Jumlah Output Layanan Umum ditargetkan 1 layanan. Output ini terealisasi sebesar 100 % terhadap revisinya, dengan progres keuangan sebesar 98,96%
- Jumlah Layanan Perkantoran terdiri dari beberapa komponen yakni Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Kantor. Untuk Output Layanan Perkantoran ditargetkan 1 layanan. Output ini terealisasi sebesar 100,00 % terhadap revisinya, dengan progress keuangan 99,00%.
- Output Layanan Sarana Internal terdiri dari beberapa komponen yakni Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran. Output ini terealisasi sebesar 100% terhadap revisinya , dengan progres keuangan sebesar 96,98%

#### **5. Permasalahan di Lapangan**

- Adanya kekurangan SDM terutama Tenaga Teknik Sipil sehingga pekerjaan dirangkap oleh petugas yang sama.
- Beberapa proses penarikan/realisasi anggaran harus menunggu revisi DIPA karena adanya pagu minus di detail akun sehingga penginputan pada esakti sedikit terkendala

#### **6. Kinerja Keuangan**

Ditinjau dari aspek keuangan jumlah anggaran Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada awal tahun 2024 ini adalah sebesar Rp. 39.854.465.000,- pada DIPA Revisi Akhir menjadi Rp. 39.601.773.000,-, ini terjadi karena adanya pemotongan belanja pegawai dan selfblocking perjalanan dinas, sedangkan dana yang terserap sampai akhir Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp. 39.201.005.000,- atau dengan progress fisik sebesar 100 % dan progres keuangan sebesar 99,29 %.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	2-1
1.1 Latar Belakang .....	2-1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2-2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	2-4
1.3.1 Struktur Organisasi .....	2-4
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	22
1.4 Sarana dan Prasarana .....	46
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik .....	46
1.4.2 Informasi Teknologi.....	47
1.5 Isu Strategis.....	61
1.5.1 Kondisi Umum Wilayah .....	61
1.5.2 Kondisi Infrastruktur Satker BPJN Sumatera Barat.....	66
1.5.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Satker BPJN Sumatera Barat .....	71
1.5.4 Isu Strategis di Lingkungan Satker BPJN Sumatera Barat .....	71
1.6 Sistematika Laporan .....	72
2 BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	74
2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan .....	74
2.1.1 Visi, Misi,.....	74
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi .....	82
2.1.3 Program dan Kegiatan.....	90
2.2 Perjanjian Kinerja.....	93
2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal.....	93
2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi .....	94

2.2.3	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja .....	95
2.2.4	Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome).....	95
2.2.5	Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Ouput) .....	96
2.3	Metode Pengukuran.....	97
2.3.1	Pengukuran sasaran program .....	97
2.3.2	Pengukuran Sasaran Kegiatan.....	114
2.3.3	Penanggung jawab pengumpulan data .....	114
2.4	Target Kinerja Tahun Ini Menurut Renstra .....	114
2.4.1	Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024 .....	114
2.4.2	Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024 ..	116
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>		<b>117</b>
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas .....	117
3.2	Capaian Kinerja Organisasi .....	124
3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Sasarn Program TA 2024 .....	124
3.2.2	Capaian Rating Kondisi Jalan TA 2024.....	125
3.2.3	Capaian Kemantapan Jalan Nasional TA 2024.....	125
3.2.4	Perbandingan Target (PK revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024 .....	127
3.3	Perbandingan Kinerja Organisasi.....	139
3.3.1	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Outcome Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Terakhir (2020-2024).....	139
3.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Output TA 2020 s/d 2024.....	140
3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2020 s/d 2024 dengan Target Jangka Menengah (Kumulatif 2020-2024).....	141
3.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2024 dengan Satker Sejenis .....	142
3.4	Analisis Realisasi Anggaran .....	143
3.4.1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .....	143
3.4.2	Realisasi Anggaran TA 2024 .....	145
3.4.3	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya .....	146
3.4.4	Isu-isu terkait Program dan Anggaran TA 2024 .....	147
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	148
3.5.1	Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia .....	148
3.5.2	Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran .....	149

3.6	Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	149
3.6.1	Informasi Dalam Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan .....	151
3.6.2	Informasi Dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai .....	153
3.6.3	Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja.....	155
3.6.4	Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja.....	158
3.6.5	Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja .....	160
3.6.6	Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	163
3.6.7	Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi.....	171
3.7	Paket Disresmikan dan Penghargaan .....	173
3.8	Survei Kepuasan Masyarakat SKM Atas Penggunaan Layanan Publik .....	174
3.9	Paket Strategis.....	174
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>175</b>
4.1.	Simpulan Umum .....	175
4.1.1	Faktor Pendukung Keberhasilan .....	175
4.1.2	Faktor Penyebab Kegagalan.....	176
4.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	176
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>178</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	23
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat....	24
Tabel 1. 3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	24
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	25
Tabel 1. 5 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	26
Tabel 1. 6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	26
Tabel 1. 7 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	27
Tabel 1. 8 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	27
Tabel 1. 9 Rekapitulasi Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	28
Tabel 1. 10 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	29
Tabel 1. 11 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	31
Tabel 1. 12 Rekapitulasi PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	33
Tabel 1. 13 Rekapitulasi Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	34
Tabel 1. 14 Rekapitulasi PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	35
Tabel 1. 15 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	36
Tabel 1. 16 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	37

Tabel 1. 17 Rekapitulasi Identifikasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi .....	38
Tabel 1. 18 Rekapitulasi Aset di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat ....	47
Tabel 1. 19 Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat.....	67
Tabel 1. 20 Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat.....	67
Tabel 1. 21 Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat.....	68
Tabel 1. 22 Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat.....	68
Tabel 1. 23 Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat.....	68
Tabel 1. 24 Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat.....	69
Tabel 1. 25 Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat.....	69
Tabel 1. 26 Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat.....	69
Tabel 1. 27 Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat.....	70
Tabel 1. 28 Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat.....	70
Tabel 1. 29 Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat.....	70
Tabel 1. 30 Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat.....	71
Tabel 2. 1 Lima (5) Arahlan Utama Presiden sebagai Strategi Pembangunan Nasional.	76
Tabel 2. 2 Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan 2020-2024 .....	91
Tabel 2. 3 Target Keluaran (Output) Kegiatan 2020-2024 .....	92
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Awal Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024 .....	94
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Revisi Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024.....	94
Tabel 2. 6 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome) .....	96
Tabel 2. 7 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output).....	96
Tabel 2. 8 Skala Penilaian KPI Roughness .....	100
Tabel 2. 9 Skala KPI PCI .....	101
Tabel 2. 10 Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan .....	102
Tabel 2. 11 Skala Penilaian KPI Efektifitas Drainase Permukaan .....	103
Tabel 2. 12 Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Sub Soil.....	103
Tabel 2. 13 Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi.....	104
Tabel 2. 14 Efektivitas Drainase Permukaan .....	104
Tabel 2. 15 Efektivitas Drainase Subsoil .....	105
Tabel 2. 16 Tabel Faktor Pembobot KPI Final.....	105

Tabel 2. 17 Matriks Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar.....	114
Tabel 2. 18 Sandingan Outcome dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024 .....	115
Tabel 2. 19 Sandingan Output dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024 .....	116
Tabel 3. 1 Langkah tindak lanjut atas hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023 .....	118
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Sasaran Program TA 2024 .....	124
Tabel 3. 3 Rincian Rating Kondisi Jalan Nasional .....	125
Tabel 3. 4 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional TA 2024.....	126
Tabel 3. 5 Perbandingan Target (PK revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024 .....	127
Tabel 3. 6 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output CBR 001 .....	128
Tabel 3. 7 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output EBA-962 .....	132
Tabel 3. 8 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output EBA-994 .....	134
Tabel 3. 9 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output EBB-951 .....	136
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja outcome Tahun 2020 - 2024 .....	139
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2024 .....	140
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2024 per output dengan Renstra .....	141
Tabel 3. 13 Sandingan Capaian IKSP Instansi Sejenis.....	142
Tabel 3. 14 Rekapitulasi Revisi DIPA Satker BPJN Sumbar TA. 2024.....	143
Tabel 3. 15 Anggaran Satker BPJN Sumatera Barat Berdasarkan Sumber Pendanaan 2020-2024 .....	144
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	145
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya .	146
Tabel 3. 18 Efisiensi Sumber Daya Manusia .....	148
Tabel 3. 19 Efisiensi Anggaran .....	149
Tabel 3. 20 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan .....	157

Tabel 3. 21 Bukti Dukung Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024 : Progres Rencana Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi AKIP TA. 2023 .....	165
Tabel 3. 22 Bukti Dukung Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Profil Resiko Unit Organisasi BPJN Sumatera Barat.....	173

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	5
Gambar 1. 2 Revisi Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	7
Gambar 1. 3 Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	23
Gambar 1. 4 Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	24
Gambar 1. 5 PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	25
Gambar 1. 6 Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	25
Gambar 1. 7 PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	26
Gambar 1. 8 PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	26
Gambar 1. 9 Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	27
Gambar 1. 10 PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	27
Gambar 1. 11 Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat..	29
Gambar 1. 12 Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat .....	30
Gambar 1. 13 PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	32
Gambar 1. 14 PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	33
Gambar 1. 15 Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	34
Gambar 1. 16 Non PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat ....	35
Gambar 1. 17 Peta PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	36
Gambar 1. 18 Peta Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	37
Gambar 1. 19 Peta Prov. Sumatera Barat.....	61

Gambar 1. 20 Pesona kawasan wisata Lembah Harau Payakumbuh .....	62
Gambar 1. 21 Pesona Keindahan Kelok 9 .....	63
Gambar 1. 22 Pesona Keindahan Pulau Mandeh .....	64
Gambar 1. 23 Kelok 44 , Kab. Agam yang merupakan rute wajib Tour de Singkarak..	65
Gambar 1. 24 Pesona Wisata dan Sejarah Tambang Batu Bara Ombilin , Kota Sawahlunto .....	65
Gambar 1. 25 Kawasan Seribu Rumah Gadang , Kab Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.....	66
Gambar 1. 26 Peta Wilayah Kerja BPJN Sumatera Barat .....	66
Gambar 2. 1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024 .....	87
Gambar 2. 2 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 .....	88
Gambar 2. 3 Penggunaan KPI Jalan .....	100
Gambar 2. 4 Bisnis Proses Analisis Strategi Jaringan Jalan .....	107
Gambar 2. 5 IKP Rating Kondisi Jalan dan Kurva Penurunan Kondisi Aset Jalan ...	108
Gambar 3. 1 Survey FIT Jalan PPK 2.4 Prov. Sumbar.....	128
Gambar 3. 2 Survey Tindak Lanjut Usulan Gubernur Sumatera Barat Terhadap Penyelesaian Jalan Teluk Tapang.....	129
Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Konsultan Pengendalai Mutu Independent (PMI) Konstruksi Jalan Tol Ruas Pekanbaru- Padang Seksi Sicincin -Padang .....	129
Gambar 3. 4 Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Penyelenggaraan Jalan Prov. Sumatera Barat .....	129
Gambar 3. 5 Verifikasi Lanjutan Kegiatan Melalui Instruksi Presiden Tahap 2 TA 2024 .....	130
Gambar 3. 6 Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Penanganan Bencana Alam Yang Terjadi .....	130
Gambar 3. 7 Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Paket-Paket Pekerjaan Preservasi TA. 2024 Di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	130
Gambar 3. 8 Rapat Kerja BPJN Sumatera Barat. Evaluasi Kegiatan T.A. 2024 dan Persiapan Kegiatan T.A. 2025.....	131
Gambar 3. 9 Sharing Session Manajemen Risiko Semester II.....	131

Gambar 3. 10 Rapat Pembahasan Perubahan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Proyek KPBU-AP Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I) .....	131
Gambar 3. 11 Kalibrasi Alat Laboratorium 2024.....	132
Gambar 3. 12 Sertifikasi Asphlat Mixing Plant (AMP) PT. Multion Jagad Perkasa di Jl. Raya Padang - Bukittinggi KM. 54 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat .....	132
Gambar 3. 13 Sosialisasi SMAP di Lingkungan BPJN Sumbar .....	133
Gambar 3. 14 Audit Internal di Lingkungan BPJN Sumatera Barat .....	133
Gambar 3. 15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Satker di Lingkungan Dijen Bina Marga.....	134
Gambar 3. 16 Workshop Peningkatan Kompetensi.....	134
Gambar 3. 17 Penanaman Pohon Di Lingkungan BPJN Sumbar .....	135
Gambar 3. 18 PU Peduli dalam Rangka Harbak PU .....	135
Gambar 3. 19 Upacara Harbak PU .....	135
Gambar 3. 20 Seminar Nasional Hari Jalan .....	136
Gambar 3. 21 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada PPK KPIJ .....	137
Gambar 3. 22 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran PPK KPIJ .	138
Gambar 3. 23 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran PPK KPBU Flyover Sitinjau Laut .....	138
Gambar 3. 24 Pengisian kuesioner Pemanfaatan LAKIN di BPJN Sumatera Barat ...	151
Gambar 3. 25 Data Responden .....	151
Gambar 3. 26 hasil kuesioner Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan.	152
Gambar 3. 27 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Perhatian UtamaPimpinan: Bahan Rapat Pimpinan.....	153
Gambar 3. 28 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai .....	154
Gambar 3. 29 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai: Sasaran Kinerja Pegawai.....	154
Gambar 3. 30 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai: Rapat Kerja BPJN Sumatera Barat. Evaluasi Kegiatan T.A. 2024 dan Persiapan Kegiatan T.A. 2025.....	155

Gambar 3. 31 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja.....	156
Gambar 3. 32 Hasil Kuisisioner Laporan Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja.....	159
Gambar 3. 33 Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024 pada E-SAKIP .....	160
Gambar 3. 34 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja.....	160
Gambar 3. 35 Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja: LHE SAKIP UPT BPJN Sumatera Barat TA 2023 .....	163
Gambar 3. 36 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	164
Gambar 3. 37 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi .....	171
Gambar 3. 38 Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada LAKIN 2024 .....	172

## DAFTAR SINGKATAN

BMN	:	Barang Milik Negara
BPJN	:	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
e-Monitoring	:	Integrated Electronic Monitoring
e-SAKIP	:	e- Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
e-SAKTI	:	Elektronic Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DTPK	:	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
IBENA	:	Informasi Bencana Alam
Invi J	:	Inspeksi Visual Jembatan
IRMS-V3	:	Indonesian Road Management System-Version 3
IKU	:	indikator kinerja utama
IKSS	:	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	:	Indikator Kinerja Program
JAKI	:	Jalan Kita
KI-BIMA	:	Kepatuhan Intern Bina Marga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	:	Kawasan Industri
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KSPN	:	kawasan strategis nasional
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LKIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PK	:	Perjanjian Kinerja
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PKS	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PP	:	Program Prioritas
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PJN	:	Pelaksanaan Jalan Nasional

POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Renstra	:	Rencana Strategis
RKJ	:	Rating Kondisi Jalan
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPM	:	Rupiah Murni
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIPP	:	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
SIKOMPAK	:	Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak
SMD	:	Sistem Masukan Data
SIMAN	:	Sistem Manajemen Aset Negara
SIPBJ	:	Sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa
SIPAKAR	:	Sistem Informasi Padat Karya
SIPASTI	:	Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terinteg rasi
SIPDJD	:	Sistem Informasi Pelaksanaan Jalan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
SITIA	:	Sinergitas Transparasi Integrasi Akuntabel
SKPD-TP	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah – Tugas Pembantuan
SKM	:	Survei Kepuasan Masyarakat
SMKK	:	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SPM	:	Standar pelayanan minimal
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATKER	:	Satuan Kerja
SS	:	Sasaran Strategis
TA	:	Tahun Anggaran
TNDE	:	Tata Naskah Dinas Elektronik
Unker	:	Unit Kerja
Unor	:	Unit Organisasi
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah mulai dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar tentang bentuk pertanggung jawaban, tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menilai ketepatan dalam menysasar target-target kerja yang ditetapkan. Karena itu diperlukan perencanaan kinerja yang matang serta tolak ukur penilaian yang transparan dan profesional guna meningkatkan optimalisasi hasil kinerja yang kemudian dilaporkan dalam LKIP, untuk itu Kementerian PANRB menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang membahas tata cara penulisan laporan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Sebagai pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP, maka Kementerian PANRB menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Pada tanggal 16 April 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a) Penyelenggaraan SAKIP
- b) Rencana strategis
- c) Perjanjian kinerja
- d) Pengukuran kinerja
- e) Pengelolaan data kinerja
- f) Pelaporan kinerja
- g) Reviu dan evaluasi kinerja

Tujuan dibuatnya laporan LKIP ini adalah :

- 1) Peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah,
- 2) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi Pemerintah,
- 3) Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi Pemerintah,

- 4) Meningkatkan kredibilitas instansi Pemerintah di hadapan masyarakat,
- 5) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi Pemerintah,
- 6) Mendorong instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 7) Mendorong terwujudnya instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat wajib menyusun Laporan Kinerja Balai dengan berdasarkan pada kinerja satker pada Tahun Anggaran 2024.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 103 menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 104). Dalam melaksanakan tugas, BPJN Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi (pasal 105) :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
- d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- e. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;

- f. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
- h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
- i. pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- o. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
- r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
- s. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- t. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- u. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- v. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;

- w. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- x. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;
- y. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- z. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.

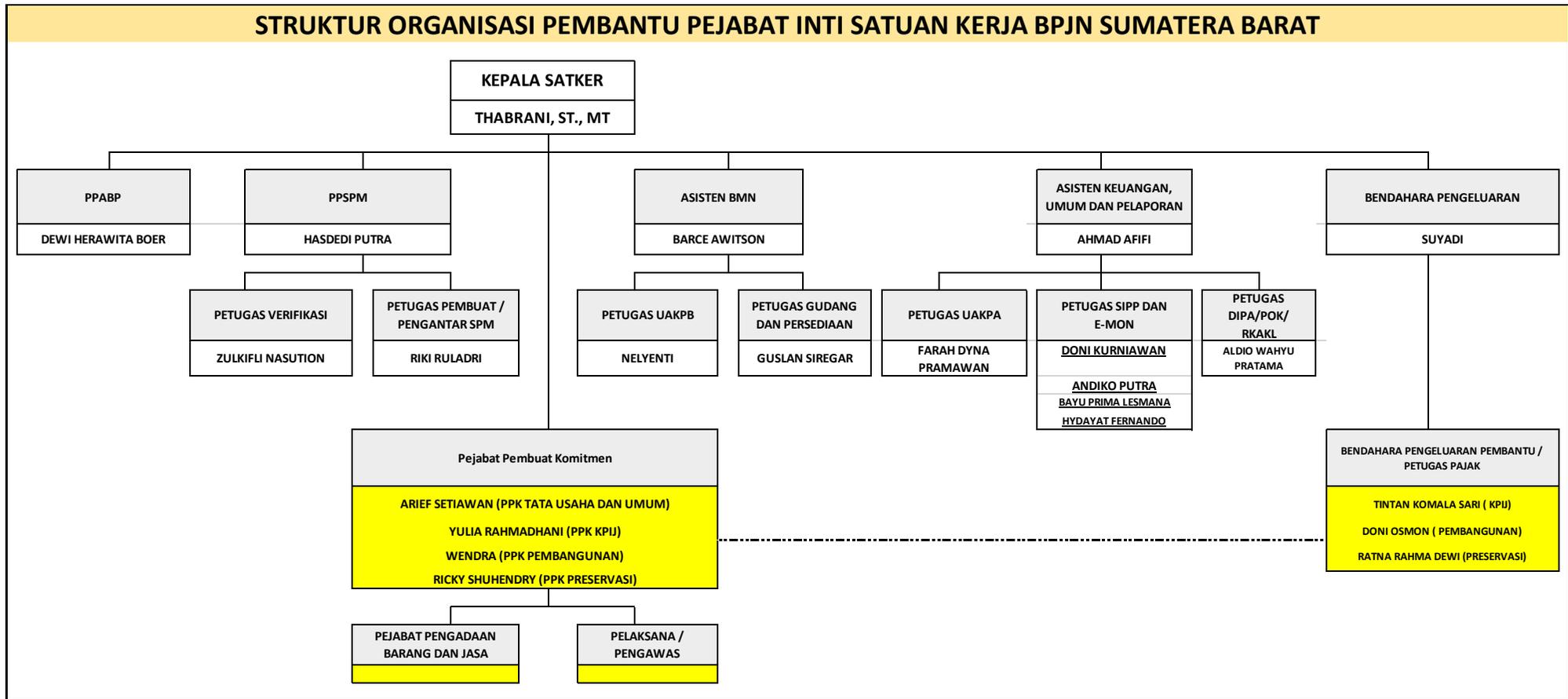
### 1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

#### 1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPJN Sumbar berdasarkan kepada beberapa peraturan , yakni:

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan
3. Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksan Teknis di Kementereian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat No 04/KPTS/Bb3/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Kedudukan Personil di Lingkungan BPJN Sumatera Barat TA 2024, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

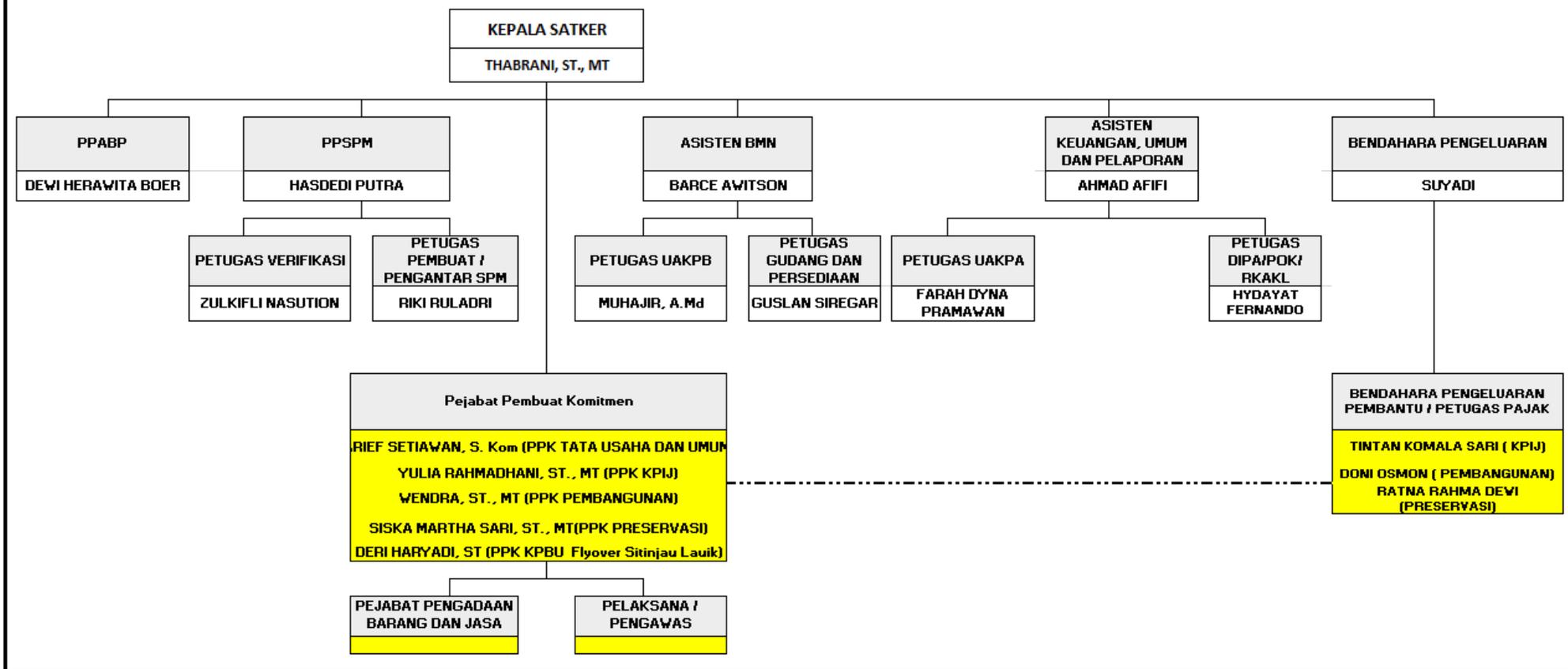
**Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat:**



*Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat*

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 944/KPTS/M/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terjadi pergantian pada PPK Preservasi dan Penambahan PPK Baru yakni PPK KPBU Flyover Sitinjau Laut Pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI PEMBANTU PEJABAT INTI SATUAN KERJA BPJN SUMATERA BARAT



Gambar 1. 2 Revisi Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Susunan organisasi Satuan Kerja terdiri dari:

- 1) Unsur Kepala adalah Kepala Satuan Kerja.
- 2) Unsur Pembantu Kepala Satuan Kerja:
  - a. Para Asisten:
    - i. Asisten BMN
      - Petugas UAKPB
      - Petugas Gudang dan Persediaan
    - ii. Asisten Keuangan, Umum dan Pelaporan
      - Petugas UAKPA
      - Petugas SIPP dan E-Mon
      - Petugas DIPA/POK/RKAKL
  - b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPSPM)
    - i. Petugas Verifikasi
    - ii. Petugas Pembuat/Pengantar SPM
  - c. Bendahara Pengeluaran
    - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu /Petugas Pajak
  - d. PPABP
- 3) Unsur Pelaksana Kepala Satuan Kerja yang terdiri dari para PPK
- 4) Unsur Pembantu PPK:
  - i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
  - ii. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  - iii. Asisten Teknik
  - iv. Asisten Umum
  - v. Petugas Gudang dan Persediaan
  - vi. Pelaksana/Pengawas

Tugas dan tanggung jawab:

### 1) Kepala Satuan Kerja

Tugas:

- 1 Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan;
- 2 Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
- 3 Persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa ;
- 4 Pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- 5 Pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional;
- 6 Pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- 7 Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- 8 Pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- 9 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- 10 Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi;
- 11 Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- 12 Pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
- 13 Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- 14 Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengamanan fungsi serta manfaat jalan nasional dan penetapan leger jalan nasional;
- 15 Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negaraselaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- 16 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait dan komunikasi publik.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang dituangkan dalam DIPA.
- Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN.
- Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut.
- Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.
- Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggungjawab Program.
- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan keanggaran yang berada dalam penguasaannya PA.
- Bertanggung jawab atas kebenaran laporan BMN dan LKB sesuai standar ketentuan akuntansi pemerintah.

2) Asisten Keuangan, Umum dan Pelaporan

Tugas:

- Membantu Kepala Satker dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan Satuan Kerja.

- Melaksanakan kegiatan administrasi umum untuk menunjang pengelolaan kegiatan.
- Menyelenggarakan tata kearsipan terhadap surat-surat masuk dan keluar.
- Melaksanakan administrasi pengadaan dan administrasi penggunaan barang dan jasa untuk kebutuhan barang dan jasa, bahan, peralatan operasional di lingkungan Satuan Kerja.
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan pembinaan personalia di lingkungan Satuan Kerja.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana administrasi umum pada Satuan Kerja sesuai DIPA dan RKAKL.
- Bersama-sama dengan Asisten Pelaksanaan menyelesaikan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Selesai (baik sebagian selesai maupun keseluruhan) berikut seluruh kekayaannya.
- Menyusun dan mengirimkan semua laporan yang berhubungan dengan administrasi umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mempelajari dan mempersiapkan konsep tanggapan LHP dari BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta lembaga-lembaga pemeriksa lainnya serta koordinasi pembuatan laporan keuangan.
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam rangka melaksanakan ketatausahaan pada Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkup koordinasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab pengaduan masyarakat, permohonan informasi publik, dan urusan hukum lainnya.
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam tugas penyampaian laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
- Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan, rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring online.
- Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline.
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan kerja, dalam hal ini pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai perintah Kepala Satuan Kerja.
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam pemeriksaan dan penelitian semua penerimaan/pengeluaran anggaran Satuan Kerja yang membebani APBN.
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam pemeriksaan dan penelitian semua penerimaan terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab:

Asisten Keuangan, Umum, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

### 3) Asisten BMN

Tugas:

- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- Melakukan pencatatan dan menginventarisasikan BMN yang berada dalam penguasaannya.

- Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan.
- Membantu mengamankan, menatausahakan barang persediaan secara manual/terkomputerisasi dan melakukan inventarisasi fisik (stock opname) atas barang persediaan.
- Membantu pengelola SAI dalam hal petugas SIMAK BMN dalam membuat laporan BMN semesteran dan tahunan yang dikelola secara terkomputerisasi.
- Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusunan aset tetap.
- Melakukan pembuatan, penyimpanan dan pemutakhiran leger jalan nasional (termasuk jembatan) yang berada dalam penguasaan KP.B.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja.

Tanggung jawab:

Asisten BMN, Lahan, UPR, dan Utilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

#### 4) Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

Tugas:

- Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja.
- Memeriksa kelengkapan berkas SPP LS/UP, mengisi cek-list kelengkapan berkas SPP LS/UP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
- Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP LS/UP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran dan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank).
  - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).
  - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluarsa).
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan ketentuan:
    - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
    - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM.
    - c) Lembar keempat disampaikan kepada Unit Akuntansi Satu Kerja.
    - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN setempat.
  - Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja NVT selaku Atasan Langsungnya.
  - Membantu Bendahara dalam hal melakukan konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
  - Membantu bendahara dalam hal pemeriksaan rinci jumlah pengajuan SPP-UP, SPP- TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

- Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
- PPSPM bertanggungjawab, kelengkapan, dan keadsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan, dan ketepatan jangka waktu penerbitan serta penyampaian SPP kepada KPPN.

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian maupun perintah pembayaran yang dilakukan atas aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

#### 5) Bendahara Pengeluaran

Tugas:

- Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
- Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta Dokumen- dokumen pendukung Lainnya.
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
- Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.
- Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.
- Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

- Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan kerja untuk Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lainnya yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan belanja lainnya (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.
- Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditujukan apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
- Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada:
  - KPPN setempat
  - BPK RI
  - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebhendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran dan Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
- Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya.
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara.
- Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- Menerima dan menyimpan UP.
- Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP.
- Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK.
- Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara.
- Menatausahakan transaksi UP.
- Menyelenggarakan pembukuan transaksiUP.

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan
- Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

6) Verifikator Data dan Informasi (Petugas Verifikasi UAKPA)

Tugas:

- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E I) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

7) Pengolah BMN (Petugas Verifikasi UAKPB) Tugas:

- Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.

Tanggung jawab:

Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

8) Petugas SIPP dan e-Monitoring Satuan Kerja

Tugas:

- Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
- Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan).
- Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
- Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan).
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

#### 9) Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas:

- Menyusun penyiapan bahan dokumen data dan informasi jalan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan, preservasi dan penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan ;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan ;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian pengadaan barang dan jasa;

- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan perencanaan pengendalian konstruksi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan ;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan Amdal dan lalin ;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM jalan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen laporan akuntabilitas kinerja Balai;
- Menyusun penyiapan bahan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian dan pelaksanaan AHS pekerjaan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen kontrak dan penyesuaian kontrak konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen laik fungsi jalan dan jembatan dan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen penerapan hasil pengembangn teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional;

- Menyusun penyiapan bahan dokumen penerapan SMMK3L pelaksanaan pekerjaan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pengujian peralatan dan bahan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen penerapan rencana mutu pekerjaan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan udit internal SMMK3L pelaksanaan pekerjaan.
- Menyusun penyiapan bahan dokumen rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian dan pelaksanaan AHS pekerjaan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengendalian dan pelaksanaan kontrak dan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen rencana mutu pekerjaan;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- Menyusun penyiapan bahan dokumen pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi AMP.

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya.
- Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi, apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud.

#### 10) Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tugas:

- Membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayar uang terkait dengan jenis kegiatan yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pengeluaran.

Tanggung jawab:

Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

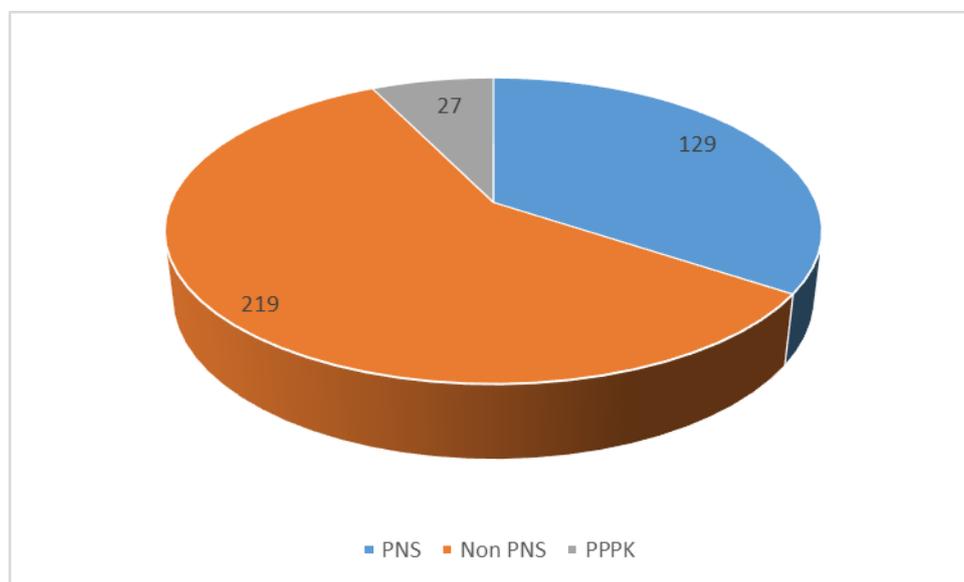
### 1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

#### *1.3.2.1 Komposisi SDM Di Lingkungan BPJN Sumatera Barat*

Sumber daya manusia yang mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat didukung oleh Pegawai Pusat maupun Honorer dengan total keseluruhan 379 orang dengan jumlah PNS sebanyak 129 orang, pegawai honorer sebanyak 219 orang dan Pegawai PPPK sebanyak 27 orang. Semua pegawai tersebar 5 (lima) satker di Provinsi Sumatera Barat yaitu Satker BPJN Sumatera Barat, Satker P2JN Sumbar, Satker PJN Wil. I Sumbar, dan Satker PJN Wil. II Sumbar, Semua pegawai dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

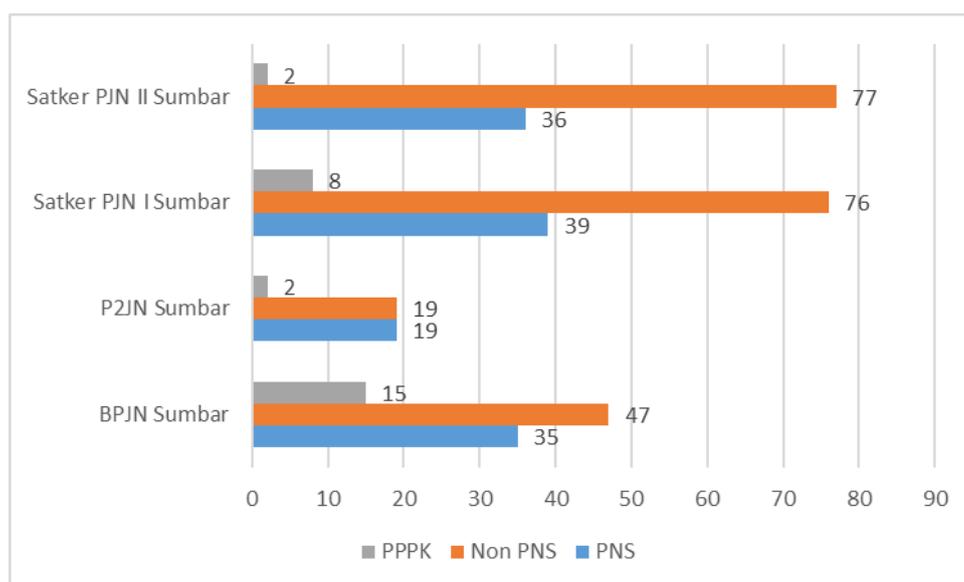
No	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH			Total
		PNS	Non PNS	PPPK	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	1
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	1	0	0	1
2,1	KEPEGAWAIAN	2	6	1	9
2,2	UMUM DAN KEUANGAN	2	15	1	18
2,3	PENGLOLAAN BMN	2	3	0	5
3	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	6	5	5	16
4	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8	11	4	23
5	SEKSI PRESERVASI	13	7	4	24
6	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	10	14	2	26
6,1	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	4	3	0	7
6,2	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	5	2	0	7
10	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	9	15	0	24
11	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	5	13	0	18
12	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	5	13	0	18
13	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	5	8	2	15
14	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	4	13	3	20
15	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	5	7	2	14
16	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	6	7	1	14
20	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	9	20	0	29
21	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	6	12	1	19
22	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	5	14	1	20
23	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	4	11	0	15
24	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	5	11	0	16
25	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	7	9	0	16
<b>Total</b>		<b>129</b>	<b>219</b>	<b>27</b>	<b>375</b>



Gambar 1. 3 Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

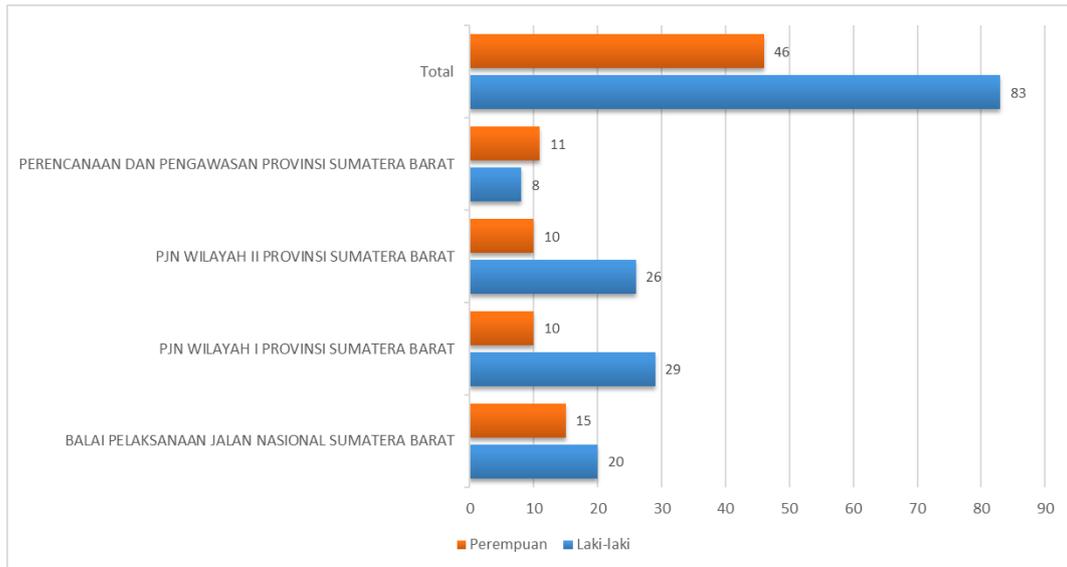
No	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH		
		PNS	Non PNS	PPPK
1	BPJN Sumbar	35	47	15
2	P2JN Sumbar	19	19	2
3	Satker PJJN I Sumbar	39	76	8
4	Satker PJJN II Sumbar	36	77	2
	<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>219</b>	<b>27</b>



Gambar 1. 4 Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

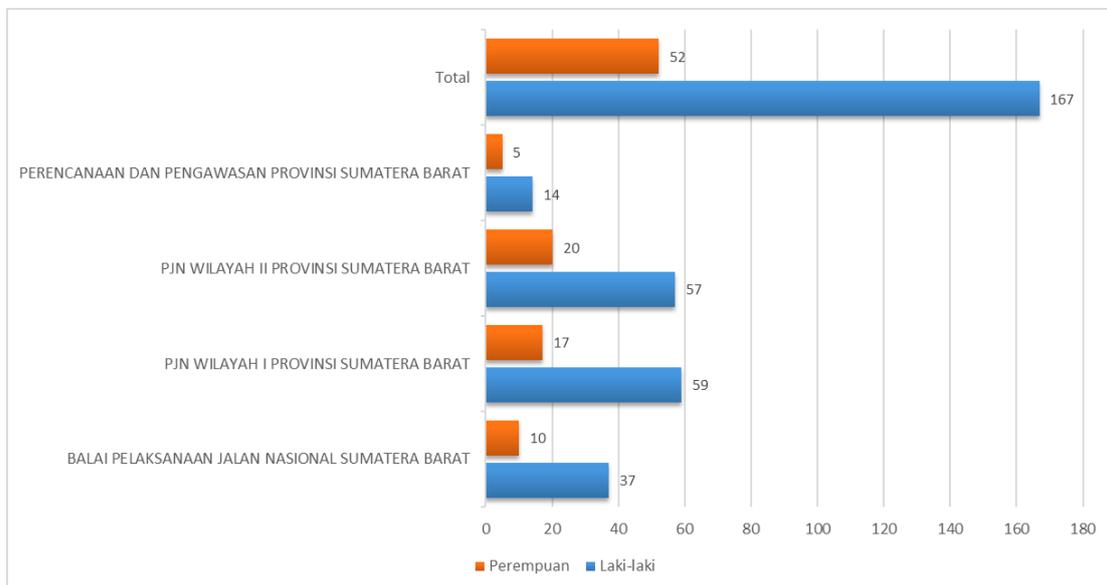
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	20	15	35	
2	PJJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	29	10	39	
3	PJJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	26	10	36	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8	11	19	
	<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>129</b>	



Gambar 1. 5 PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

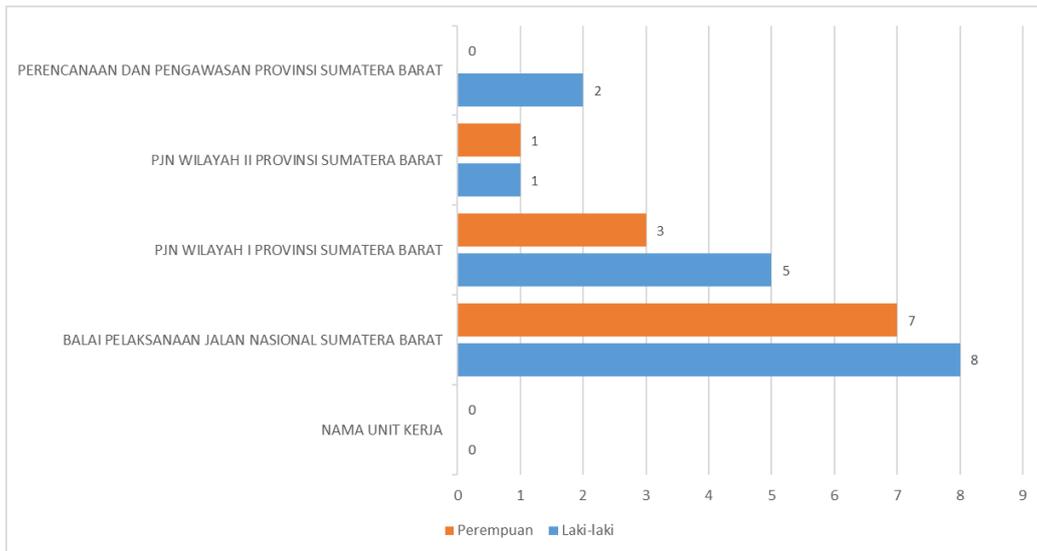
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	37	10	47	
2	PJJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	59	17	76	
3	PJJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	57	20	77	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14	5	19	
	<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>52</b>	<b>219</b>	



Gambar 1. 6 Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 5 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

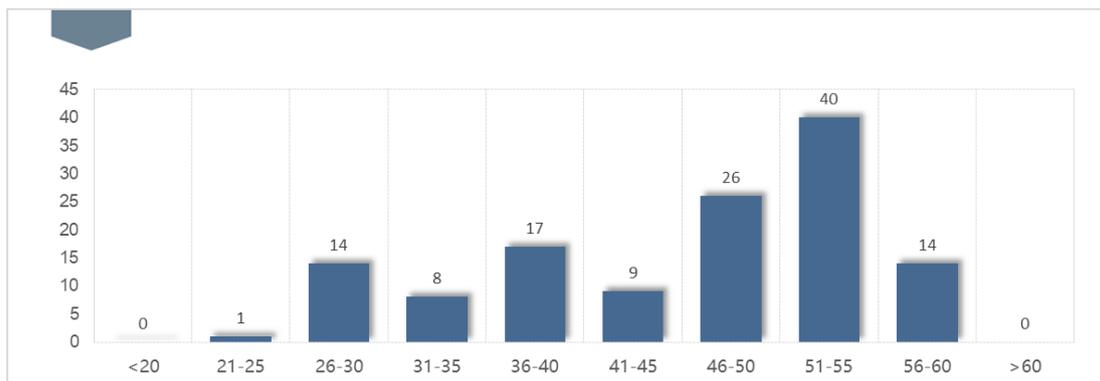
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	8	7	15	
2	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	5	3	8	
3	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	2	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	0	2	
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	



Gambar 1. 7 PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

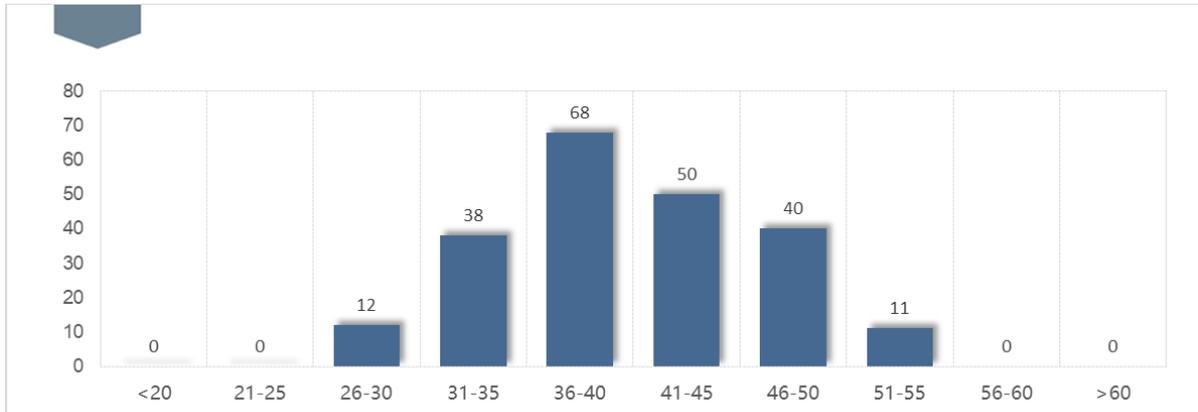
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	1	14	8	17	9	26	40	14	0	129



Gambar 1. 8 PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

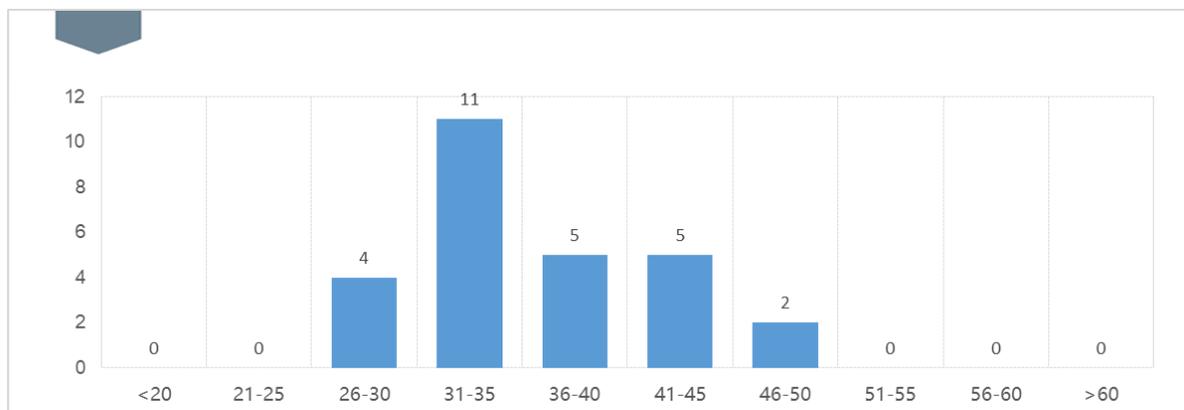
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	0	12	38	68	50	40	11	0	0	219



Gambar 1. 9 Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 8 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

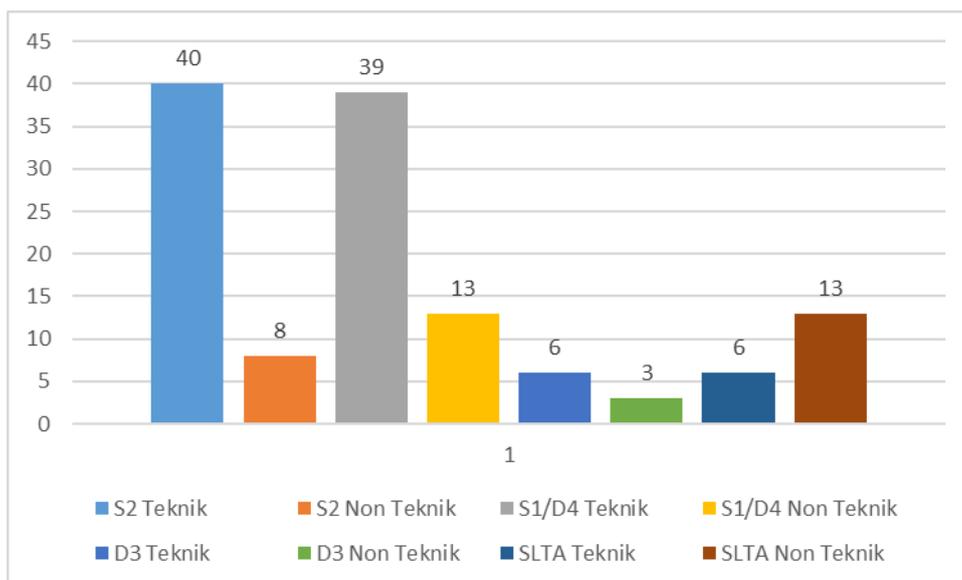
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	0	4	11	5	5	2	0	0	0	27



Gambar 1. 10 PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 9 Rekapitulasi Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

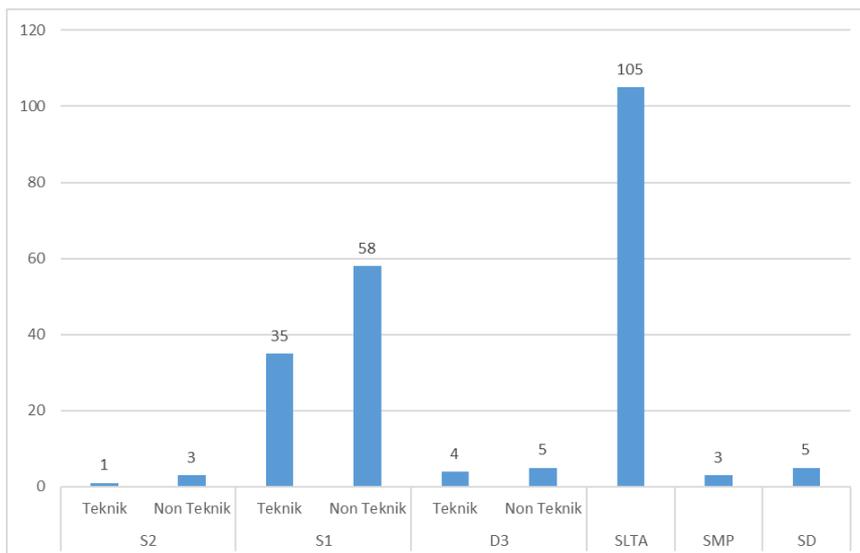
NO	UNIT ORGANISASI	S2		S1/D4		D3		JUMLAH		SLTA		TOTAL
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3	KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
4	UMUM DAN KEUANGAN	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	
5	PENGLOLAAN BMN	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	5	0	0	0	1	0	6	0	0	0	
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	0	6	0	0	0	7	0	0	1	
12	SEKSI PRESERVASI	6	0	3	2	0	0	9	2	0	2	
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	5	1	1	1	7	3	0	0	
16	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	1	1	0	0	0	3	1	0	0	
17	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	0	2	1	0	0	3	1	0	1	
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	4	1	1	1	1	0	6	2	0	1	
19	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	2	0	1	0	0	0	3	0	1	1	
20	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	3	1	0	0	3	1	1	0	
21	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	2	0	1	0	0	0	3	0	0	2	
22	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	3	1	0	0	3	1	0	0	
23	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	1	0	2	0	0	0	3	0	1	1	
24	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	2	1	2	0	1	0	5	1	0	0	
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	3	1	3	1	1	0	7	2	0	0	
26	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	2	0	0	0	0	1	2	1	2	0	
27	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	1	0	1	1	1	1	3	2	0	0	
28	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	
29	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	2	1	0	0	0	0	2	1	0	2	
30	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	1	0	4	0	0	0	5	0	1	1	
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>129</b>



Gambar 1. 11 Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 10 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

NO	UNIT ORGANISASI	DE KEATAS								SLTA	SMP	SD	TOTAL
		S2		S1		D3		JUMLAH					
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik				
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPEGAWAIAN	0	0	0	2	0	2	0	4	2	0	0	6
4	UMUM DAN KEUANGAN	0	1	0	3	0	0	0	4	8	0	3	15
5	PENGLOLAAN BMN	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	3
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	5
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	0	2	4	0	0	3	4	4	0	0	11
12	SEKSI PRESERVASI	0	0	0	1	1	1	1	2	4	0	0	7
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	1	4	0	1	1	5	8	0	0	14
16	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3
17	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	3	8	0	0	3	9	2	1	0	15
19	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	2	0	0	2	2	9	0	0	13
20	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	3	3	0	0	3	3	7	0	0	13
21	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	2	0	0	0	2	6	0	0	8
22	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	4	0	0	1	4	8	0	0	13
23	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	2	0	0	2	2	3	0	0	7
24	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	0	1	1	5	0	0	7
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	2	5	1	0	3	6	10	0	1	20
26	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	3	0	0	4	3	3	2	0	12
27	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	3	0	0	4	3	7	0	0	14
28	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	5	0	0	2	5	4	0	0	11
29	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	3	0	1	1	4	6	0	0	11
30	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	0	1	0	5	0	4	0	0	9
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>219</b>



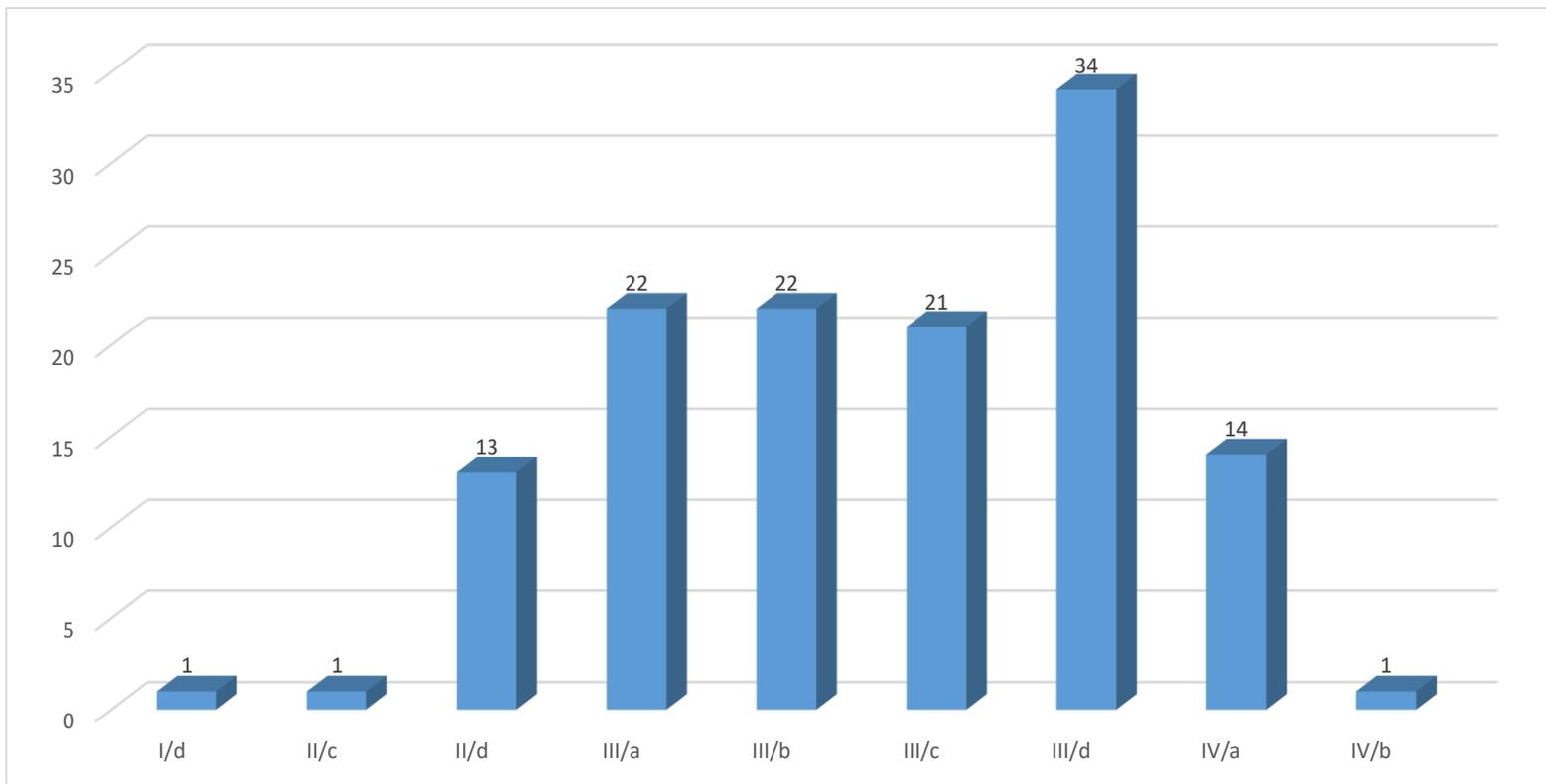
Gambar 1. 12 Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 11 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

UNIT KERJA	GOLONGAN								
	I/d	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
<b>BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>KEPEGAWAIAN</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>PENGLOLAAN BMN</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN</b>	0	0	1	0	1	1	2	1	0
<b>SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	0	0	0	2	2	0	4	0	0
<b>SEKSI PRESERVASI</b>	0	0	1	3	0	2	5	2	0
<b>PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	0	4	2	3	1	0
<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0	1	0	0	2	1	0
<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0	2	2	1	0	0	0
<b>PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	2	0	2	3	2	0
<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	0	2	1	0	0
<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	1	2	0	0	0
<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	2	0	0	1	0
<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	0	1	1	2	0	0
<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	2	0	1	1	0	0
<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	2	0	1	1	1	0
<b>PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	1	3	2	2	1	0
<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	2	0	1	1	0	1	0
<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	2	0	2	0	1	0	0
<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	1	0	0	3	0	0
<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	1	1	0	0	1	1	1	0
<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	3	2	0	2	0	0
<b>TOTAL</b>	1	1	13	22	22	21	34	14	1

TOTAL

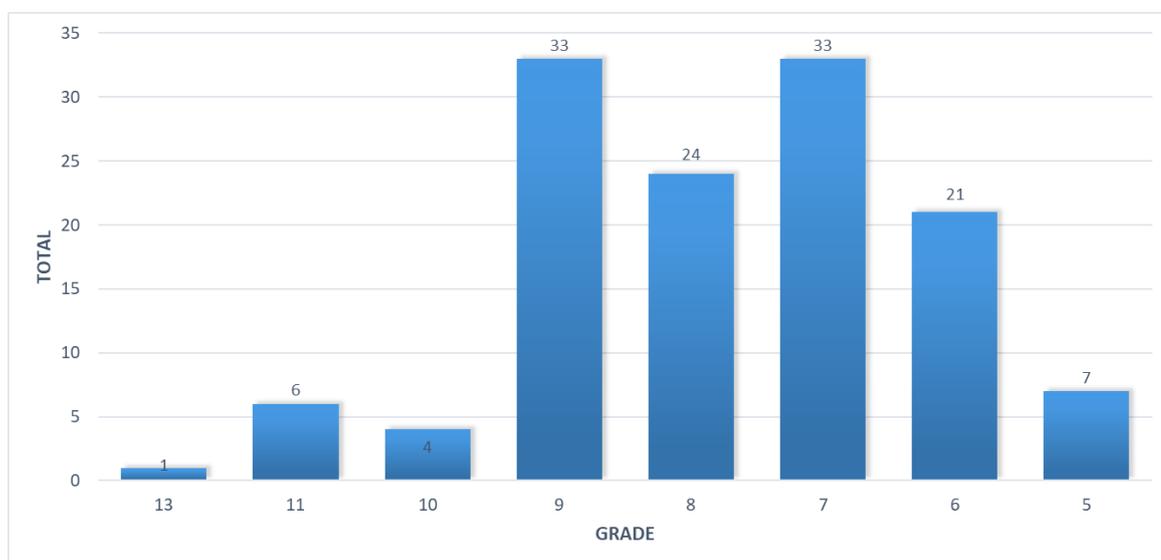
129



Gambar 1. 13 PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1. 12 Rekapitulasi PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

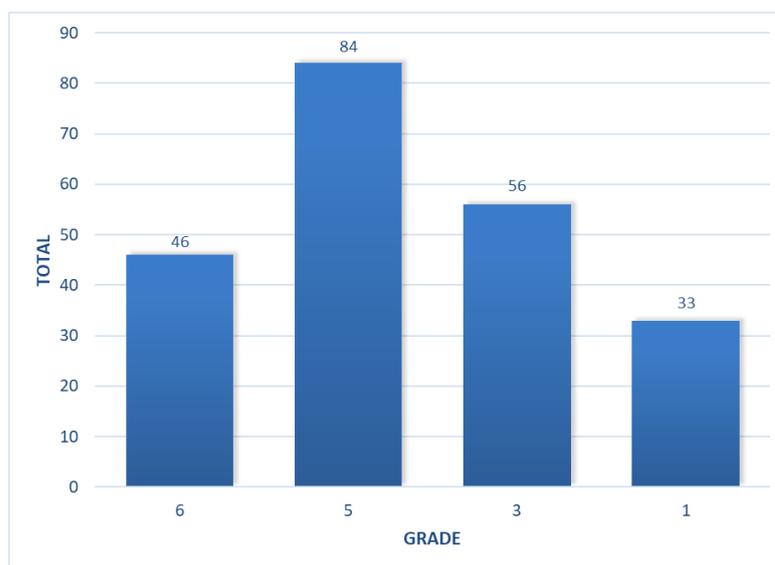
UNIT KERJA	GRADE								TOTAL	
	13	11	10	9	8	7	6	5		
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL
SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
UMUM DAN KEUANGAN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
PENGLOLAAN BMN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	0	1	2	1	1	1	0	0	
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	1	2	3	1	1	0	0	
SEKSI PRESERVASI	0	0	0	6	2	2	1	2	0	
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	0	3	2	2	2	0	0	
PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	0	0	1	1	1	0	0	
PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	1	2	1	1	0	0	
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	2	0	3	0	4	0	0	0	
PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	3	0	0	1	1	0	
PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	0	0	1	2	1	0	0	
PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	2	0	0	
PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	3	1	0	0	
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	3	4	2	0	0	0	
PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	2	2	1	0	
PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	2	1	0	0	
PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	2	1	0	0	
PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	1	2	1	0	
PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	2	3	1	1	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	



Gambar 1. 14 PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 13 Rekapitulasi Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

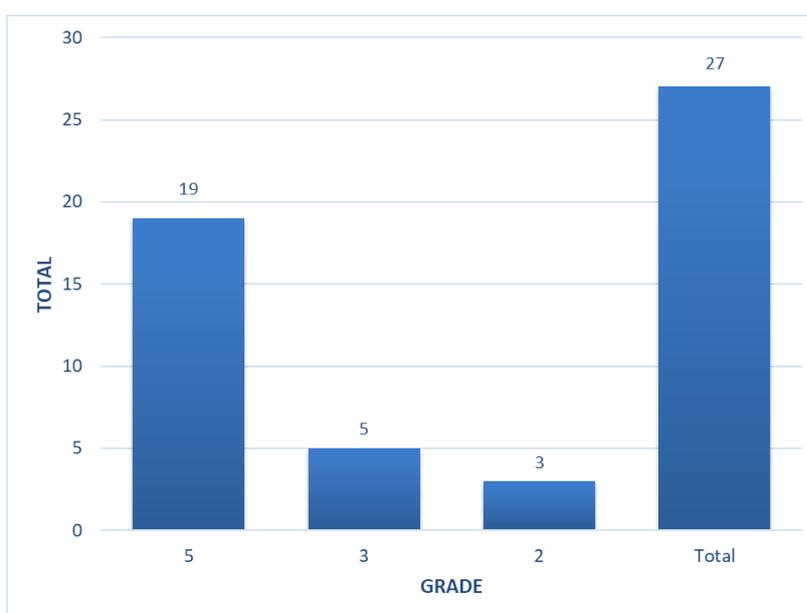
UNIT KERJA	GRADE				TOTAL	
	6	5	3	1		
<b>BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	0	TOTAL	
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	0	0	0	0		
KEPEGAWAIAN	4	1	1	0		
UMUM DAN KEUANGAN	3	1	8	3		
PENGLOLAAN BMN	2	0	1	0		
<b>SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN</b>	1	1	1	2		
<b>SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	4	1	3	3		
<b>SEKSI PRESERVASI</b>	1	2	1	3		
<b>PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	2	5	6	1		
PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	1	0		
PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	1	0		
<b>PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	10	2	2	1		
PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	2	8	2	1		
PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	1	8	3	1		
PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	2	6	0	0		
PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	1	9	3	0		
PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	4	2	1		
PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	2	3	1	1		
<b>PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	2	8	4	6		
PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	1	8	2	1		
PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	3	5	5	1		
PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	3	4	4	0		
PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	2	2	7		
PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	1	4	3	1		
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>84</b>	<b>56</b>	<b>33</b>		<b>219</b>



Gambar 1. 15 Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 14 Rekapitulasi PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

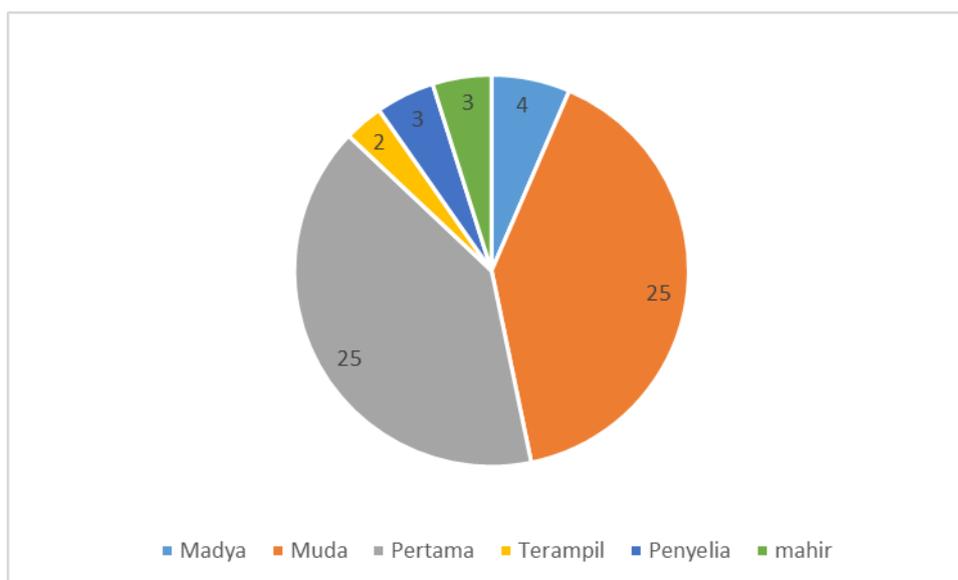
UNIT KERJA	KELAS JABATAN				
	8	6	5		
<b>BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT</b>	0	0	0	<b>TOTAL</b>	
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	0	0	0		
<i>KEPEGAWAIAN</i>	1	0	0		
<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	0	1	0		
<i>PENGLOLAAN BMN</i>	0	0	0		
<b>SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN</b>	3	2	0		
<b>SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	4	0	0		
<b>SEKSI PRESERVASI</b>	4	0	0		
<b>PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	2	0	0		
<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0		
<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0		
<b>PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	0	0	0		
<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	1		
<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	1	1		
<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	0		
<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	1	0		
<b>PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	0	0	0		
<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1		
<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	0		
<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	19	5	3		<b>27</b>



Gambar 1. 16 Non PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 15 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

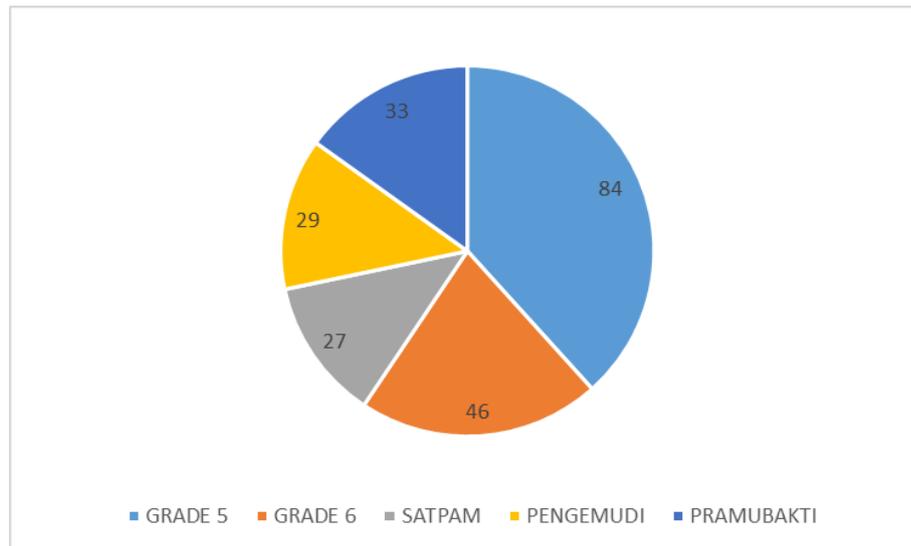
NO	UNIT ORGANISASI	JAFUNG						TOTAL JAFUNG
		Madya	Muda	Pertama	Terampil	Penyelia	mahir	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPEGAWAIAN	1	0	0	0	0	0	1
4	UMUM DAN KEUANGAN	0	1	0	0	0	0	1
5	PENGLOLAAN BMN	0	0	0	0	0	0	0
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	2	1	1	0	0	4
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	2	3	0	0	0	5
12	SEKSI PRESERVASI	0	5	2	0	0	0	7
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	3	0	1	0	6
16	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	1	0	0	0	2
17	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	2	0	0	0	3
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	1	2	0	0	1	0	4
19	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	3	0	0	0	0	3
20	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	1	0	0	0	2
21	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	1	0	1	0	0	0	2
22	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
23	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
24	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	1	0	0	1	3
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	2	3	0	1	2	8
26	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	0	0	0	0
27	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	1	0	0	2
28	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
29	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	0	0	0	0	1
30	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	2	3	0	0	0	5
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>62</b>



Gambar 1. 17 Peta PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1. 16 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

PETA NON PNS DI BPJN SUMATERA BARAT							
SATKER	SUBTANTIF		SATPAM	PENGEMUDI	PRAMUBAKTI	TOTAL	
	GRADE 5	GRADE 6					
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	6	15	8	7	11		
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	40	18	6	7	5		
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	31	10	9	11	16		
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	7	3	4	4	1		
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>33</b>		<b>219</b>



Gambar 1. 18 Peta Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

### 1.3.2.2 Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan BPJN Sumatera

Penilaian Kompetensi merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengukur kesenjangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN dengan Kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan sesuai standar Kompetensi jabatan. Pelaksanaan penilaian Kompetensi dilakukan untuk memposisikan sumber daya manusia sebagai modal strategis bagi pengembangan organisasi dalam membangun kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kompetensi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural

Tabel 1. 17 Rekapitulasi Identifikasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
1	PEJABAT STRUKTURAL	THABRANI, ST., MT				
		ARIEF SETIAWAN, S.Kom		√		
		YULIA RAHMADANI, ST., MT			√	Diklat PKP, webinar
		WENDRA, ST., MT			√	Diklat PKP, webinar
		SISKA MARTHA SARI, S.T., M.T				
		Ir. RICKY SHUHENDRY, M.Si	√			
		RITA HASNAH, S.Sos., MM			√	
		INDAH PUTRI CAHYANI, ST			√	
		HASDEDI PUTRA, SE			√	
		NURUL SAFIRA DESMAN, A.Md		√		
		RANDI SADE PRIHATNO,S.KOM			√	
		TINTAN KOMALA SARI, ST., MT			√	Diklat,webinar
		AHMAD AFIFI, ST., MT			√	
		ALDIO WAHYU PRATAMA, ST				
		RAFIKA ALMIRA SAMANTHA AG, ST., M.T			√	
		ARIEF RACHMAN, A.Md			√	
		MUSTAFA KAMAL, ST			√	
		RIAN KAMAL JAYA, ST			√	

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		ENDA LATORSIA BR PINEM, ST., MT	√			Webinar
		YUDHI ANTARIKSA, ST			√	Pelatihan Pemeriksaan AMP
		ARDI ARDILA. A, ST				
		SYUKRI MAI PUTRA, ST			√	- Pengawasan Pekerjaan Konstruksi - Perencanaan Geometrik Jalan
		MIRA ZULENI, ST				
		FARID HARTA, ST				
		DEWI HERAWITA BOER, ST., MT				
		FADILLA MAHZURA, ST., MT			√	Diklat,webinar
		HUSNA FAUZIA , ST., MT		√		Diklat, webinar
		IMELIA YUNITA, ST	√			Webinar
		HAMDANI, ST., MT				
		YOSSI RIZA HIDAYATI, ST			√	- Pemeriksaan Jembatan - Pengadaan Barang dan Jasa
		RIDHO DICOSTA, ST			√	Preservasi Jalan
		SHINDY MEUTHIA, ST			√	
		ARRY SHALLAMON, S.KOM			√	Diklat
		GATRA PURWATMAJA SETYADI, ST			√	
		INGRID HARYANA B, ST			√	
		REFNI R, A.Md				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		TRI INDAH SARI, ST	√			Webinar
		RIDO, ST				
		RAMANDA SYAFITRI, ST			√	Diklat Jafung
		ANNE DEWITA, SE., MM				
		YUDHA PRAWIRA, ST				
		ROLES SINSA PUTRA, ST				
		RONI MARTADINATA, SH				
		YASRUL RAHIM, ST., MT				
		FIRDAUS, ST			√	Diklat dan Webinar
		DEVITHRI HIDAYATI, ST., M.Si				
		SYAHRURAMADHAN PUTRA S, ST				
		RAMA SENJAKA, SE			√	Diklat
		RIKA YULIA CANDRA, A.md			√	Diklat
		YESSI SEPTIANI WARYU, ST			√	Diklat
		ADITIA WARMAN, A.Md.T				
		TEN MAILISA, ST				
		MARA SATU, ST., MT				
		SEPRIADI, AMd.T				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		HARRY MALZ HARPENDI, ST			√	- Pelatihan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan - Pelatihan Pemeriksaan Jembatan - Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1
		YUFRIZAL, ST				
		ZULKARNAINI, S. ST				
		EFRIZON, ST., MT				
		VIVI EDRIANI, S.SI			√	Diklat
		AFRINALDI			√	Diklat
		SEPTI ANITA, ST				
		WIDA PURINDIVA SETIADI, ST				
		GAMMA HADDYOGA DARWIN, ST			√	Diklat
		WALJUPRIANTO			√	Diklat
		ANDIKO PUTRA, ST			√	Diklat
		HERIMANSYAH, ST		√		Diklat dan Webinar
		DAYU AUDIA FIJRI, ST			√	Diklat
		ALVAN QADAR, ST	√			Diklat
		NOFRIALDI, ST		√		

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		AMELIA MELDI R, A.Md			√	- Pelatihan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
		ESTHIA RATIFOLIA ASRI, SE., M.Si		√		
		HASNAH, S.Sos		√		
		RAMZIL HUDA, A.Md		√		
		VIRGY NOEGRAHA AZHARY, ST		√		
		CICI LESTARI, ST., MT		√		
		PUTRI MERIYEN BUDI, ST			√	Diklat
		AA SELFIA, ST			√	Diklat dan Webinar
		LASTARI			√	Diklat
		ANANG ADI PUJA, A.Md	√			
		INDRA, ST	√			
		SYAFRIZAL, ST				
		KURNIA PUTRI, ST			√	Diklat dan Webinar
		AGA RICKY SYARIEF, SE			√	
		DELVIANTA, ST		√		
		ALWINDRI NURZAF, ST		√		
		MUHAMMAD FAZLI YUSER, S.KOM			√	
3	KASATKER	RENI MARLISA, ST., M.Si				
		MASUDI, ST., M.T.				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		ANDI MULYA RUSLI, ST; MT		√		
4	PPK	GUSMAN, ST				
		ROMI PASLA, ST., MT				
		DERI HARYADI, ST	√			
		M. NASIR NURDIN, ST., M.Si				
		RIO ANDIKA, ST			√	
		NOOR ARIAS SYAMSU, ST; M.Si				
		YAN PURWANDI, ST				
		EFRIWANDI, ST., MT			√	Diklat dan Webinar
		YAMESRI, ST., MENG.SC				
		NAFDI, ST., MT	√			
		ROLLI EKianto, SE., ST., MT				
		NOVA HERIANTO, ST., MT				
		GUSTAF FITRIYADI, ST., MT				
		RAI FRAJA NOFVANDRO, ST.,M.Si		√		
5	PELAKSANA	<b>PNS</b>				
		SUYADI, SE., M.Si		√		
		JOKO MULYADI	√			
		BARCE AWITSON, SE	√			
		SYAFRIAL, ST., MT			√	
		DONNY OSMON, S.AP		√		

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		HANAFLI, ST				
		RATNA RAHMA DEWI, S.Kom		√		
		BOFFI ASRIL, S.ST., MT	√			
		ZULWANDI			√	
		RAMLI	√			
		WIDYA SARI, S.Sos., MM				
		FEBY SANDRA, ST., MT				
		ROSNIATI RUSLI, A.Md				
		YENNY LIZA, S.Kom				
		ANNISA RIZQILANA, ST				TB
		ERI SANTOSO				
		DIASTI GUSTINA, SE				
		YESSI GUSMAN, S.Sos., MM				
		DEFRINALDI	√			
		YASSER, ST., MT				
		YUTTIVINAINI INSYAVTHIA, ST				
		MAWARDI, A.Md				
		MITRA RUSTIKA				
		DARMAWAN				
		ALARIANTI , S.Sos				
		ELMADI, ST				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		AFRIEDI			√	
		MASRUL, ST				
		SURITO, A.Md				
		DERMAWAN				
		FERNANDA, S.Sos				
		RICHARD JOEL PARMONANGAN, ST				
		NURHANI HANUM			√	Diklat
		ADRIZAL		√		Diklat
		ROMI SYHRUDDIN, ST., MT		√		
		YENNI SUSIYANTI, S.Sos, M.Pd., MM			√	Diklat
		IMANUDDIN, A.Md			√	Diklat Brevet
		WHERI KURNIAWAN, ST., MT			√	Diklat
		NURMAN				
		YOVI DEFITA DEWI, A.Md				Diklat
		YUSRI DASMEDRA				
		ASRION				
		FERAWATI, S.Sos		√		
		ERIDERITA, A.Md	√			
		RIKI FITRIADI, S.IP, ST	√			
		ALGIFFAR ANTOS, ST., MT				
		KASMABOTI, SE				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		SUBRIMEN, ST., MT				
		YUSRIAL, ST, MT				
		ELLYA GUSWANITA, S.Kom., MM		√		
		AFRIZAL	√			
		AGUSMAN	√			
		NOFA FITRIANI		√		
		ADRIZAL		√		

## 1.4 Sarana dan Prasarana

### 1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat memiliki banyak asset yang dikelola oleh masing–masing satker dengan menggunakan aplikasi **SIMAN (Sistem Manajemen Aset Negara)** dan melakukan proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN tiap Semester. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah

ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku. BPJN Sumatera Barat memiliki berbagai asset berupa :

*Tabel 1. 18 Rekapitulasi Aset di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat*

No.	Uraian Akun	Nilai (Rp)
1	Tanah	10.408.242.563.718
2	Gedung dan Bangunan	33.327.524.700
3	Jalan dan Jembatan	14.804.712.546.946
4	Peralatan dan Mesin	144.245.684.917
5	Aset Tetap dalam Renovasi	799.777.689.212
6	Aset Tetap Lainnya	5.664.485.500
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	665.511.211.413
8	Aset Kemitraan Berupa Tanah Jalan Tol	-
9	Aset Tak berwujud	23.130.532.022
10	Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	540.066.060.495
11	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan Kemasyarakatan	438.488.958.422
12	Persediaan lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	303.905.716.310
11	Aset Lancar Berupa Persediaan	23.814.873.617
<b>TOTAL</b>		<b>28.190.887.847.272</b>

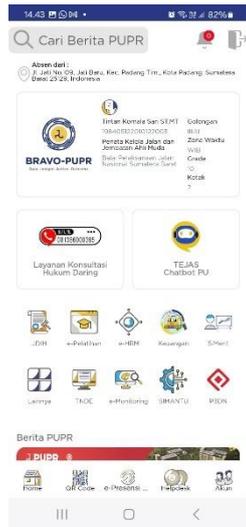
Aset berupa peralatan dan mesin termasuk kendaraan operasional dan peralatan konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang dikuasai BPJN Sumatera Barat relatif kecil jika dibandingkan dengan aset jalan/jembatan yang ada.

#### 1.4.2 Informasi Teknologi

Untuk menunjang kinerja di lingkungan UPT BPJN Sumatera Barat , BPJN Sumatera menggunakan berbagai sistem/teknologi informasi sebagai berikut :

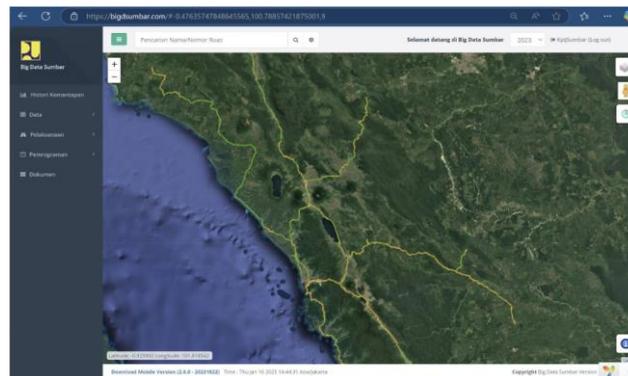
##### 1. Bravo

Sistem yang saling terintegrasi bertujuan memberikan data, informasi dan solusi bagi pegawai di lingkungan PUPR. Aplikasi ini memiliki beberapa layanan seperti Presensi, Kepegawaian, Koperasi, Poliklinik, dan Layanan lainnya



## 2. Big Data Sumbar

Web bigdsambar merupakan suatu web yang dapat mempermudah pengguna dalam melihat peta dan data informasi keseluruhan jalan nasional Sumatera Barat termasuk jembatan, lereng, dokumen, gambar, dan lain-lain



## 3. e- Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(e-SAKIP)

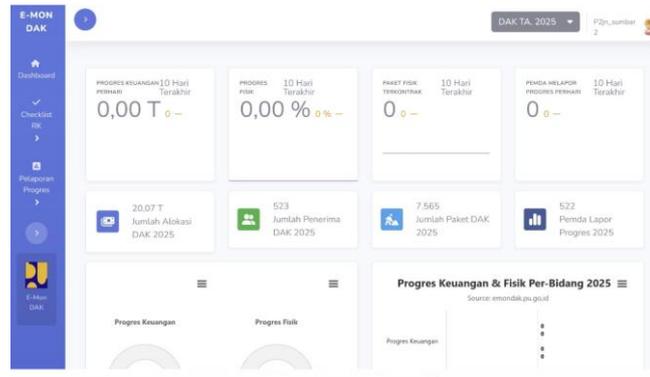
e-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya.

NO.	KODE SATKER	NAMA ES 1 - UPT / SATKER	DITATA MENJARA			TANGGAL BARR	PLUJUD
			HELOKAS	REKOR LAPORAN	DOK T EB		
<b>ES 1/1</b>							
1	0401000	DIREKTORAT JENDERAL BINA RAJAGA	✓			28 Februari 2024 15:46:21	
2	0407000	DIREKTORAT SARAN PRASARANA JALAN-TOL	✓			29 Februari 2024 15:04:04	
3	0403000	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELANGGARAWA JALAN DAN JEMBRAN	✓			19 Maret 2024 19:22:58	
4	0403000	DIREKTORAT PERANGKAPAN JALAN	✓			13 Maret 2024 09:33:22	
5	0403000	DIREKTORAT PERANGKAPAN JEMBRAN	✓			31 Mei 2024 19:03:28	
6	0404000	DIREKTORAT PERSEKUTUAN JALAN DAN JEMBRAN WILAYAH I	✓			29 Februari 2024 14:08:03	
7	0408000	DIREKTORAT PERSEKUTUAN JALAN DAN JEMBRAN WILAYAH II	✓			29 Februari 2024 17:41:12	
8	0404000	DIREKTORAT JALAN BINA WANGUNAN	✓			28 Mei 2024 13:46:20	
9	0404000	DIREKTORAT BINA TOL DAN JEMBRAN	✓			01 Maret 2024 11:46:25	
10	0410000	DIREKTORAT KECENDERUNGAN	✓			29 Februari 2024 09:30:11	
<b>ES 1/2</b>							
11	0404701	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	✓			22 April 2024 13:44:58	
12	0404204	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BAW	✓			28 Mei 2024 10:00:20	
13	0404203	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN BAW	✓			22 Oktober 2024 11:16:42	

4. Elektronik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (e-SAKTI)  
Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran

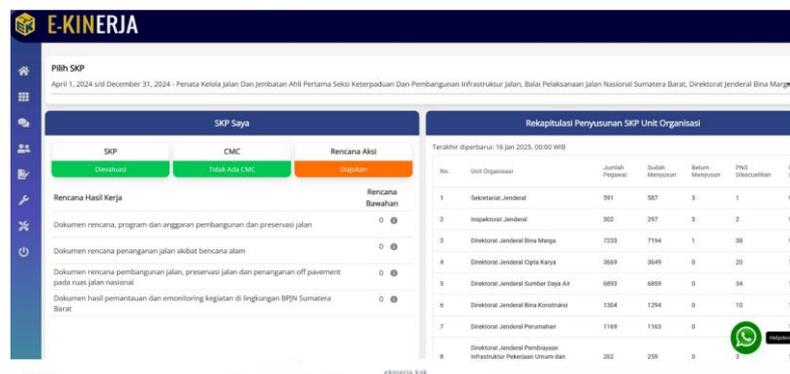
KODE	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
0401000	DIREKTORAT JENDERAL BINA RAJAGA	23.000.000,00							
0407000	DIREKTORAT SARAN PRASARANA JALAN-TOL	2.250.000,00							
0403000	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELANGGARAWA JALAN DAN JEMBRAN	17.940.000,00							
0403000	DIREKTORAT PERANGKAPAN JALAN	7.740.000,00							
0403000	DIREKTORAT PERANGKAPAN JEMBRAN	4.930.000,00							
0404000	DIREKTORAT PERSEKUTUAN JALAN DAN JEMBRAN WILAYAH I	4.930.000,00							
0408000	DIREKTORAT PERSEKUTUAN JALAN DAN JEMBRAN WILAYAH II	4.930.000,00							
0404000	DIREKTORAT JALAN BINA WANGUNAN	4.930.000,00							
0404000	DIREKTORAT BINA TOL DAN JEMBRAN	4.930.000,00							
0410000	DIREKTORAT KECENDERUNGAN	7.830.000,00							
<b>Pagu : 35.088.238.000</b>									

5. e-Monitoring –DAK  
Electronic Monitoring Dana Alokasi Khusus adalah aplikasi yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan DAK Fisik



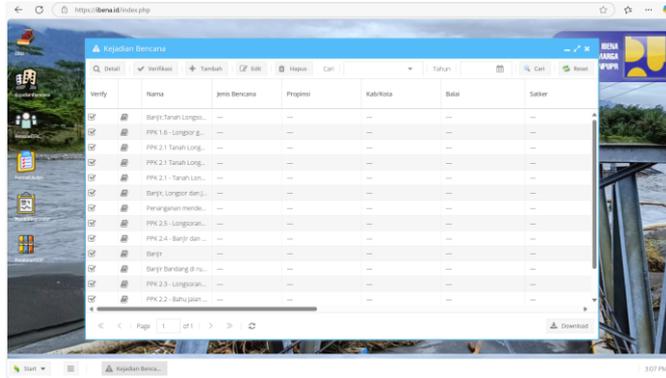
## 6. e-Kinerja

Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aplikasi ini mencakup pengelolaan kehadiran, kinerja, prestasi, dan tunjangan pegawai. E-Kinerja memungkinkan pendataan secara elektronik, mengurangi kebutuhan memasukkan data secara manual. Selain itu, E-Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau capaian realisasi pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan. Tujuan E-Kinerja adalah tersedianya data kinerja pegawai ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi



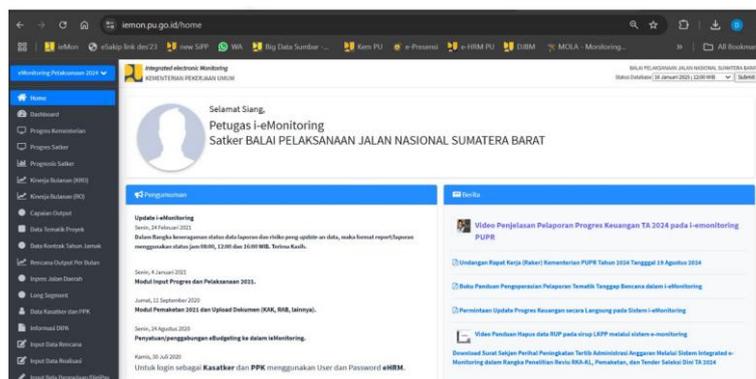
## 7. Informasi Bencana Alam (IBENA)

Aplikasi pelaporan bencana alam secara *real-time* di lingkup Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan adanya aplikasi ini, maka pelaporan dan *update* kondisi di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan diketahui secara berjenjang. Adapun pelaporan dilakukan oleh masing-masing PPK dan akan dimonitor secara berjenjang oleh Satker, Balai, dan Direktorat Preservasi.



## 8. Integrated Electronic Monitoring(e-Monitoring)

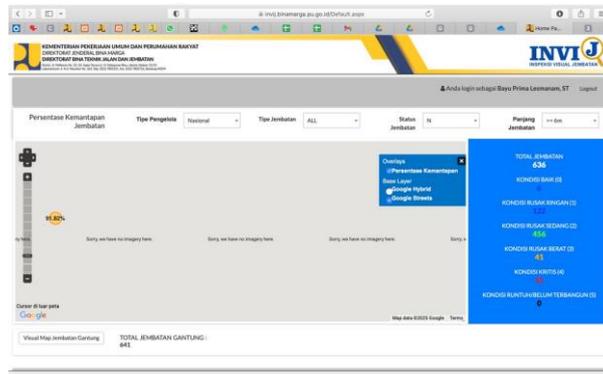
Merupakan Suatu Sistem Informasi Terintegrasi, baik secara teknologi informasi maupun organisasi yang mempresentasikan bisnis proses anggaran mulai dari pemograman, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi secara elektronik untuk berbagai sumber dana (APBN, SBSN, dan PHLN). Sistem Informasi Terintegrasi dilakukan dengan menghubungkan system perencanaan KRISNA Bappenas, Sistem penganggaran dalam RKA-K/L Sakti Kementerian Keuangan, Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan SPOSE-LKPP, Sistem Penyerapan anggaran dalam SAKTI Kementerian Keuangan serta Sistem Monitoring Anggaran e- MOnev Bappenas dan SMART DJA Kementerian Keuangan.



## 9. Inspeksi Visual Jembatan (Invi J)

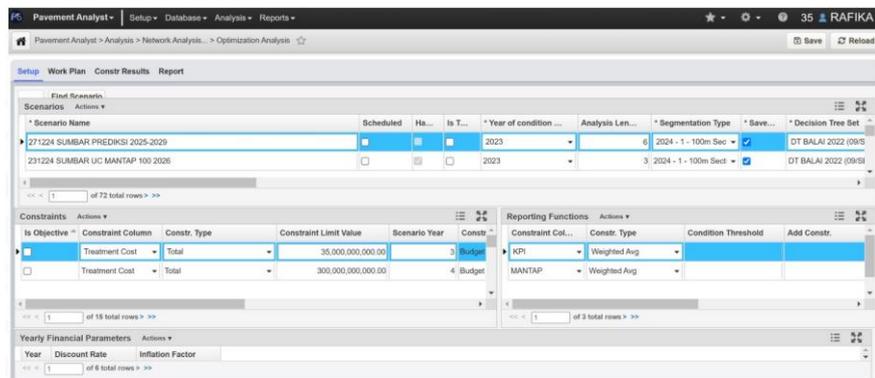
Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen jembatan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor

dalam melakukan inventarisasi data jembatan dan inspeksi jembatan di sepanjang jalan nasional



#### 10. Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3)

Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3) dikembangkan sebagai perangkat pendukung pengambilan keputusan dalam melakukan analisis strategis dan analisis pemrograman dalam penyelenggaraan jalan, khususnya untuk pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional



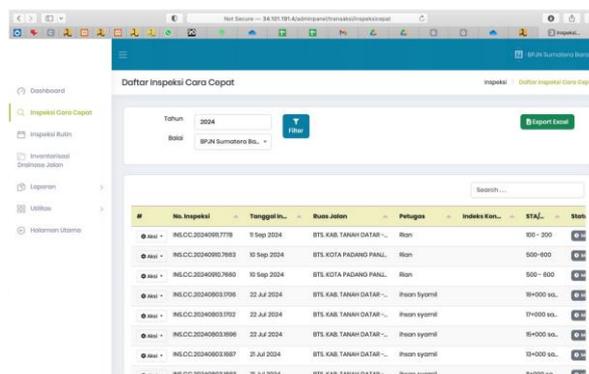
#### 11. INSLOPE

Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen lereng yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor dalam melakukan inventarisasi data lereng dan inspeksi lereng di sepanjang jalan nasional



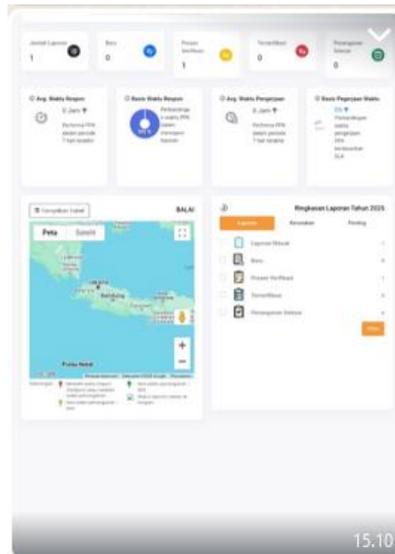
## 12. INDRAIN

Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen drainase jalan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor dalam melakukan inventarisasi data drainase dan inspeksi drainase di sepanjang jalan nasional



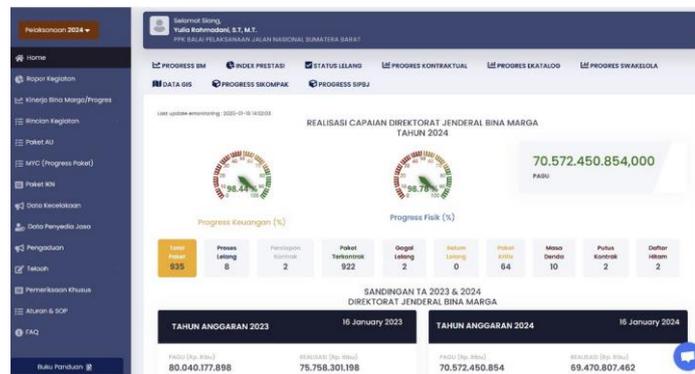
## 13. Jalan Kita (JAKI)

Aplikasi Jaki (Jalan Kita) adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kerusakan yang terjadi di jalan-jalan nasional Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh team PUPR



#### 14. Kepatuhan Intern Bina Marga (KI-BIMA)

Aplikasi ini digunakan untuk memantau kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



#### 15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.



## 16. Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP)

SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.



## 17. Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK)

SIKOMPAK merupakan sistem informasi yang dapat digunakan dalam penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak yang dilakukan secara realtime dan berbasis elektronik.

No	ID/RUP	Nama Paket	TA	Penyedia	Tahapan	Aksi
1	3038029	BANTEN SPJN SUNBAR	2022	PT Sirena Multi Daya	Penyedia	Detail
2	3038068	SURVEI (INSPEKSI) KONDISI JARINGAN JALAN SPJN SUNBAR	2022	PT GITA CIPTA BAGASARA	Penyedia	Detail
3	3037039	INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JARINGAN JALAN SPJN SUNBAR	2023	PT GITA CIPTA BAGASARA	Penyedia	Detail
4	4528023	BANTEN SPJN SUNBAR	2024	PT BECONO KSO PT ANJA JASA PENGANTARA & PT KARTIKA UTAMA CITRAMANDIRI	Penyedia	Detail
5	4301481	BANTEN SPJN SUNBAR	2023	PT DASUMINYO HARBA KONSULTINDO	Penyedia	Detail
6	4645871	INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JARINGAN JALAN SPJN SUNBAR	2024	PT GITA CIPTA BAGASARA	Penyedia	Detail

### 18. Sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ)

SIPBJ adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengelola seluruh siklus pengadaan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

No	ID	Name Paket	IDRUP	Page Anggaran	UPTIS2	Tahapan Paket	Terkakhir Dirubah
1	SIPBJ						

### 19. Sistem Informasi Padat Karya (SIPAKAR)

Aplikasi Sistem Informasi Padat Karya (Sipakar) merupakan alat pengolahan data informasi padat karya di Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga data dan informasi pelaksanaan padat karya lebih akurat, aktual, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah kesulitan pada pelaksanaan pemantauan dalam pemenuhan layanan indikator kinerja, kesulitan di dalam memperoleh data dan informasi pelaksanaan program padat karya secara akurat, aktual, transparan, dan akuntabel, kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal, penyedia jasa tidak dapat

mencapai target jumlah pekerja per hari (HOK), penyedia jasa belum memiliki sistem pelaporan yang seragam sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan pimpinan, pelaporan kemajuan fisik serta keuangan yang dilakukan setiap hari



20. Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terinteg rasi (SIPASTI)  
 Aplikasi SIPASTI memberikan informasi *database* sebagai salah satu referensi (Harga Satuan Dasar (HSD), Harga Satuan Pekerjaan (HSP), dan harga satuan wilayah), menyediakan sistem perhitungan penyusunan HPS, sistem pembahasan, penetapan, dan reviu HPS.

The screenshot shows the SIPASTI application interface. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Katalog HSPW, and Perubahan Item Pekerja. The main content area displays a table titled 'Proses Penyusunan HPS PPK' with columns for 'No', 'Unor', 'Jumlah Paket PUPR di SIPASTI', and various stages of the HPS process.

No	Unor	Jumlah Paket PUPR di SIPASTI		Proses Paket di SIPASTI									
				Proses Penyusunan HPS oleh PPK		Proses Pembahasan Unor		Penetapan HPS oleh PPK		Reviu HPS di BPZJK		HPS Selesai	
1	PUPR	973	100%	660	67.8%	64	6.6%	36	3.7%	75	7.7%	138	14.2%
2	SDA	262	26.9%	174	66.4%	20	7.6%	6	2.3%	25	9.5%	37	14.1%
3	BM	448	46%	322	71.9%	34	7.6%	22	4.9%	1	0.2%	69	15.4%
4	CK	183	18.8%	138	75.4%	7	3.8%	8	4.4%	10	5.5%	20	10.9%
5	PERUMAHAN	80	8.2%	26	32.5%	3	3.8%	0	0%	39	48.8%	12	15%

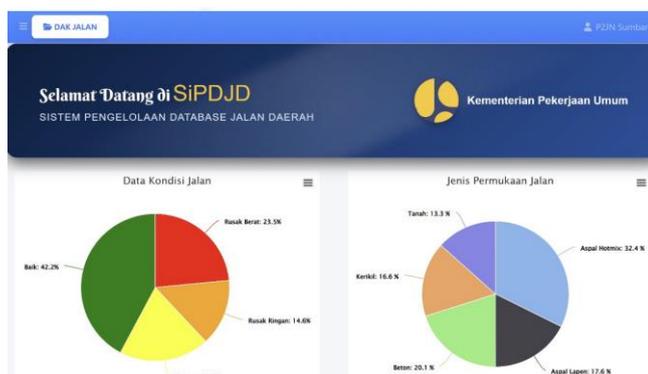
21. Sistem Masukan Data

Aplikasi yang menghimpun data -data survey tahunan terdiri dari IRI, PCI, FWD, RNI dan Data Lalu lintas.



## 22. Sistem Informasi Pelaksanaan Jalan Daerah (SIPDJD)

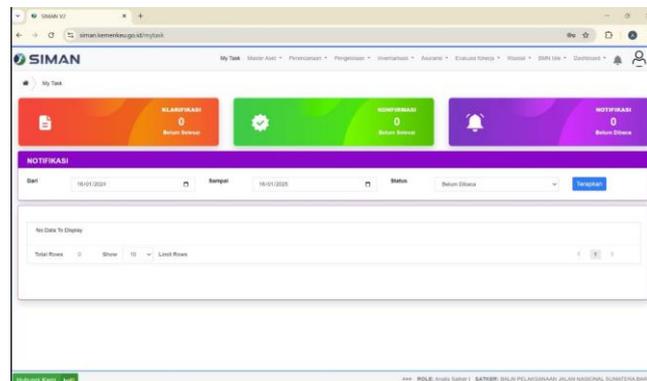
Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan jalan dan jembatan daerah. Aplikasi ini dapat diakses secara online oleh pengguna terdaftar untuk mengunggah dan melihat data jalan propinsi, kabupaten, dan kota



## 23. Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN)

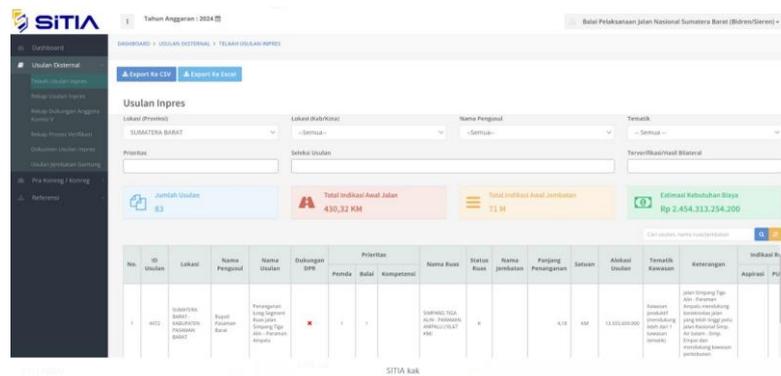
aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah

ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku



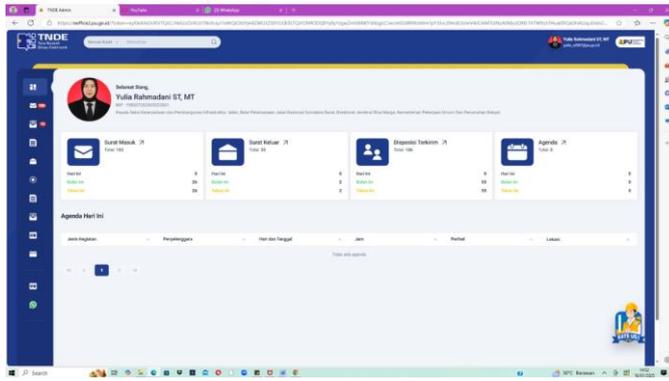
#### 24. Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SITIA)

Aplikasi SiTIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel) dirancang untuk mengintegrasikan sistem penyusunan program, mencatat usulan anggota dewan secara terpusat, dan mencatat histori penyusunan program untuk memudahkan monitoring progres proyek dan meningkatkan akuntabilitas.



#### 25. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

TNDE adalah aplikasi berbasis web dan android yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan pencarian arsip surat. Persuratan melalui aplikasi TNDE memiliki kelebihan dibandingkan persuratan secara manual atau fisik.



## 1.5 Isu Strategis

### 1.5.1 Kondisi Umum Wilayah



Gambar 1. 19 Peta Prov. Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU dan 3°30' LS serta 98°36' BT dan 101°53' BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat/ garis ekuator). Luas daratan Provinsi diperkirakan ±186.580 km<sup>2</sup>. Luas perairan teritorial adalah 57.880 km<sup>2</sup> dan 12.870 km<sup>2</sup> perairan ZEE serta panjang garis pantai 2.420.388 km. Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten atau Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa). Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayahnya mencapai 601.135 Ha, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan wilayah terkecil yaitu dengan luas wilayah 2.300 Ha.



*Gambar 1. 20 Pesona kawasan wisata Lembah Harau Payakumbuh*

Iklm Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis Khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri, (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara

sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau dan Batang Tarusan. Selain itu, terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Tidak hanya Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar dengan luas mencapai 130,1 km<sup>2</sup>. disusul Maninjau di kabupaten Agam. Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Diatas dan Danau Dibawah).



*Gambar 1. 21 Pesona Keindahan Kelok 9*

Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang penuh dengan alam dan panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, sehingga wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat yaitu gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang penuh dengan alam dan

panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo- Australia, sehingga wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat yaitu gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. (Sumber: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) dan [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id))



*Gambar 1. 22 Pesona Keindahan Pulau Mandeh*



*Gambar 1. 23 Kelok 44 , Kab. Agam yang merupakan rute wajib Tour de Singkarak*



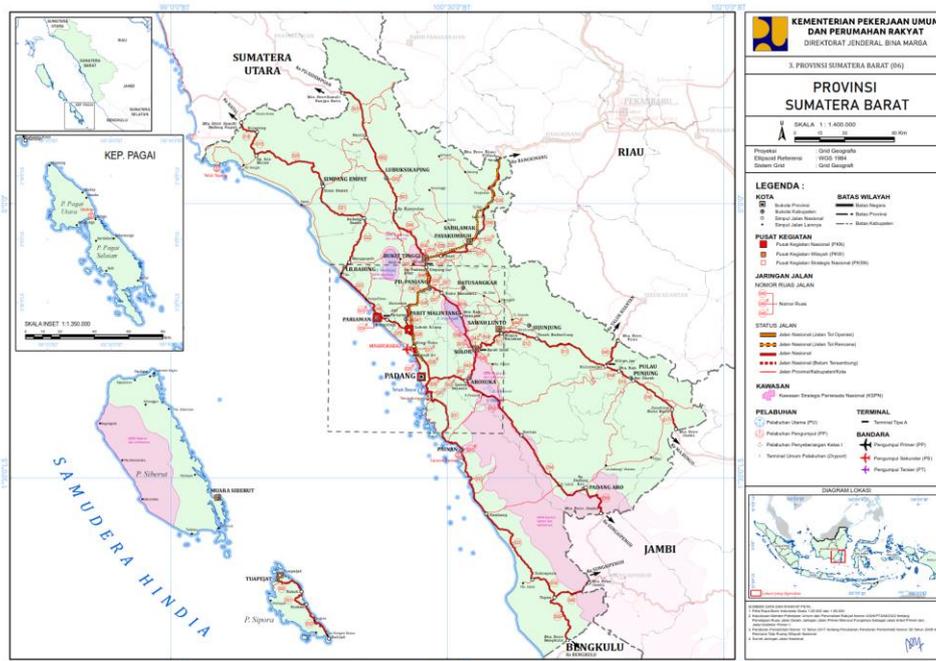
*Gambar 1. 24 Pesona Wisata dan Sejarah Tambang Batu Bara Ombilin , Kota Sawahlunto*



Gambar 1. 25 Kawasan Seribu Rumah Gadang , Kab Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

### 1.5.2 Kondisi Infrastruktur Satker BPJN Sumatera Barat

Kemantapan Jalan yang dilakukan pada kegiatan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan pada Semester II menunjukkan 91,55 % dan tidak mantap 8,45 % dari total 86 ruas jalan nasional dengan total panjang jalan 1.423,42 Km. Kemantapan jembatan berdasarkan kategori kondisi jembatan semester II menunjukan kondisi mantap 90,96 (593 jembatan) dari total 636 jembatan yang berada pada jalan nasional di provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 26 Peta Wilayah Kerja BPJN Sumatera Barat

## Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 19 Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat

06006	SP. PADANG LUAR - SP. TIGA KOMARULLAH
0600611	JLN. PROF. HAMKA (PADANG PANJANG)
0600612	JLN. M. DAUD RASIDI (PADANG PANJANG)
0600613	JLN. KOMARULLAH (PADANG PANJANG)
06007	BTS. KOTA PADANG PANJANG - KUBU KERAMBIL
0600711	JLN. HAMKA - BUKIT KANDUNG
0600713	JLN. PASAR TERNAK GANTING
0600714	JLN. BKIA - SOLOK BATUNG
0600715	JLN. SOLOK BATUNG - KACANG KAYU
06008	KUBU KERAMBIL - BTS. KAB. TANAH DATAR
06009	BTS. KAB. TANAH DATAR - BTS. KOTA SOLOK
06026	LUBUK ALUNG - SP. DUKU
06040	BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN
0604011	JLN. ST. SYHRIR (PADANG PANJANG)
06041	SICINCIN - LUBUK ALUNG

## Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 20 Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat

06036	BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH
0603611	JLN. SUDIRMAN (PAYAKUMBUH)
06037	BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO
0603711	JLN. SOEKARNO HATTA (PAYAKUMBUH)
0603712	JLN. DIPONEGORO (PAYAKUMBUH)
0603713	JLN. K.H. AHMAD DAHLAN (PAYAKUMBUH)
06056	KELOK 9 (trase lama)

### Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 21 Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat

06001	RANJAU BATU (BTS. PROV. SUMUT) - PANTI
06002	PANTI - BTS. KOTA LUBUK SIKAPING
0600211	LUBUK SIKAPING BYPASS
06003	BTS. KOTA LUBUK SIKAPING - SP. KUMPULAN
06004	SP. KUMPULAN - SP. TAMAN

### Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 22 Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat

06018	BEDENG RAPAT (BTS. PROV. SUMUT) - SILAPING
06019	SILAPING - SP. AIR BALAM
06020	SP. AIR BALAM - SP. EMPAT
06021	SP. EMPAT - PADANG SAWAH

### Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 23 Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat

06022	PADANG SAWAH - MANGGOPOH
06023	MANGGOPOH - BTS. KOTA PARIAMAN
0602314	JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN)
0602414	JLN. ZAINI (PARIAMAN)
0602415	JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)
0602416	JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)
06025	KURAITAJI - LUBUK ALUNG
06048	BYPASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)

## Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 24 Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat

06050	TUAPEJAT - ROKOT
06051	ROKOT - SIOBAN
06052	SIOBAN - KATIET

## Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 25 Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat

0600911	JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)
0600912	JLN. KH. DEWANTORO (SOLOK)
0600913	JLN. A. YANI (SOLOK)
0600914	JLN. DIPONEGORO (SOLOK)
06010	BTS. KOTA SOLOK - BTS. KOTA SAWAHLUNTO
06011	BTS. KOTA SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN
0602811	PADANG BYPASS II (BARU)
0602911	PADANG BYPASS I
06042	BTS. KOTA SOLOK - LUBUK SELASIH
0604211	JLN. LUBUK SIKARAH (SOLOK)
0604212	JLN. HAMKA (SOLOK)
06043	LUBUK SELASIH - BTS. KOTA PADANG
0604311	BTS. KOTA PADANG - SP. LUBUK BEGALUNG
0604412	JLN. SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN (SAWAHLUNTO)
0604711	SOLOK BYPASS (JL. NASIR PAMUNCAK)

## Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 26 Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat

06012	MUARA KALABAN - TANAH BADANTUNG
06013	TANAH BADANTUNG - KILIRANJAO
06014	KILIRANJAO - BTS. KAB. DHARMASRAYA
06015	BTS. KAB. DHARMASRAYA - SEI DAREH
06016	SEI DAREH - JUNCTION (KOTO BARU)
06017	JUNCTION (KOTO BARU) - BTS. PROV. JAMBI
06045	KILIRANJAO - BTS. PROV. RIAU

### Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat

*Tabel 1. 27 Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat*

06031	BTS. KOTA PADANG - BTS. KOTA PAINAN
0603111	JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)
0603112	JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)
0603113	JLN. SUTAN SYAHRIR (PAINAN)
06032	BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG

### Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat

*Tabel 1. 28 Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat*

06033	KAMBANG - INDRAPURA
06034	INDRAPURA - TAPAN
06035	TAPAN - BTS. PROV. BENGKULU
06049	TAPAN - BTS. JAMBI

### Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat

*Tabel 1. 29 Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat*

06053	LUBUK SELASIH - SURIAN
06054	SURIAN - SP. PADANG ARO
06055	SP. PADANG ARO - BTS. JAMBI

## Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 30 Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat

0600411	BUKITTINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BYPASS ANAK AIR)
06005	SP. JAMBU AIR - SP. PADANG LUAR
0600511	BUKITTINGGI BYPASS II (SP. TALUK - SP. BYPASS ANAK AIR)
0600513	SP. AUR KUNING - SP. TALUK
0600514	SP. TALUK - SP. JAMBU AIR
0602611	JLN. ADINEGORO (PADANG)
0602612	JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)
0602711	BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SP. DUKU
06038	BASO - BTS. KOTA BUKITTINGGI
0603811	JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)

### 1.5.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Satker BPJN Sumatera Barat

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja BPJN Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia terutama Tenaga Teknis sehingga beban kerja pegawai melebihi kapasitas ( beberapa pekerjaan dirangkap oleh petugas yang sama)
2. Beberapa proses penarikan/realisasi anggaran harus menunggu revisi DIPA karena adanya pagu minus di detail akun sehingga penginputan pada esakti sedikit terkendala

### 1.5.4 Isu Strategis di Lingkungan Satker BPJN Sumatera Barat

- a. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.
- b. Mendukung pembangunan jalan daerah,
- c. Mendukung penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2024.

## 1.6 Sistematika Laporan

### ***Bab I Pendahuluan***

*Pada Bab I "Pendahuluan" yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Satker BPJN Sumatera Barat*

### ***Bab II Perencanaan Kinerja***

*Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Dokumen Perencanaan Satker BPJN Sumatera Barat 2020-2024, PK Satker BPJN Sumatera Barat 2024, dan target 2024 menurut Dokumen Perencanaan .*

### ***Bab III Kapasitas Organisasi***

*Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.*

### ***Bab IV Akuntabilitas Kinerja***

*Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis serta realisasi anggaran Satker BPJN Sumatera Barat 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja penghargaan dan hasil survei kepuasan masyarakat.*

### ***Bab V Penutup***

*Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.*

### **Lampiran**

*Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi Kinerja Per Program 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner Pemanfaatan LAKIP, Daftar Penghargaan yang diperoleh, Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Satker BPJN Sumatera Barat, dan Sertifikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024.*

## 2 BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan

Tujuan Dokumen Perencanaan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat adalah sebagai pendukung tujuan RENSTRA Bina Marga yang merupakan juga merupakan pendukung dari tujuan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semua ini untuk mendukung tujuan RPJMN dan dapat dijabarkan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020).

#### 2.1.1 Visi, Misi,

Visi pembangunan nasional yang termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) sesuai dengan visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

***TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG***

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
- 2) Indonesia Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia tinggi, dan tingkat perekonomian baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk kemantapan hukum;
- 3) Indonesian Adil dan Makmur adalah bangsa yang memberikan kesempatan secara merata kepada seluruh rakyatnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak

politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

- 4) Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden (yang sering disebut sebagai Nawacita, yang diadopsi menjadi misi pembangunan nasional 2020-2024 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)) sebagai berikut:

1. *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*
2. *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.*
3. *Pembangunan yang merata dan berkeadilan.*
4. *Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.*
5. *Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.*
6. *Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.*
7. *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.*
8. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.*
9. *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.*

Selanjutnya, Presiden memberikan menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, dimana:



***“ Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. ”***

Adapun kelima arahan utama Presiden untuk pembangunan nasional 2020-2024 tersebut didetailkan pada **Tabel 2.1** berikut ini:

*Tabel 2. 1 Lima (5) Arahan Utama Presiden sebagai Strategi Pembangunan Nasional*

No	Bidang	Arahan Presiden
1	Pembangunan SDM	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2	Pembangunan Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3	Penyederhanaan Regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4	Penyederhanaan Birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5	Transformasi Ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Sumber:** Lampiran I Narasi RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

Pelaksanaan visi, misi, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 tersebut pada Bagian 2.1.2 diatas, dilakukan melalui 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional (PN)), sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayan Publik.

Secara lebih spesifik sektor transportasi (jalan) masuk ke dalam agenda pembangunan nasional ke-5, yakni PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1. Secara umum, pembangunan infrastruktur nasional di Tahun 2020-2024 diarahkan pada 3 fokus, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagai pelayanan dasar, (2) penyediaan infrastruktur sebagai pendukung ekonomi (baik dalam penyediaan konektivitas bagi daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP); maupun untuk mendukung sektor ekonomi utama (khususnya: industri, jasa dan pariwisata, serta pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan), dan (3) penyediaan infrastruktur bagi wilayah perkotaan.

Lebih detail, PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastruktur Ekonomi, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

#### *2.1.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PUPR 2020-2024*

Pada bagian ini disampaikan juga visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Kementerian PUPR berdasarkan Dokumen Renstra Kementerian PUPR.

## **Visi Kementerian PUPR**

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut :

***KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”***

## **Misi Kementerian PUPR**

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **Tujuan Kementerian PUPR**

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

## Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

### *2.1.1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024*

Pada bagian ini disampaikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Visi penyelenggaraan jalan nasional 2020-2024 adalah sebagai berikut:

***“DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA VISI DAN MISI PRESIDEN YAKNI: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”***

Berikut penjelasan mengenai Visi tersebut:

1. Andal adalah mengupayakan kemampuan organisasi untuk dapat menjadi tumpuan bagi pelaksanaan pembangunan pada bidang yang menjadi tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Profesional adalah mengutamakan pelaksanaan tugas berdasarkan kepada keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Inovatif adalah mengupayakan untuk selalu memperbarui kemampuan organisasi untuk dapat menjawab tantangan tugas dan fungsi sesuai dengan perkembangan jaman;
4. Berintegritas adalah mengutamakan pelaksanaan budaya kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya, dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan 2 misi utama yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga pada periode 2020-2024, yakni:

***M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional;***

***M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;***

Misi 1 (M.1) merupakan misi eksternal (yang menjadi *public concern*) berkaitan dengan komitmen Ditjen Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.

Adapun M.2 merupakan misi internal (yang menjadi *institution concern*) berkaitan dengan upaya dari Ditjen Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara

andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Permen PUPR 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, bidang penyelenggaraan jalan merupakan tugas dari Ditjen Bina Marga. Lebih lanjut, sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

#### 2.1.1.3 *Visi dan Misi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat*

##### **VISI Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat**

Tersedianya Jaringan Jalan Nasional yang handal, terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social

##### **MISI Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat**

- Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penanganan Jalan Nasional.
- Mengembangkan SDM yang profesional dan tanggap untuk mendukung penanganan Jalan Nasional.
- Mendorong partisipasi pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam penanganan Jalan Nasional, maupun dalam pemanfaatannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 02 tahun 2022 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

#### 2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga periode 2020-2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (*strategy map*) mengikuti konsep *Balanced Scorecard* (BSC), dan dikelompokkan ke dalam 4 perspektif, yakni:

1. *Stakeholder perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020-2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih (berikut dengan jajaran Kabinetnya).
2. *Customer perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan pengguna (*customer*) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. *Internal Business Perspectives* (SP), mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik-baiknya, secara efektif dan efisien sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Learning and growth perspectives* (SP), mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Oleh karena itu, tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut:

***T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;***

***T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;***

***T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;***

***T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.***

Masing-masing tujuan Ditjen Bina Marga tersebut di atas, mewakili setiap perspektif dalam *Balanced Scorecard* (BSC), yakni:

1. Tujuan pertama (T.1) mewakili tujuan dari *stakeholders perspectives* (pemberi mandat) yang dalam periode RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional (tertuang sebagai KP.1 Konektivitas Jalan dalam Agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar);
2. Tujuan kedua (T.2) mewakili tujuan dari *customer perspectives*, yakni pengguna jalan nasional, yang secara regulasi (sesuai UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan) memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan minimal sesuai SPM (standar pelayanan minimal), yang mencakup aspek: aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Tujuan ketiga (T.3) mewakili tujuan pada level *Internal Business Perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai UU No 38 Tahun 2004 maupun Permen PUPR 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga.
4. Tujuan keempat (T.4) mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives*, sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam konteks manajemen kinerja, modal dasar organisasi ini mencakup aspek SDM, pendanaan, sarana dan prasarana pendukung, sistem informasi, regulasi (NSPK), dan tata kelola/kelembagaan.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar 2.2, yakni SS.2).

Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);

2. Sasaran Program (SP) yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni sesuai ketentuan pasal 37 (1.c) UU 38/2004 tentang Jalan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan yang mencakup: aspek aksesibilitas, kondisi jalan, keselamatan jalan;
3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
  - Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;

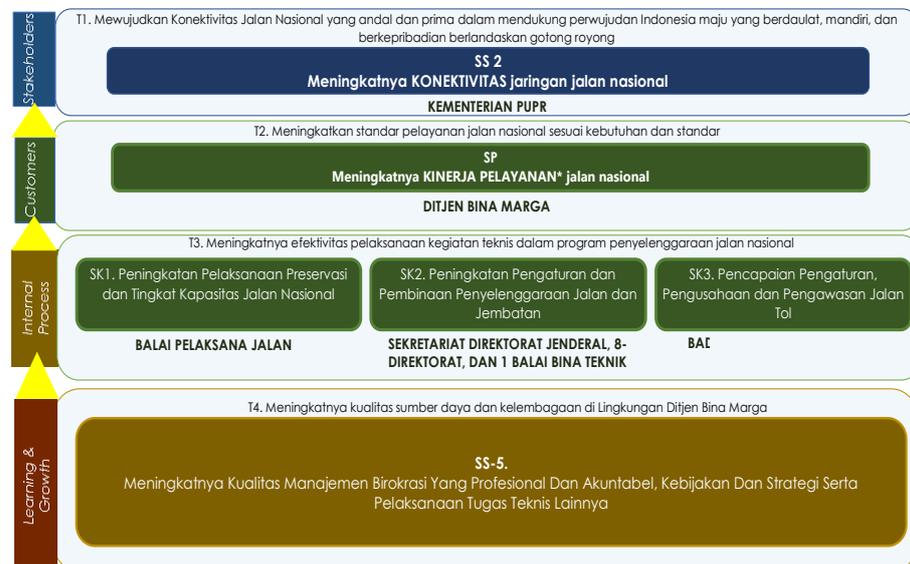
- Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sasaran serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya disampaikan pada Gambar 2. 2, di mana:

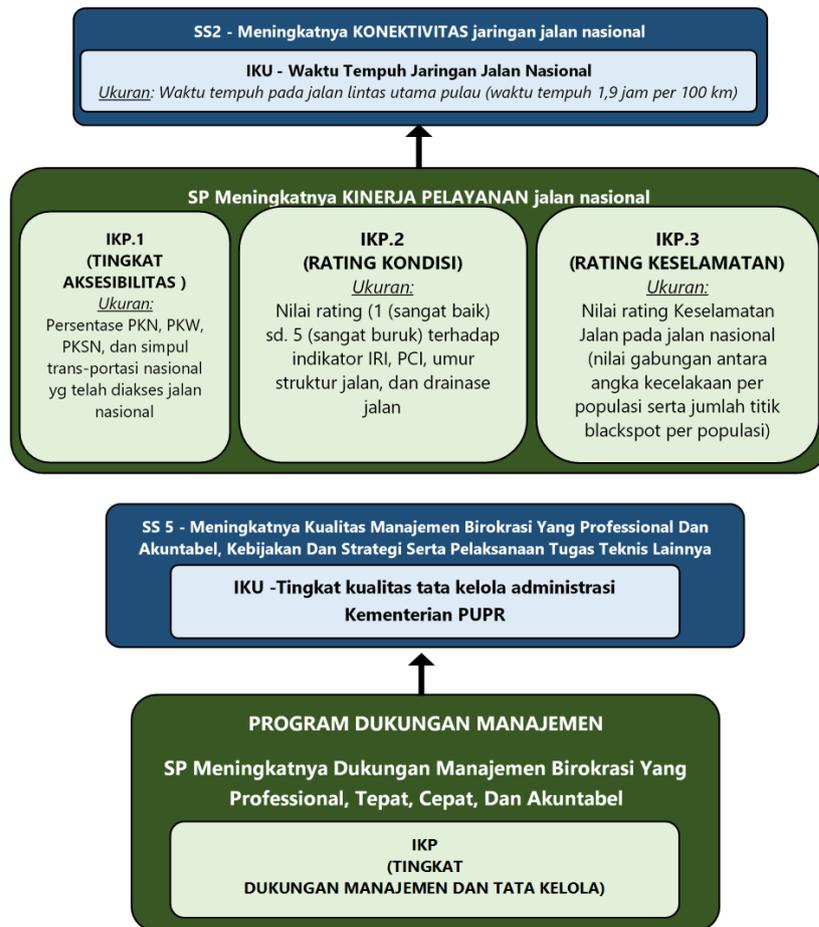
1. Untuk Sasaran Strategis (SS) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering disebut juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif/ kualitatif tercapainya target Sasaran Strategis (SS). SS dan IKSS/IKU ini merupakan cerminan sasaran utama yang hendak dicapai dari penyelenggaraan jalan dalam mendukung agenda pembangunan nasional periode 2020-2024 (yakni konektivitas jalan). Oleh karenanya SS dan IKU tersebut tercantum pada *perspective* tertinggi (*stakeholders perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan termuat sebagai SS dan IKU juga dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024;
2. Untuk Sasaran Program (SP) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang mencerminkan tercapainya sasaran dari program

penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung perwujudan Sasaran Strategis Nasional. Oleh karenanya SP dan IKP tercantum pada *perspective* kedua tertinggi (*customers perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan menjadi sasaran dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024 karena menjadi tanggung jawab Dirjen Bina Marga untuk mencapainya;

3. Untuk Sasaran Kegiatan (SK) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan terlaksananya sasaran/target setiap kegiatan dalam program penyelenggaraan jalan dalam mendukung terwujudnya SP dan SS. Oleh karenanya SK dan IKK tercantum pada *perspectif* ketiga dan keempat (*internal business perspective* dan *learning and growth perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan menjadi sasaran dan target kinerja dalam Renstra masing-masing Eselon II/UPT (Direktorat Teknis/Balai) dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk mencapainya.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024



Gambar 2. 2 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Selanjutnya, pembahasan mengenai Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (berikut dengan targetnya) dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 disampaikan pada **Lampiran**.

Penjelasan tentang pemilihan IKU dan IKP tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan tidak hanya diukur dari terhubungnya simpul-simpul penting dan prioritas nasional oleh jaringan

jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan), tetapi lebih dari itu diukur melalui efektivitas hubungan antar pusat kegiatan/simpul tersebut yang diukur melalui waktu tempuh pada koridor utama jaringan jalan nasional. Adapun target maksimalnya adalah seluruh koridor jaringan jalan nasional dapat ditempuh dalam waktu 1,9 jam untuk 100 km.

2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional yang efisien, yakni:
  - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional, dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);
  - b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang

Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (*IRI/International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (beserta indikator lainnya: PCI dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metoda Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik) dan Skor 5 (sangat buruk). Target dari Rating Kondisi Jalan (RKJ) ini adalah ruas jalan dalam kondisi mantap (skor RKJ antara 2 s.d 3), yakni ruas jalan yang secara minimal dapat digunakan (tidak rusak) atau dijaga kondisinya dalam *range* baik (*good*) dan sedang (*fair*).

- c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Black Spot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor (berskala 5: nilai 0 (sempurna) dan nilai 5 (sangat buruk)) yang menggabungkan antara (1) skor tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dengan (2) skor tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).
- d. Selanjutnya penjelasan rinci mengenai perhitungan tiga poin di atas, dijabarkan dalam buku pedoman perhitungan IKP/IKU Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024.

### 2.1.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini disampaikan sasaran dari BPJN Sumatera Barat untuk periode Rencana Strategis 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Tabel 2. 2 Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan jalan nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama Provinsi* (dalam jam per 100 km)  (koridor jalan nasional dengan waktu tempuh < 1,9 jam per 100 km)	Jam	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9
2	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN jalan nasional	IKP1 TINGKAT AKSESIBILITAS jalan nasional  (% PKN, PKW, PKS, simpul transportasi nasional, dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI Prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional)	%	76.0	76.0	76.0	80.0	84.0
		IKP2 RATING KONDISI jalan nasional  (rata-rata rating nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.75	2.57	2.41	2.28	2.20
		IKP3 TINGKAT KESELAMATAN jalan nasional  (Indeks Keselamatan jalan)	Nilai	5.0	5.0	4.5	4.1	3.8

Mengacu kepada review renstra Ditjen Bina Marga, terdapat 8 (delapan) terdapat sasaran kegiatan “Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional” yang diturunkan pada unit Balai Pelaksanaan Jalan dengan indikator kinerja antara lain:

- a. Panjang jalan yang terpelihara sepanjang
- b. Panjang jembatan yang terpelihara.
- c. Panjang jalan yang ditingkatkan.
- d. Panjang jembatan yang ditingkatkan.
- e. Panjang jalan yang dibangun.
- f. Panjang jembatan yang dibangun.
- g. Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun.
- h. Dukungan jalan daerah.

Tabel 2. 3 Target Keluaran (Output) Kegiatan 2020-2024

	Target Output Utama Renstra 2020-2024	Satuan	Rencana Target					Total
			Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
1	Panjang jalan yang terpelihara	km	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	0.00	49.23	78.33	98.24	188.11	413.91
3	Panjang jembatan yang terpelihara	m	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54
4	Panjang jembatan yang ditingkatkan	m	158.80	907.50	900.00	1,843.00	2,184.00	5,993.30
5	Panjang jalan akses simpul transportasi yang dibangun (Pelabuhan, bandara)	km	2.00	8.00	8.00	9.50	8.00	35.50
6	Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	km	0.00	0.00	1.40	3.00	3.00	7.40
7	Panjang Flyover dan Underpass yang dibangun	m	0.00	0.00	288.53	374.03	374.03	1,036.60
8	Panjang Penanganan Keselamatan Jalan	km	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	24.00

Dalam mendukung pencapaian indikator panjang jalan jembatan yang ditingkatkan, maka dari itu direncanakan Pembangunan *antara lain*:

1. Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi Bunga Tanjung– Teluk Tapang  
Untuk mendukung lancarnya akses arus barang melalui Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 34 km.
2. Pembangunan Jalan Akses Terminal Anak Air  
Pembangunan jalan akses Simpul Transportasi Terminal Tipe A Kota Padang sepanjang 1,5 km.
3. Pembangunan Jalan Alih Trase Akibat Abrasi di Pulau Sipora (Kep. Mentawai)
4. Pembangunan Fly Over Panorama I Sitinjau Lauik di Kota Padang
5. Pembangunan Fly Over Duku BIM di Kabupaten Padang Pariaman
6. Pembangunan Fly Over Tabing dan Lubuk Buaya di Kota Padang

7. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
8. Mendukung pembangunan jalan daerah
9. Mendukung penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023.

Penyusunan Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Tahun 2020-2024 untuk Preservasi Jalan dilakukan berdasarkan Petunjuk Penyusunan Program Preservasi Jalan oleh Direktorat Preservasi Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun perkiraan perubahan kondisi jalan akibat penanganan untuk perkerasan jalan adalah dengan KPI Rating Kondisi 2,2.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Salah satu ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 diatas adalah Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan perjanjian kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada 05 Januari 2024. Perjanjian Kinerja awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Awal Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>			
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100,00 %	100,00 %	
	Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,78	
	Rincian Output			
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	<b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>			
	<b>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b>	100,00 %	100,00 %	
	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00 %	100,00 %	
	Rincian Output			
	EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
  2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran

Anggaran

Rp. 20.100.289.000  
Rp. 19.754.176.000  
Rp. 39.854.465.000

## 2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi

Pada tanggal 06 April 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor : 08/PRT/M/2018) maka sesuai Pasal 16.1.b pada Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal salah satunya terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran).

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Revisi Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>			
	<b>IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</b>	100.00 %	100.00 %	
	Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional	2.78	2.82	
	Rincian Output			
CBR.001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	2.00 Dokumen	6.00 Dokumen	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>			
	<b>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b>	100.00 %	100.00 %	
	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100.00 %	100.00 %	
	Rincian Output			
	EBA.962	Layanan Umum	1.00 Layanan	1.00 Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00 Unit	43.00 Unit	

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
  2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 20,092,597,000  
Rp. 19,508,176,000  
Rp. 39,601,773,000

### 2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat melakukan revisi Perjanjian Kinerja TA. 2024 pada 31 Desember 2024 yang disesuaikan dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR yakni adanya penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dan berdasarkan revisi DIPA terakhir TA. 2024. Pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Komponen perjanjian kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada tahun 2024 yakni :

- Program, dalam penyusunan perjanjian kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra 2020-2024.
- Sasaran, sesuai dengan yang dimuat dalam Review Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada perjanjian kinerja satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tahun 2024 terdapat terdapat 2 (dua) sasaran program dan 4 (empat) output. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tusi) dari Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2020-2024.

Berdasarkan PK Revisi untuk Target IKSP Rating Kondisi Jalan pada Satker BPJN Sumatera Barat terdapat penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri semester 2 TA 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei semester 2 TA 2024.

### 2.2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome)

Indikator Kinerja Kegiatan, Pada Perjanjian Kinerja awal Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tahun 2024 terdapat 4 (empat) Output, pada Perjanjian Kinerja awal yang digunakan sebagai sumber data adalah DIPA awal TA. 2024 sedangkan pada Perjanjian Kinerja revisi yang digunakan sebagai sumber

data adalah DIPA revisi terakhir TA. 2024 seperti yang dijelaskan pada tabel Perjanjian Kinerja di bawah ini :

Tabel 2. 6 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome)

No	IKSP	Satuan	Target		Keterangan
			PK Awal	PK Revisi	
1	Rating Kondisi Jalan Nasional	Nilai	2,78	2,82	<b>Berubah</b>
2	Dukungan Manajemen	%	100	100	<b>Tetap</b>

Berdasarkan tabel di atas untuk rating Kondisi Jalan pada Satker BPJN Sumatera Barat terdapat penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri semester 2 TA 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei semester 2 TA 2024.

#### 2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)

Tabel 2. 7 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		KETERANGAN
				PK AWAL	PK REVISI	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						
<b>IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>						
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>						
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	2,00	6,00	<i>Berubah</i>
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
<b>IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>						
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>						
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1,00	1,00	<i>Tetap</i>
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	<i>Tetap</i>
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	1,00	43,00	<i>Berubah</i>

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat perubahan target *output* hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan Unit Kerja

## 2.3 Metode Pengukuran

Untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan, maka perlu dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dengan capaian. Secara umum adalah membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal – hal yang diukur dalam Laporan Kinerja :

1. Sasaran Program
2. Sasaran Kegiatan

### 2.3.1 Pengukuran sasaran program

#### **Indikator Sasaran Program 1: TINGKAT AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL**

Tingkat Aksesibilitas didefinisikan sebagai persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. Dalam hal ini pusat kegiatan atau simpul transportasi didefinisikan telah terakses bila jalan nasional telah terhubung sampai dengan pintu masuk (gate) dari masing-masing pusat kegiatan. Khusus untuk Pelabuhan, Bandara, Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana jalan akses berada dalam kewenangan operator/pengembang (developer), maka akses jalan nasional hanya sampai pada titik awal jalan yang dikelola oleh operator/developer.

Tingkat aksesibilitas diukur berdasarkan persentase pusat kegiatan yang telah diakses jalan nasional, meliputi:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
- Kawasan Industri (KI);
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
- Simpul transportasi nasional (pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul; bandar udara primer, sekunder, tersier; pelabuhan penyeberangan kelas IA, dan terminal kelas IA)

Pengukuran tingkat aksesibilitas dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi pusat kegiatan dan simpul transportasi baik eksisting maupun rencana dengan menggunakan dokumen perencanaan dari berbagai sektor terkait, antara lain:

1. PP No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk menentukan lokasi dan delineasi dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
2. PP No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 untuk menentukan lokasi dan delineasi dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
3. PP No.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 untuk menentukan rencana kawasan industri prioritas nasional. Sementara untuk kawasan industri eksisting berdasarkan data GIS, data tersebut dapat diakses di:  
<http://geoportal.kemenperin.go.id/pencarian?kategori=Lingkungan%20Terbangun>
4. Untuk peraturan yang menaungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain:
  - a. KEK Arun Lhokseumawe (PP No.5 Tahun 2017)
  - b. KEK Bitung (PP No.32 Tahun 2014)
  - c. KEK Galang Batang (Peraturan-Pemerintah No.42 Tahun 2017)
  - d. KEK Maloy (PP No.85 Tahun 2014)
  - e. KEK Mandalika (PP No.52 Tahun 2014)
  - f. KEK Morotai (PP No.50 Tahun 2014)
  - g. KEK Palu (PP No.31 Tahun 2014)
  - h. KEK Sei Mangke (PP No.29 Tahun 2012)
  - i. KEK Singashari (PP No.68 Tahun 2019)
  - j. KEK Sorong (PP No.31 Tahun 2016)
  - k. KEK Tanjung Apiapi (PP No.51 Tahun 2014)
  - l. KEK Tanjung Kelayang (PP No.6 Tahun 2016)
  - m. KEK Tanjung Lesung (PP No.26 Tahun 2012)

5. Kepmenhub No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional untuk menentukan lokasi bandara pengumpul primer, pengumpul sekunder dan pengumpul tersier baik eksisting maupun rencana yang secara hirarki memenuhi ketentuan untuk diakses oleh jalan nasional sesuai dengan pasal 18 ayat 2 – PP No. 13 tahun 2017;
6. KP no.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) untuk menentukan lokasi Pelabuhan Utama dan Pengumpul baik eksisting maupun rencana yang secara hirarki memenuhi ketentuan untuk diakses oleh jalan nasional sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 – PP No.13 tahun 2017;
7. Kepmenhub No. KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Tipe A di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah data-data tersebut diolah dalam bentuk GIS dan dilakukan *overlay* dengan data GIS jalan nasional terbaru, maka proses identifikasi pusat-pusat kegiatan yang telah terakses dengan jalan nasional dapat dilakukan. Tingkat aksesibilitas jalan nasional dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TI = \frac{SN_a}{\sum SN} \times 100$$

Dimana:

- TI : Tingkat Aksesibilitas (%)  
 SN<sub>a</sub> : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional  
 $\sum SN$  : Total jumlah Pusat Kegiatan

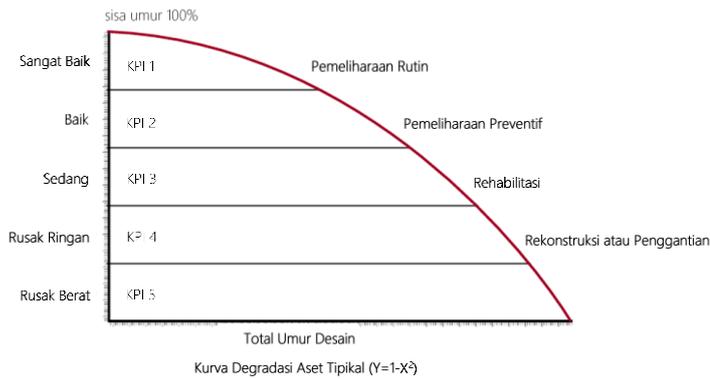
### **Indikator Sasaran Program 2: TINGKAT RATING KONDISI JALAN**

Untuk meningkatkan kehandalan pelayanan jalan dan pengambilan keputusan, Ditjen Bina Marga menyusun indikator kinerja kondisi jalan dengan 4 komponen berikut:

- a. Kekasaran / Roughness (nilai international roughness index, IRI)

- b. Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement Surface Condition (PCI)
- c. Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life of Pavement (RSL)
- d. Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness*

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya penanganan/perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.



Gambar 2. 3 Penggunaan KPI Jalan

1) **Kekerasan / Roughness** (nilai *international roughness index*, IRI)

Tabel 2. 8 Skala Penilaian KPI Roughness

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	$IRI < 2$	$IRI < 4$
2	Baik	$2 \leq IRI < 4$	$4 \leq IRI < 9$
3*	Sedang	$4 \leq IRI < 6$	$9 \leq IRI < 13$
4	Rusak Ringan	$6 \leq IRI < 8$	$13 \leq IRI < 4$
5	Rusak Berat	$IRI \geq 8$	$IRI \geq 14$

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
*3	*Sedang	*Tidak Ada Data	*Tidak Ada Data

## 2) Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition (PCI)*

Tabel 2.9 Skala KPI PCI

Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Diskripsi	Rentang PCIfinal
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

## 3) Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Structural Life (RSL)*

$$RSL = \frac{LN \left( \frac{CAP+r+MESA*(1+r)}{MESA} \right)}{LN (1+r)} - 1$$

Dimana :

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Stuktural Perkerasan/
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/ defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{In \frac{IRI - 1.52}{6.48}}{-0.074}$$

Jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)

Jika IRI < 2 maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Bila nilai  $RSL_{IRI}$  kurang dari 0, maka diambil nilai  $RSL = 0$  sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max(RSL_{IRI}, 0)$$

Nilai  $RSL_{final}$  adalah nilai minimum antara  $RSL_{approx}$  atau 50 sesuai dengan persamaan berikut :

$$RSL_{final} = \min(RSL_{approx}, 50)$$

Tabel 2.10 Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP sisa Umur Struktur Perkerasan	Diskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	$RSL > 15$
2	Baik	$10 < RSL \leq 15$
3	Sedang	$5 < RSL \leq 10$
4	Rusak Ringan	$1 < RSL \leq 5$
5	Rusak Berat	$RSL \leq 1$

#### 4) Efektifitas Drainase/*Drainage Effectiveness (Surface Drainage and Subsoil Drainage)*

Terdapat 2 sub komponen penting dalam menentukan nilai IKP Komponen Efektifitas Drainase yaitu:

- Sub Komponen Kondisi Drainase Permukaan
- Sub Komponen Kondisi Drainase Sub Soil

Karena keterbatasan data yang tersedia saat ini, maka digunakan sistem penilaian IKP Efektifitas Drainase yang disederhanakan untuk jangka pendek.

Tabel 2. 11 Skala Penilaian KPI Efektifitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase	Deskripsi	KOMBINASI PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCIRAW	Terrain	Rentang PCIRAW	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		Berbukit/Pegunungan

Tabel 2. 12 Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Sub Soil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak/Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak/Tidak ada data	Datar

Nilai IKP Drainase rata-rata terbobot dari kedua komponen tersebut diatas dengan rasio pembobotan 80% drainase permukaan dan 20% drainase subsoil. Apabila salah satu dari kedua komponen mendapatkan skor 5, maka nilai IKP Efektifitas Drainase Final otomatis adalah 5.

Sistem Penilaian IKP Efektifitas Drainase – Jangka Panjang Apabila data inventaris dan kondisi drainase sudah tersedia dengan lengkap, IKP Efektivitas Drainase dihitung dengan metode yang dijelaskan berikut ini. 1. Efektivitas Sub – Kimponen Drainase Permukaan Untuk menilai IKP Sub –

Komponen Drainase Permukaan digunakan pendekatan menggunakan data per 100 m berikut, antara lain :

- a. Data kondisi permukaan perkerasan (PCI);
- b. Luasan dan tingkat keparahan *rutting*;
- c. Jenis, ketinggian, dan kondisi bahu jalan\*; \* Jika bahu tidak berpenutup maka nilai kondisi +1 (semakin buruk), dan jika bahu lebih tinggi dari permukaan jalan yang dilalui lalu lintas maka nilai kondisi +1 (semakin buruk)
- d. Data medan (terrain)\*\* \*\* Jika medan perbukitan atau pegunungan maka nilai kondisi -1 (semakin baik).

Tabel 2. 13 Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi			Deskripsi
Medan ( <i>Terrain</i> )	Perbukitan/Pegunungan	-1	Semakin Baik
Bahu	Tanpa Penutup	+1	Semakin Buruk
	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1	Semakin Buruk

Faktor pembobot untuk masing – masing sub-komponen efektivitas drainase permukaan (a,b,c) adalah :

Tabel 2. 14 Efektivitas Drainase Permukaan

Sub-Komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi Permukaan Jalan	40%
<i>Rutting</i> (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi Bahu	20%

Efektivitas Sub – Komponen Drainase Subsoil Komponen penilaian drainase subsoil meliputi beberapa aspek berikut :

- a. Infrastruktur drainase : saluran terbuka, pit, struktur Inlet dan Outlet, pipa
- b. Efektivitas berdasarkan kondisi dan performa jaringan drainase ditunjang dengan pemeliharaan.

Data kondisi per 100m berikut dibutuhkan untuk menghitung Nilai Kondisi Drainase Subsoil :

- a. Kondisi struktural dari infrastruktur
- b. Serviceability infrastruktur : siltasi/puing-puing/ penyumbatan dan/atau pengikisan struktur inlet/outlet.

Tabel 2. 15 Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-Komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi Struktural	50%
<i>Serviceability</i>	50%

Perlu dipahami bahwa data yang diambil dan digunakan dalam penilaian indikator ini adalah data segmen per 100m pada setiap lajur, sesuai yang tersedia di database Subdit DPSI. Nantinya masing-masing segmen memiliki 4 nilai KPI individu, dan KPI final sebagai rerata terbobot dari 4 nilai KPI individu tersebut.

Tabel 2. 16 Tabel Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektifitas Drainase	15%

Pembobotan ini didasari oleh kesepakatan yang dilakukan antara seluruh Direktorat Kompetensi Ditjen Bina Marga dengan KIAT, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

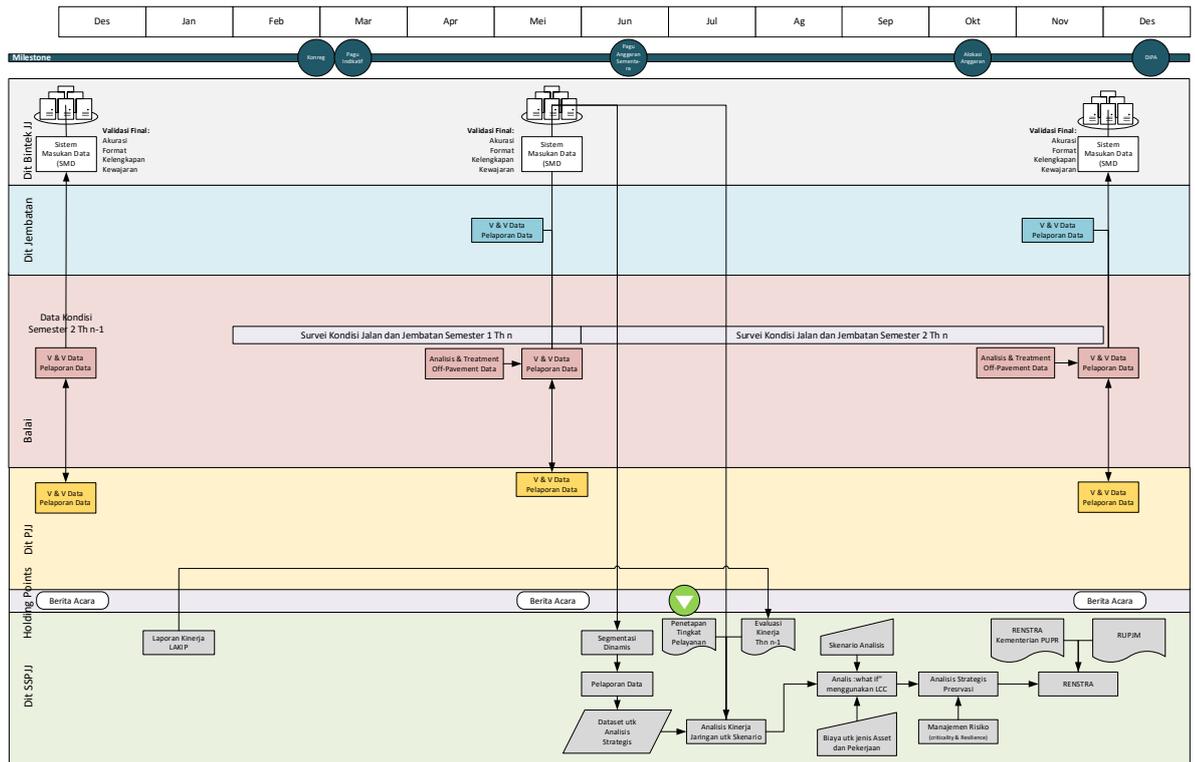
1. Bobot IRI 60% dikarenakan IRI merupakan data yang paling lengkap yang dimiliki oleh Ditjen Bina Marga. Data yang akurat sebab Time-Series Data terinventarisasi secara baik;
2. Bobot PCI 10% dikarenakan pengambilan data yang dilakukan secara manual melihat kondisi visual;
3. Bobot RSL 15% dikarenakan data lendutan yang dimiliki oleh Balai masih belum lengkap;
4. Bobot Efektivitas Drainase 15% dikarenakan data yang dimiliki oleh Balai masih belum lengkap.

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya penanganan/ perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.

*The Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3)* dikembangkan sebagai perangkat analisis strategis dan analisis pemrograman dalam penyelenggaraan jalan, khususnya untuk pekerjaan Preservasi jaringan jalan Nasional, yaitu untuk:

1. Penetapan Sasaran Kinerja Prasarana Jaringan Jalan jangka Panjang;
2. Penetapan bentuk penanganan dan kebutuhan biaya jangka panjang berdasarkan data inventori dan kondisi jalan, pemodelan penurunan kondisi jalan, analisis biaya keseluruhan siklus hidup;
3. Penetapan Sasaran Kinerja Tahunan
4. Penetapan bentuk penanganan dan distribusi anggaran untuk setiap Balai sesuai sasaran kinerja tahunan Balai dengan anggaran yang tersedia.
5. Distribusi anggaran untuk setiap provinsi sesuai sasaran kinerja setiap provinsi dengan anggaran yang tersedia.
6. Pelaporan pencapaian kinerja jaringan jalan setiap tahun

Survey IRI, PCI, RSL dan Efektivitas Drainase dilaksanakan untuk mengetahui kondisi jalan, hasil survey yang dilakukan oleh Balai diinput kedalam Sistem Masukan Data (SMD) Jalan dan selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber data dalam menjawab setiap kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pimpinan.



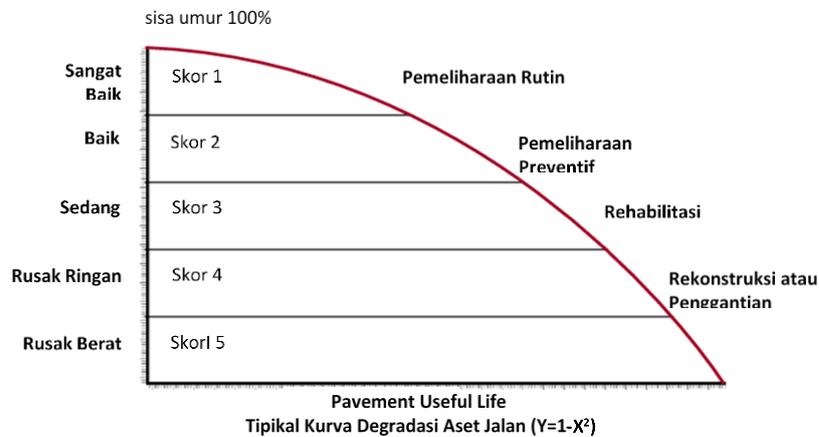
BISNIS PROSES ANALISIS STRATEGIS JARINGAN JALAN

Gambar 2. 4 Bisnis Proses Analisis Strategi Jaringan Jalan

Indikator baru ini dipakai sebagai Indikator Kinerja Program Rating Kondisi Jalan Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai IKP Rating Kondisi Jalan. IKP Rating Kondisi Jalan adalah kompilasi dari kinerja keempat komponen diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- IKP Rating Kondisi Jalan dinyatakan dalam skala penilaian 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau Jalan baru, sedangkan nilai 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat.
- Kinerja keempat komponen tersebut (IRI, PCI, RSL dan efektivitas drainase) juga dinilai dengan rentang skala 1 sampai dengan 5. IKP Rating Kondisi Jalan dihitung rerata terbobot dari ke 4 komponen tersebut.
- Bobot dari setiap komponen ditentukan berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap penentuan rating kondisi Jalan serta mempertimbangkan juga seberapa jauh ketersediaan dan akurasi data untuk komponen tersebut. Tipikal kurva degradasi asset Jalan dan

hubungannya dengan nilai IPK Rating Kondisi Jalan bisa dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2. 5 IPK Rating Kondisi Jalan dan Kurva Penurunan Kondisi Aset Jalan

### **Indikator Sasaran Program 3: TINGKAT KESELAMATAN JALAN**

IKP Tingkat Keselamatan Jalan didefinisikan sebagai nilai komposit terbobot dari 2 komponen individu yakni IKP Komponen Kecelakaan dan IKP Komponen Blackspot. IKP Komponen Kecelakaan diperoleh dari rasio angka kecelakaan terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu (provinsi/Balai/Pulau/Nasional). Sedangkan IKP Komponen Blackspot diperoleh dari rasio jumlah blackspot terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu.

Terdapat 3 parameter yang digunakan untuk menghitung IKP Tingkat Keselamatan Jalan, antara lain:

a. Fatalitas Kecelakaan

Data kecelakaan diperoleh dari pihak Kepolisian yang dihimpun dalam Sistem Pengendalian Data Jalan Nasional (SiPDJN) oleh Subdit ADPS. Informasi-informasi krusial yang diperlukan dari data kecelakaan, antara lain:

- Nama dan kode provinsi

- Tahun pengambilan data
- Fatalitas kecelakaan (fatal, luka berat, luka ringan).

Dalam menghitung KPI Kecelakaan pada tahun berjalan, digunakan data pada tahun sebelumnya karena data dinilai lengkap (akumulasi data yang dikumpulkan selama satu tahun penuh, terhitung sejak bulan Januari hingga Desember). Apabila digunakan data pada tahun berjalan, data yang terkumpul belum lengkap karena bukan merupakan akumulasi data selama satu tahun penuh.

b. Jumlah blackspot

Data jumlah blackspot juga berasal dari data kecelakaan, namun data yang diperlukan adalah data kecelakaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari data tersebut kemudian diidentifikasi jumlah blackspot pada masing-masing provinsi.

Blackspot didefinisikan sebagai segmen jalan sepanjang minimum 500m dengan setidaknya 3 kasus luka berat termasuk 1 kasus fatal dalam 4 tahun terakhir.

c. Total populasi (dalam juta)

Data jumlah populasi pada tiap provinsi diperoleh berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik

Data yang digunakan adalah proyeksi jumlah penduduk tahun tahun berjalan.

Ketiga data tersebut harus tersedia untuk masing-masing provinsi untuk kemudian diolah lebih lanjut untuk memperoleh Nilai KPI Keselamatan Jalan

- Nilai IKP Komponen Kecelakaan

Pembobotan Total Kecelakaan/Populasi	Nilai IKP
0-15	1
16-30	2
31-45	3
46-60	4
> 60	5

Dimana :

$$\text{Indeks Kecelakaan} = \frac{\text{Total Kecelakaan terbobot}}{\text{Populasi (juta)}}$$

- IKP Komponen Blackspot

Blackspot/Populasi	Nilai IKP
0-2	1
2-4	2
4-6	3
6-8	4
>8	5

#### Faktor Pembobot

Meningga 1	Luka Berat	Luka Ringan
75%	20%	5%

Dimana :

$$\text{Indeks Blackspot} = \frac{\text{Total Blackspot}}{\text{Populasi (juta)}}$$

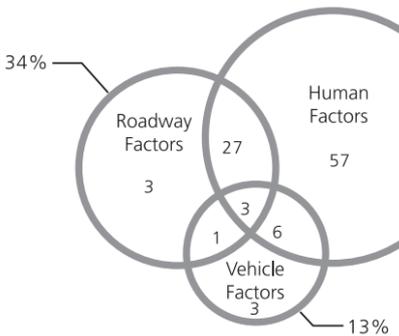
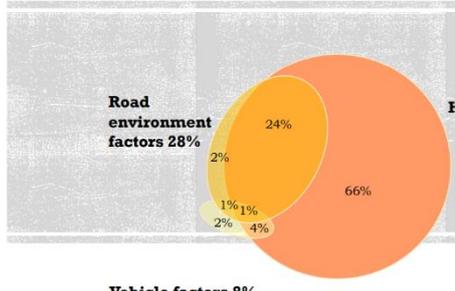
- IKP Tingkat Keselamatan Final

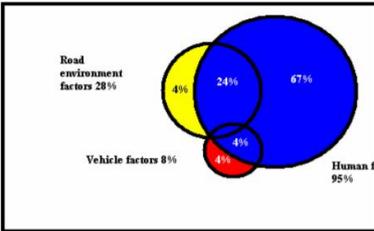
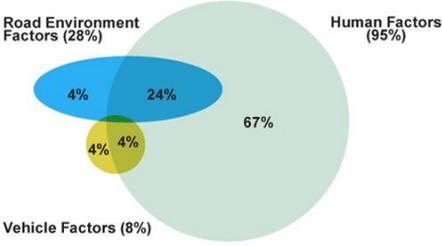
$$\text{IKP}_{\text{Tingkat Keselamatan Final}} = ( 70\% \times \text{IKP}_{\text{Kecelakaan}} ) + ( 30\% \times \text{IKP}_{\text{Blackspot}} )$$

IKP Rating Keselamatan Jalan, disusun oleh KIAT (2019) dan disetujui oleh Direktorat SSPJJ. Detail usulan perhitungan terdapat pada report berikut (terlampir: file RNPP presentation on KPIs 10-Sep Road Safety.pdf)

Bobot 70% komponen kecelakaan dan 30% komponen blackspot disepakati bersama oleh penyusun Renstra. Bobot tersebut dinilai relevan dengan kajian/riset mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dimana mayoritas adalah faktor manusia. Berdasar studi-studi internasional, Faktor Lingkungan Jalan berkontribusi 28% sampai dengan 34% terhadap kejadian kecelakaan. Laporan Korlantas seperti dikutip kominfo.go.id juga menjelaskan bila 30% penyebab kecelakaan jalan adalah faktor jalan.

Oleh karena itu, bobot 30% komponen perbaikan/penanganan Blackspot dianggap relevan dengan presentase kontribusi faktor lingkungan/prasarana jalan.

Presentase Faktor	Sumber
 <p>Source: Treat 1979  <b>Figure 3-3. Contributing Factors to Vehicle Cr</b></p>	<p>Highway Safety Manual (Bonneson, 2010),</p>
<p>The factors involved with crashes</p> 	<p><a href="https://www.carecprogram.org/">https://www.carecprogram.org/</a></p>

 <p><b>Figure 1: The three factors that contribute to road accidents</b></p>	<p>Austroroads (1994),</p>
 <p>Source: NSW Roads and Traffic Authority, 1996.</p>	<p>NSW Roads and Traffic Authority (1996)</p>
<p><b>SETIAP JAM RATA-RATA 3 ORANG M AKIBAT KECELAKAAN JALAN DI IN</b></p> <p><b>Faktor penyebab terbesar kecelakaan</b></p> <p><b>61%</b> karena faktor manusia (terkemampuan serta karakter)</p> <p><b>9%</b> karena faktor kendaraan (tidak pemenuhan persyaratan te)</p> <p><b>30%</b> disebabkan oleh faktor pra lingkungan</p> <p>Sumber : (data: Kepolisian Republik Indonesia)</p> <p>kemenhub151   Email : info151@dephub.go.id   dephub</p>	<p><a href="https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr">https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr</a></p>

**Indikator Sasaran Program : TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**

- **Perhitungan capaian outcome (IKSP)**

$$\text{Capaian IKSP (\%)} = \frac{((\text{capaian (\%)} \text{ RO A} \times \text{Pagu RO A})/100) + (\text{capaian (\%)} \text{ RO B} \times \text{Pagu RO B})/100) + (\text{dst})}{\text{Pagu RO A} + \text{RO B} + \text{dst}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Output**

$$\text{Capaian RO Y (\%)} = \frac{(\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket A} \times \text{Pagu Paket A}) + (\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket B} \times \text{Pagu Paket B}) + \text{dst}}{\text{Pagu Paket A} + \text{Paket B} + \text{dst}} \times 100\%$$

### 2.3.2 Pengukuran Sasaran Kegiatan

Tabel 2. 17 Matriks Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar

Sasaran Kegiatan		Cara Pengukuran	Sumber Data
<b>IKP 1</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan Nasional</b>		
IKK 1	Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
IKK 2	Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat rehabilitasi	e-Monitoring
IKK 3	Panjang Jalan Yang Mendapat Rekonstruksi	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat rekonstruksi	e-Monitoring
IKK 4	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
IKK 5	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Berkala	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Berkala	e-Monitoring
IKK 6	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	e-Monitoring
IKK 7	Panjang Jembatan Yang Mendapat Penggantian	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Penggantian	e-Monitoring
IKK 8	Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pelebaran Jalan Menuju Standar	e-Monitoring
<b>IKP 2</b>	<b>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>		
IKK 1	Panjang Jalan Baru Yang Dibangun	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pembangunan	e-Monitoring
IKK 2	Panjang Jembatan Baru Yang Dibangun	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pembangunan	e-Monitoring

### 2.3.3 Penanggung jawab pengumpulan data

Pada tahun 2024, Paket Survey berada pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tepatnya pada PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan bukan pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional lagi, sehingga yang menjadi penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah Kasi. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## 2.4 Target Kinerja Tahun Ini Menurut Renstra

### 2.4.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

Berdasarkan Matriks Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, banyak perubahan yang terjadi dari Perjanjian Kinerja TA. 2024 karena banyaknya faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam pemograman pada kegiatan TA. 2024

tersebut. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini besarnya ketimpangan antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan Matriks Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2024.

Tabel 2. 18 Sandingan Outcome dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						
1	Rating Kondisi Jalan Nasional		2,20	2,82	2,82	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		100,00	100,00	100,00	

Keterangan Tabel:

- Taget Renstra: Merupakan Nilai yang diambil dari Target Tahun 2024 pada Renstra
- Taget Perjanjian Kinerja: Merupakan Nilai yang diambil dari Target PK Revisi Tahun 2024
- Taget Revisi Akhir: Merupakan Nilai yang diambil dari Volume pada DIPA Revisi terakhir.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan pada Target IKSP Rating Kondisi Jalan Satker BPJN Sumatera Barat dimana terjadi penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri semester 2 TA 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei semester 2 TA 2024.

2.4.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

Tabel 2. 19 Sandingan Output dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	OUTPUT		SAT	TARGER			KET
				RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
<b>1</b>		<b>Non Fisik</b>					
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	0,00	6,00	6,00	
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	0,00	1,00	1,00	
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	1,00	43,00	43,00	

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat perubahan target *output* hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2024.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari *good governance* dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

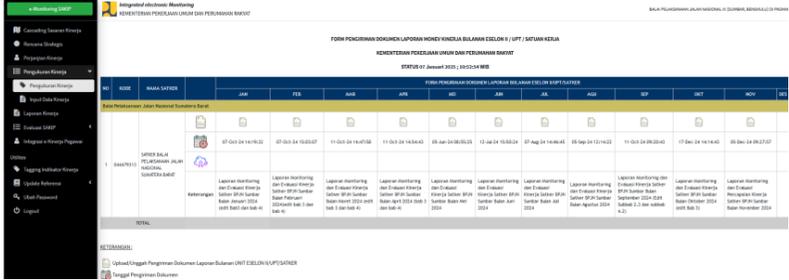
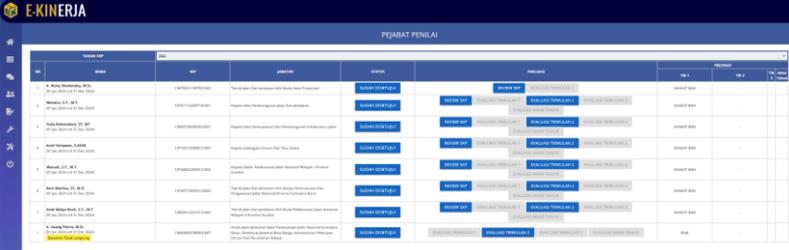
- Rencana strategis
- Perjanjian kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pengelolaan data kinerja
- Pelaporan kinerja
- Reviu dan evaluasi kinerja

### 3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Direktorat SSPJJ atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nomor : PW 0201-BP/274 tanggal 24 April 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat telah melakukan perbaikan terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi. Adapun perbaikan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

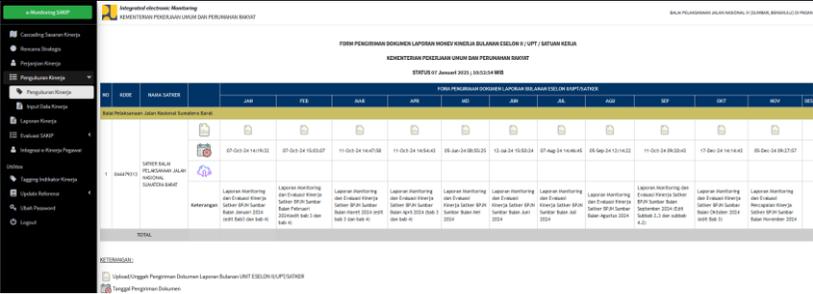
Tabel 3. 1 Langkah tindak lanjut atas hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
1.	Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya	Telah tersusunnya PK revisi sesuai Template aplikasi Sipp	
2.	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;	Satker BPJN Sumbar sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja . Satker Balai dalam hal ini telah menggunakan ESakip, SiPP dan EKinerja.	Satker BPJN dalam pembuatan laporan Monitoring Pencapaian Kinerja Bulanan menggunakan data dari SiPP dan laporan tersebut diunggah dalam E-Sakip. Sampai dengan bulan Desember para pegawai di lingkungan BPJN Sumbar sudah mengupload SKP triwulan III pada E-Kinerja. Daftar aplikasi	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
			<p>untuk menunjang kegiatan di Lingkungan Satker BPJN Sumbar dapat dilihat pada Subbab 1.4.2 Teknologi Informasi.</p>	 
3.	<p>Dilakukan untuk dapat didokumentasikan kegiatan berlangsung; dapat disaat</p>	<p>Untuk Kedepannya Satker BPJN Sumbar akan berusaha untuk dapat mendokumentasikan disaat kegiatan berlangsung;</p>	<p>Beberapa kegiatan rapat terkait Verifikasi Lanjutan Kegiatan Melalui Instruksi Presiden Tahap 2 TA 2024, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Penyelenggaraan Jalan Prov. Sumatera Barat ,</p>	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
			<p>Kegiatan Rapat Penajaman TA 2025, dan Kegiatan Program Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2025 Infrastruktur PUPR Gel I</p>	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi																																																																
4.	Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya	Telah tersusunnya PK revisi sesuai Template aplikasi Sipp	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SASARAN PROGRAM</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>BASELINE 2023</th> <th>TARGET 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</td> <td>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td>2,78</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rincian Output:</td> </tr> <tr> <td>CBR 001</td> <td>Layanan Penyediaan dan Pengendalian Pelaksanaan</td> <td>2,00 Dokumen</td> <td>6,00 Dokumen</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</td> <td>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rincian Output:</td> </tr> <tr> <td>EBA 962</td> <td>Layanan Umum</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td>EBA 994</td> <td>Layanan Perbaikan</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td>EBB 951</td> <td>Layanan Sarana Internal</td> <td>1,00 Unit</td> <td>43,00 Unit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan</td> <td colspan="2">Anggaran</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td colspan="2">Rp. 20.092.597.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga</td> <td colspan="2">Rp. 19.529.916.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 39.601.773.000</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80	Rincian Output:				CBR 001	Layanan Penyediaan dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga	100,00 %	100,00 %	Rincian Output:				EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan	EBA 994	Layanan Perbaikan	1,00 Layanan	1,00 Layanan	EBB 951	Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	43,00 Unit	Kegiatan		Anggaran		1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.597.000		2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga		Rp. 19.529.916.000		Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024																																																																	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional																																																																			
	IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80																																																																	
Rincian Output:																																																																				
CBR 001	Layanan Penyediaan dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen																																																																	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR																																																																			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga	100,00 %	100,00 %																																																																	
Rincian Output:																																																																				
EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
EBA 994	Layanan Perbaikan	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	43,00 Unit																																																																	
Kegiatan		Anggaran																																																																		
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.597.000																																																																		
2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga		Rp. 19.529.916.000																																																																		
Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000																																																																		
5.	Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional	Satker BPJN Sumbar akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya	Telah tersusunnya Laporan Kinerja Satker BPJN Sumbar sesuai dengan format terbaru (Keputusan Dirjen Bina Marga No 14.1/KPTS/Db/2024)																																																																	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
6.	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	Satker BPJN Sumbar sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini Satker Balai menggunakan ESakip	Sampai dengan bulan Desember Satker BPJN Sumbar sudah mengupload Dokumen PK Awal, Dokumen Rencana Aksi dan Laporang Monitoring Pencapaian Kinerja dan Evaluasi dari bulan Januari 2024 Hingga Desember 2024. Daftar aplikasi untuk menunjang kegiatan di Lingkungan Satker BPJN Sumbar dapat dilihat pada Subbab 1.4.2 Teknologi Informasi.	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
7.	Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya	Telah tersusunnya Laporan Kinerja Satker BPJN Sumbar sesuai dengan format terbaru (Keputusan Dirjen Bina Marga No 14.1/KPTS/Db/2024)	

## 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

### 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasarn Program TA 2024

Untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 ini, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat membuat Laporan Rencana Aksi dan Monitoring dan Evaluasi Bulanan. Laporan ini dibuat yang berisi target, realisasi dan permasalahan selama pelaksanaan di lapangan. Dengan dibuatnya laporan tersebut diatas, maka segala kegiatan yang ada pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bisa di pantau dengan lebih baik. Secara keseluruhan realisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini :

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Sasaran Program TA 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						
1	Rating Kondisi Jalan Nasional		2,82	2,82	100,00	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	

#### 1. Indikator Rating Kondisi Jalan Nasional

Realisasi Rating Kondisi Jalan Nasional (KPI) pada TA 2024 yaitu 2,82 dari target awal sebesar 2,82 dengan capaian 100,00% terhadap target.

### 3.2.2 Capaian Rating Kondisi Jalan TA 2024

Tabel 3. 3 Rincian Rating Kondisi Jalan Nasional

No	Balai / Satker / PPK	KPI IRI	KPI PCI	KPI RSL	KPI DRN	TA 2024
		60%	10%	15%	15%	KPI FINAL
	BPJN SUMATERA BARAT	2,92	2,38	3,22	2,32	2,82
	PROVINSI SUMATERA BARAT	2,92	2,38	3,22	2,32	2,82
	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I	2,82	2,49	3,18	2,42	2,78
1	PPK 1.1 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,86	2,50	3,28	2,48	2,83
2	PPK 1.2 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,16	2,45	3,49	2,42	3,03
3	PPK 1.3 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,74	2,44	2,80	2,17	2,63
4	PPK 1.4 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,53	2,25	3,12	2,25	2,55
5	PPK 1.5 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,18	2,07	2,66	2,07	2,22
6	PPK 1.6 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,76	3,58	4,06	3,52	3,75
	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II	3,03	2,29	3,27	2,24	2,87
1	PPK 2.1 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,16	2,24	3,21	2,10	2,92
2	PPK 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,26	2,35	3,39	2,33	3,05
3	PPK 2.3 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,03	2,40	3,42	2,38	2,93
4	PPK 2.4 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,44	1,91	2,76	1,91	2,35
5	PPK 2.5 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,24	2,55	3,56	2,46	3,10
	DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMAT	2,70	2,03	2,91	2,02	2,56
1	PPK SKPD-TP PROVINSI SUMATERA BARAT	2,70	2,03	2,91	2,02	2,56

### 3.2.3 Capaian Kemantapan Jalan Nasional TA 2024

Capaian kondisi kemantapan jalan nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat setelah dilaksanakan kegiatan – kegiatan di tahun 2024 ini adalah sebesar 91,71%.

Tabel 3. 4 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional TA 2024

NO	BALAI / SATKER / PPK	PANJANG RUAS (Km)	CAPAIAN AKHIR TA. 2023 (SEMESTER 2 TAHUN 2023)										CAPAIAN AKHIR TA. 2024 (SEMESTER 2 TAHUN 2024)									
			NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP			NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP		
			IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%	IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%		
	BPJN SUMATERA BARAT	1423,40	2,94	2,30	2,78	526,22	797,16	85,54	14,46	1323,38	92,97%	2,92	2,38	2,82	581,67	723,78	94,84	23,12	1305,44	91,71%		
	PROVINSI SUMATERA BARAT	1423,40	2,94	2,30	2,78	526,22	797,16	85,54	14,46	1323,38	92,97%	2,92	2,38	2,82	581,67	723,78	94,84	23,12	1305,44	91,71%		
	SATKER PJJN WILAYAH I	674,57	2,83	2,24	2,68	287,33	342,67	32,71	11,85	630,00	93,39%	2,82	2,49	2,78	312,71	310,68	32,22	20,51	623,39	92,20%		
	PPK 1.1	117,11	2,85	2,21	2,71	36,50	78,6	1,9	0,11	115,10	98,28%	2,86	2,50	2,83	40,59	75,07	2,80	0,21	115,65	97,47%		
	PPK 1.2	105,06	3,013066	2,14	2,75	31,24	70,1	3,62	0,1	101,34	96,46%	3,1619116	2,45	3,03	24,94	72,76	7,36	0,00	97,70	92,99%		
	PPK 1.3	140,72	2,80	2,14	2,60	55,91	81,65	3,16	0	137,56	97,75%	2,74	2,44	2,63	63,40	72,26	5,06	0,00	135,66	96,40%		
	PPK 1.4	133,98	2,57	2,19	2,52	69,50	64,18	0,3	0	133,68	99,78%	2,53	2,25	2,55	77,82	54,26	1,80	0,10	132,08	98,58%		
	PPK 1.5	100,03	2,38	1,62	2,21	70,99	28,14	0,9	0	99,13	99,10%	2,18	2,07	2,22	82,79	17,24	0,00	0,00	100,03	100,00%		
	PPK 1.6	77,67	3,65	3,51	3,5845662	23,19	20	22,83	11,64	43,19	55,61%	3,76	3,58	3,7496405	23,17	19,10	15,20	20,20	42,27	54,42%		
	SATKER PJJN WILAYAH II	714,02	3,0548764	2,36	2,89	223,66	435,61	52,13	2,61	659,27	92,33%	3,0296285	2,29	2,87	252,59	395,56	61,71	2,61	648,14	90,97%		
	PPK 2.1	116,02	3,1713182	2,423863	2,95	23,7	86,86	5,46	0	23,70	20,43%	3,1599821	2,2365063	2,92	26,05	80,66	7,76	0,00	106,71	93,22%		
	PPK 2.2	165,97	3,26	2,56	3,10	32,35	117,49	15,72	0,4	32,35	19,49%	3,26	2,35	3,05	38,68	109,87	17,22	0,20	148,55	89,51%		
	PPK 2.3	124,31	2,94	2,37	2,85	46,41	68,4	9,4	0,1	46,41	37,33%	3,03	2,40	2,93	43,27	68,44	12,50	0,10	111,71	89,87%		
	PPK 2.4	146,88	2,50	1,62	2,32	88,10	57,38	1,4	0	88,10	59,98%	2,44	1,91	2,35	96,76	47,82	2,30	0,00	144,58	98,43%		
	PPK 2.5	160,84	3,35	2,79	3,20	33,1	105,48	20,15	2,11	33,10	20,58%	3,24	2,55	3,10	47,82	88,77	21,94	2,31	136,59	84,92%		
	SATKER SKPD	34,81	2,70	2,09	2,55	15,23	18,88	0,70	0,00	34,11	97,99%	2,70	2,03	2,56	16,38	17,53	0,90	0,00	33,91	97,41%		
	PPK SKPD	34,81	2,70	2,09	2,55	15,23	18,88	0,70	0,00	34,11	97,99%	2,70	2,03	2,56	16,38	17,53	0,90	0,00	33,91	97,41%		

### 3.2.4 Perbandingan Target (PK revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024

Tabel 3. 5 Perbandingan Target (PK revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>								
<b>IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>								
1	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan		6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>								
<b>IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>								
2	EBA 962 Layanan Umum		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
3	EBA 994 Layanan Perkantoran		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
4	EBB 951 Layanan Sarana Internal		43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	

#### 3.2.4.1 Analisa dan Manfaat

Di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat mengalami keberhasilan maupun hambatan pada berbagai output yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Analisa manfaat, kendala yang dihadapi, solusi serta penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja output yang telah diperjanjikan tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Output CBR-001 Layanan penyiapan dan pengendalian pelaksanaan

Tabel 3. 6 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output CBR 001

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)	
				AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KEUANGAN	FISIK
1	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	99,62	100,00

**Manfaat :**

Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan adalah agar dapat memantau kondisi/keadaan dari infrastruktur jalan dan jembatan tetap dalam kondisi yang baik.

**Kendala :**

-

**Alternatif Solusi :**

-

**Analisis :**

Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan terdiri dari beberapa komponen seperti Bantuan Teknis, Bahan Jalan dan Jembatan, Pengumpulan Pengolahan Updating dan Analisa Data, Monitoring dan evaluasi, dan Manajemen Pengendalian,. Output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan ditagertkan 6 dokumen. Ouput ini terealisasi sebesar 100 % terhadap revisinya, dengan progres keuangan sebesar 99,62%

**Dokumentasi :**



Gambar 3. 1 Survey FIT Jalan PPK 2.4 Prov. Sumbar



Gambar 3. 2 Survey Tindak Lanjut Usulan Gubernur Sumatera Barat Terhadap Penyelesaian Jalan Teluk Tapang



Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Konsultan Pengendali Mutu Independent (PMI) Konstruksi Jalan Tol Ruas Pekanbaru- Padang Seksi Sicincin -Padang



Gambar 3. 4 Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Penyelenggaraan Jalan Prov. Sumatera Barat



*Gambar 3. 5 Verifikasi Lanjutan Kegiatan Melalui Instruksi Presiden Tahap 2 TA 2024*



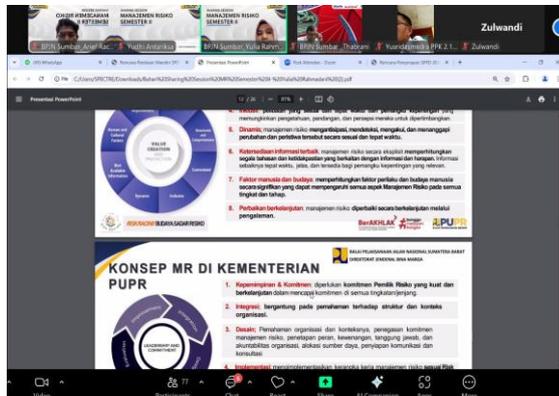
*Gambar 3. 6 Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Penanganan Bencana Alam Yang Terjadi*



*Gambar 3. 7 Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Paket-Paket Pekerjaan Preservasi TA. 2024 Di Lingkungan BPJN Sumatera Barat*



Gambar 3. 8 Rapat Kerja BPJN Sumatera Barat. Evaluasi Kegiatan T.A. 2024 dan Persiapan Kegiatan T.A. 2025



Gambar 3. 9 Sharing Session Manajemen Risiko Semester II



Gambar 3. 10 Rapat Pembahasan Perubahan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Proyek KPB-AP Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I)



Gambar 3. 11 Kalibrasi Alat Laboratorium 2024



Gambar 3. 12 Sertifikasi Asphlat Mixing Plant (AMP) PT. Multion Jagad Perkasa di Jl. Raya Padang - Bukittinggi KM. 54 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

➤ Output EBA 962- Layanan Umum

Tabel 3. 7 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output EBA-962

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)	
				AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KEUANGAN	FISIK
1	EBA 962	Layanan Umum	layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	98,96	100,00

**Manfaat :**

Manfaat dari output Layanan Umum adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan perbendaharaan dan penyusunan lap. Keuangan dan BMN.

**Kendala :**

-

**Alternatif Solusi :**

-

**Analisis :**

Output Layanan Umum ditagertkan 1 layanan. Ouput ini terealisasi sebesar 100 % terhadap revisinya, dengan progres keuangan sebesar 98,96%

**Dokumentasi :**



*Gambar 3. 13 Sosialisasi SMAP di Lingkungan BPJN Sumbar*



*Gambar 3. 14 Audit Internal di Lingkungan BPJN Sumatera Barat*



Gambar 3. 15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Satker di Lingkungan Dijen Bina Marga



Gambar 3. 16 Workshop Peningkatan Kompetensi

➤ Output EBA 994-Layanan Perkantoran

Tabel 3. 8 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Output EBA-994

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)	
				AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KEUANGAN	FISIK
1	EBA 994	Layanan Perkantoran	layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	99,00	100,00

**Manfaat :**

Output layanan perkantoran ini juga mendukung pelaksanaan kegiatan teknis berupa gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor

**Kendala :**

-

**Alternatif Solusi :**

-

### Analisis :

Layanan Perkantoran terdiri dari beberapa komponen yakni Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Kantor. Untuk Output Layanan Perkantoran ditargetkan 1 layanan. Output ini terealisasi sebesar 100,00 % terhadap revisinya, dengan progress keuangan 99,00%.

### Dokumentasi :



Gambar 3. 17 Penanaman Pohon Di Lingkungan BPJN Sumbar



Gambar 3. 18 PU Peduli dalam Rangka Harbak PU



Gambar 3. 19 Upacara Harbak PU



Gambar 3. 20 Seminar Nasional Hari Jalan

➤ Output EBB 951-Layanan Sarana Internal

Tabel 3. 9 Perbandingan Volume, Anggaran dan Persentase Ouput EBB-951

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)	
				AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KEUANGAN	FISIK
1	EBB 951	Layanan Sarana Internal	unit	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	96,98	100,00

**Manfaat :**

Manfaat dari Layanan Sarana Internal adalah dalam rangka penyediaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis

**Kendala :**

-

**Alternatif Solusi :**

-

**Analisis:**

Output Layanan Sarana Internal terdiri dari beberapa komponen yakni Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran. Output ini terealisasi sebesar 100% terhadap revisinya , dengan progres keuangan sebesar 96,98%

**Dokumkentasi :**



Gambar 3. 21 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada PPK KPIJ



Gambar 3. 22 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran PPK KPIJ



Gambar 3. 23 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran PPK KPBU Flyover Sitingau Laut



### 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA 2020 s/d 2024

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2024

NO	OUTPUT		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)												
1		Non Fisik		6,00	6,00	100,00	10,00	10,00	100,00	4,00	4,00	100,00	5,00	5,00	100,00	51,00	51,00	100,00
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok	3,00	3,00	100,00	7,00	7,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	6,00	6,00	100,00
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan							1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	EBB 971	Layanan Sarana Internal	Layanan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	43,00	43,00	100,00
	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00									
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yakni pada Layanan Dukungan Manajemen Satker.
- beberapa target *output* yang telah diperjanjikan dalam 5 Tahun kebelakang seluruhnya telah tercapai dengan kinerja 100%.

### 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2020 s/d 2024 dengan Target Jangka Menengah (Kumulatif 2020-2024)

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2024 per output dengan Renstra

NO	OUTPUT		SAT	Target RENSTRA 2020-2024	Realisasi				2024			Capaian Kumulatif
					2020	2021	2022	2023	Target Renstra	Target PK	Realisasi	
12		<b>Non Fisik</b>										
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	-	3	7	1	2	-	6	6	19
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	1	1	-	1	1	3
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	43	43	47
	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	-		1	-	-	3



### 3.4 Analisis Realisasi Anggaran

#### 3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ditinjau dari aspek keuangan, dimana keseluruhan dana APBN Tahun Anggaran 2024 yang dikelola dibawah kewenangan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, dimana Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat melakukan revisi DIPA sesuai kebutuhan masing – masing PPK.

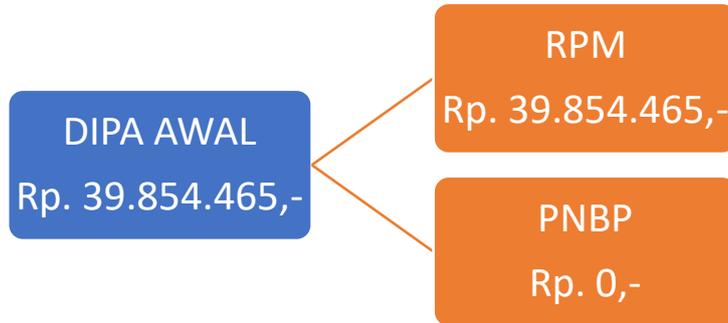
##### 3.4.1.1 Kronologis Perubahan DIPA TA 2024

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Revisi DIPA Satker BPJN Sumbar TA. 2024

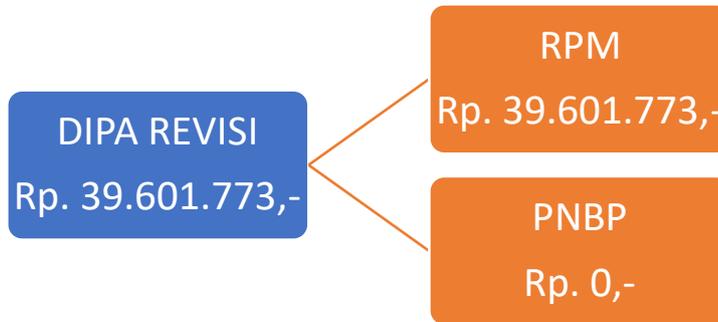
NO	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp.1000)		ALASAN PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
I	SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT					
1	DIPA AWAL	033.04.1.447931/2024	24 November 2023	39.854.465	39.854.465	Dipa Awal
2	DIPA REVISI I	033.04.1.447931/2024	13 Februari 2024	39.854.465	39.854.465	Kebutuhan Administrasi
3	DIPA REVISI II	033.04.1.447931/2024	15 Mei 2024	39.854.465	39.854.465	Kebutuhan Administrasi
4	DIPA REVISI III	033.04.1.447931/2024	19 Juli 2024	39.854.465	39.854.465	Kebutuhan Administrasi
5	DIPA REVISI IV	033.04.1.447931/2024	10 September 2024	39.854.465	39.854.465	Kebutuhan Administrasi
6	DIPA REVISI V	033.04.1.447931/2024	15 Oktober 2024	39.854.465	39.949.677	Pemenuhan Belanja Ops Untuk Ppk Kpbu
7	DIPA REVISI VI	033.04.1.447931/2024	11 November 2024	39.949.677	39.601.773	Pemotongan Belanja Pegawai
8	DIPA REVISI VII	033.04.1.447931/2024	13 November 2024	39.601.773	39.601.773	Self Blocking Perjalanan Dinas
9	DIPA REVISI VIII	033.04.1.447931/2024	23 Desember 2024	39.601.773	39.601.773	Kebutuhan Administrasi

### 3.4.1.2 Komposisi Pendanaan (RPM dan PNBP)

#### 1. Komposisi Pendanaan Pada Dipa Awal (Rp. Dalam Ribuan)



#### 2. Komposisi Pendanaan Pada DIPA Revisi (Rp. Dalam Ribuan)



### 3.4.1.3 Anggaran Satker BPJN Sumatera Barat Berdasarkan Sumber Pendanaan 2020-2024

Tabel 3. 15 Anggaran Satker BPJN Sumatera Barat Berdasarkan Sumber Pendanaan 2020-2024

Tahun	DIPA (Rp. 1000,-)			
	RPM	PNBP	PHLN	Total
2020	99.549.402,-	-	12.123.456,-	111.970.994,-
2021	61.494.106,-	-	-	61.494.106,-
2022	54.788.880,-	-	-	54.788.880,-
2023	39.078.363,-	-	-	39.078.363
2024	39.601.773,-	-	-	39.601.773,-

### 3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keuangan	Fisik	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
80	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	20.092.597	20.015.430	99,62	100,00	100,38
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Indikator Kinerja Kegiatan						
89	EBA 962 Layanan Umum	2.345.663	2.321.234	98,96	100,00	101,05
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	16.768.463	16.601.229	99,00	100,00	101,01
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	395.050	383.112	96,98	100,00	103,11
<b>TOTAL</b>		<b>39.601.773</b>	<b>39.321.005</b>	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,72</b>

Tabel diatas menggambarkan realisasi keuangan masing – masing output pada tahun 2024 pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Bisa dilihat jika total anggaran awal pada tahun 2024 sebesar Rp. 39.854.465.000.- dan anggaran revisi Satker BPJN Sumbar sebesar Rp 39.601.773.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 39.321.005.000,- dengan progres fisik 100,00% dan progres keuangan sebesar **99,29 %**. Berdasarkan hal tersebut di atas pencapaian penyerapan anggaran Satker BPJN Sumbar mengalami **kenaikan** dibandingkan Tahun 2023 sebesar **98,38%**.

### 3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
			Rp. ribu	%		Rp. ribu	%
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>							
<b>IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>							
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>							
<b>CBR 001</b>	<b>Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>18.529.736</b>	<b>18.474.851</b>	<b>99,70</b>	<b>20.092.597</b>	<b>20.015.430</b>	<b>99,62</b>
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>							
<b>IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>							
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>							
<b>EBA 962</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>2.240.246</b>	<b>2.214.396</b>	<b>98,85</b>	<b>2.345.663</b>	<b>2.321.234</b>	<b>98,96</b>
<b>EBA 994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>17.977.881</b>	<b>17.459.046</b>	<b>97,11</b>	<b>16.768.463</b>	<b>16.601.229</b>	<b>99,00</b>
<b>EBB 951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>330.500</b>	<b>298.622</b>	<b>90,35</b>	<b>395.050</b>	<b>383.112</b>	<b>96,98</b>
<b>Total</b>		<b>39.078.363</b>	<b>38.446.916</b>	<b>98,38</b>	<b>39.601.773</b>	<b>39.321.005</b>	<b>99,29</b>

#### 3.4.4 Isu-isu terkait Program dan Anggaran TA 2024

Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yang DIPA awalnya Rp. 39.854.465.000,- pada DIPA Revisi Akhir menjadi Rp. 39.601.773.000,- ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a) Pada Revisi DIPA VII terjadi pemotongan belanja pegawai
- b) Pada revisi DIPA VIII adanya Self Blocking perjalanan dinas
  - Melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
  - Berdasarkan hal tersebut diatas, Satuan Kerja diminta untuk:
    - Meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing satuan kerja Kementerian/Lembaga.
    - Satuan Kerja melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.
    - Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
    - Berkoordinasi dengan unit eselon I Kementerian/Lembaga dalam melakukan revisi pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri.
  - Satuan Kerja tidak dapat mengajukan SPM LS/GUP/PTUP termasuk pengajuan persetujuan TUP yang terdapat unsur belanja perjalanan dinas sebelum melakukan revisi penghematan belanja perjalanan dinas.

- KPPN dapat menerima pengajuan permintaan pembayaran belanja perjalanan dinas setelah Satuan Kerja melakukan revisi penghematan belanja perjalanan dinas yang dibuktikan dengan:
  - Surat Pengesahan revisi penghematan belanja perjalanan dinas oleh Satuan Kerja; atau
  - Surat Pengesahan revisi penghematan belanja perjalanan dinas Eselon I Kementerian/Lembaga dalam hal revisi penghematan dilakukan secara terpusat.

### 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah praktik untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan dampak lingkungan. Efisiensi sumber daya merupakan komponen penting dari komitmen terhadap keberlanjutan.

#### 3.5.1 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2023 jumlah pegawai di lingkungan BPJN Sumbar sebanyak 379 orang (PNS sebanyak 130 orang dan Non PNS sebanyak 234 orang dan PPPK sebanyak 15 orang) dan pada Tahun 2024 terjadi pengurangan Pegawai karena pensiun dan penambahan pegawai PPPK sehingga jumlah pegawai di lingkungan BPJN Sumbar menjadi 375 orang yang terdiri dari 129 orang PNS dan 219 orang Non PNS dan 27 orang PPPK) untuk membantu tercapainya tupoksi pada Satker-satker dibawah BPJN Sumatera Barat . Jumlah ini mengalami **penurunan** dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 18 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Realisasi Anggaran (Rp)	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	385	100.017.490	100
2021	385	59.327.149	100
2022	382	54.490.403	100
2023	379	39.078.363	100
2024	375	39.321.005	100

### 3.5.2 Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal : Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas, berikut efisiensi yang dilakukan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali sebesar **Rp. 39.601.773.000,-** Adapun tingkat efisiensi sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.19

Tabel 3. 19 Efisiensi Anggaran

No	Program	Pagu (Rp.	Realisasi (Rp.	Progres		Nilai
		dlm ribu)	dlm ribu)	Keu	Fisik	Efisiensi
1	Rating Kondisi Jalan Nasional	20.092.597,-	20.015.430,-	99,62	100,0	100,38
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	19.509.176,-	19.305.575,-	98,96	100,0	101,05
	<b>Total</b>	<b>39.601.773</b>	<b>39.321.005</b>	<b>99,29</b>	<b>100,0</b>	<b>100,71</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui efisiensi dari Rating Kondisi Jalan Nasional mencapai 100,38 % sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen mencapai 101,05%, dan secara keseluruhan efisiensi yang dicapai sebesar 100,71% pada Tahun 2024.

### 3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu :

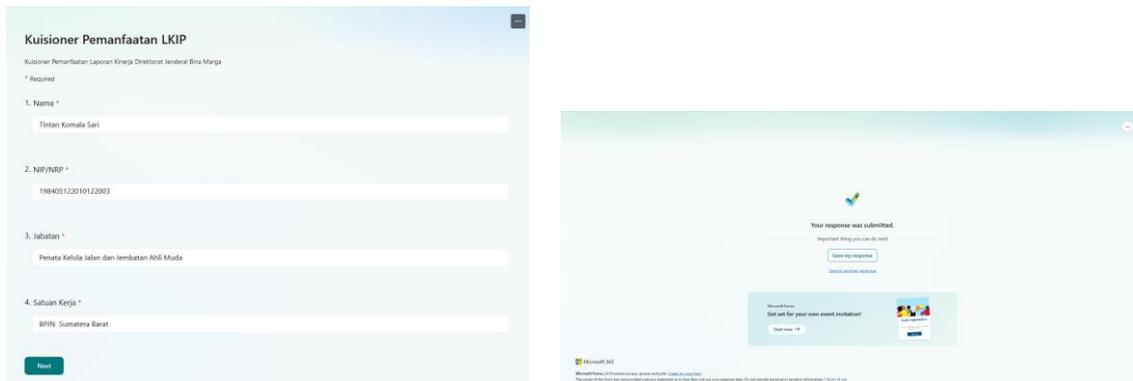
1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan
2. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai

3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disampaikan kepada pejabat dan pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat disesuaikan dengan komponen-komponen yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.

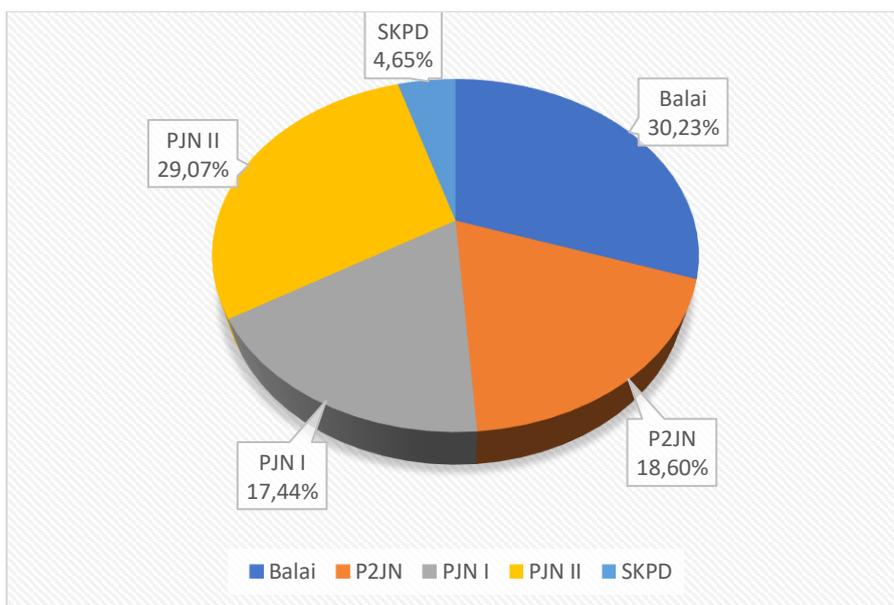
Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, pada akhir Desember 2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Responden diminta untuk memilih jawaban atas pernyataan pernyataan yang diberikan dan disesuaikan dengan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi masing-masing. Guna mempermudah responden pejabat dan pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dalam menjawab pertanyaan, formulir kuesioner yang disiapkan dalam bentuk *Google Forms*.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sntpesuFBUC2svC9poe-UnZzgF3v0FhBt7nOR6Oi30tUMjdDQ0kxSEpRQVIWTzZQR1QyNUpHOEE3Uy4u>).



Gambar 3. 24 Pengisian kuesioner Pemanfaatan LAKIN di BPJN Sumatera Barat

Selain menggunakan informasi dari hasil kuesioner tersebut, analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti bukti dukung lain yang sesuai. Dengan demikian penggambaran pemanfaatan laporankinerja dapat lebih lengkap dan objektif. Adapun hasil penyebaran kuesioner dan bukti-bukti dukungnya adalah sebagai berikut:

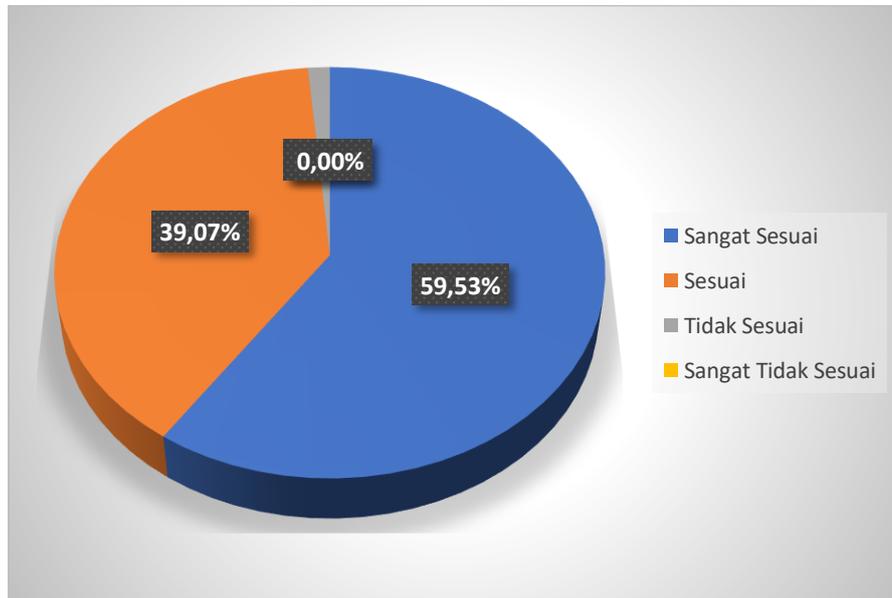


Gambar 3. 25 Data Responden

### 3.6.1 Informasi Dalam Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 59,53 % mengatakan “sangat sesuai” dan 39,07 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja memang telah

menjadi perhatian utama pimpinan. Hanya 0,00 % responden yang mengatakan “tidak sesuai’.



Gambar 3. 26 hasil kuesioner Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan

Salah satu kegiatan di Satker BPJN Sumatera Barat yang mendukung poin informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan adalah adanya Rapat Pimpinan (Rapim), baik di level Board of Director (BOD) dalam BPJN Sumatera Barat maupun di level eselon 1 Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara rutin. Informasi-informasi yang dibahas oleh para pimpinan dalam forum ini mencakup isu-isu strategis yang dialami oleh unit organisasi/unit kerja, capaian kinerja, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan rekomendasi







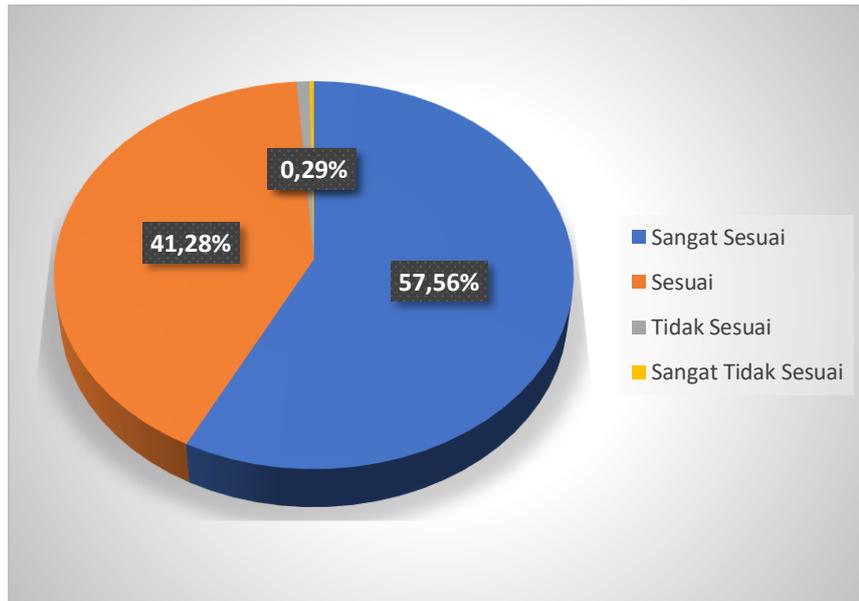
anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan yang telah disampaikan dalam acara Rapat Kinerja yang mengundang seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan perwakilan pelaksana di lingkungan BPJN Sumatera Barat . Sehingga, informasi-informasi yang disampaikan dalam acara ini telah menjadi kepedulian dari seluruh pegawai.



*Gambar 3. 30 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai: Rapat Kerja BPJN Sumatera Barat. Evaluasi Kegiatan T.A. 2024 dan Persiapan Kegiatan T.A. 2025*

### 3.6.3 Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 57,56 % mengatakan “sangat sesuai” dan 41,28 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja memang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,29 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 31 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja yang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Muatan terakhir yang harus ada adalah adanya laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya. Salah satu bukti yang mendukung poin informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja adalah melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK), menindaklanjuti hasil evaluasi catatan evaluasi SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB, dimana Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Salah satu tindak lanjut yang dilakukan BPJN Sumatera Barat menanggapi evaluasi tersebut berupa Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja seperti yang terlihat pada subbab 1.4.2. menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.

Tabel 3. 20 *Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan*

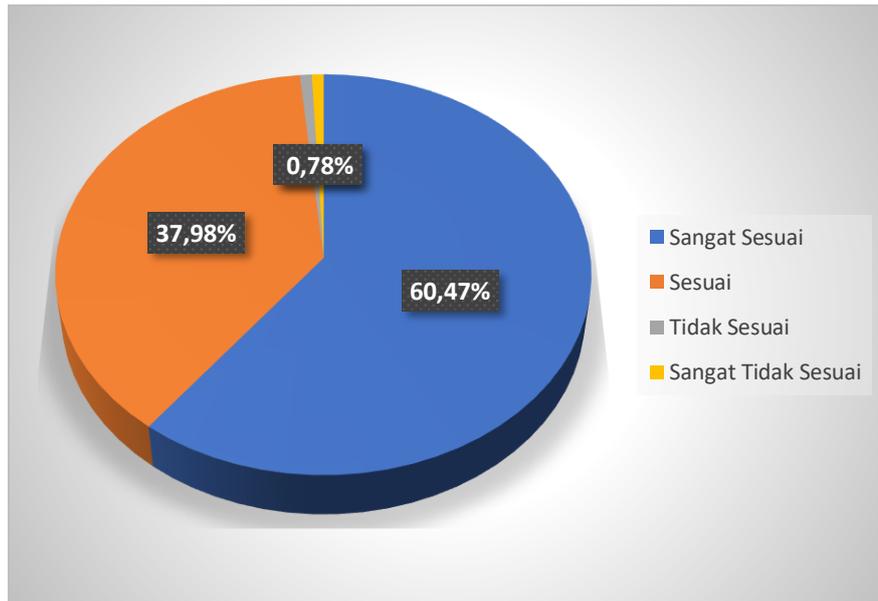
*dalam Penyesuaian Aktivitas untuk Mencapai Kinerja: Catatan Evaluasi SAKIP BPJN Sumatera Barat 2023*

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
A	Perencanaan Kinerja		
	1. Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional;	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional;	1. Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya
B	Pengukuran Kinerja		
	1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi); 2. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional; 3. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja; 2. Dilakukan untuk dapat didokumentasikan disaat kegiatan berlangsung;; 3. Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. Satker BPJN Sumbar sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja . Satker Bali dalam hal ini telah menggunakan E-Sakip, SiPP dan E-Kinerja. 2. Untuk Kedepannya Satker BPJN Sumbar akan berusaha untuk dapat mendokumentasikan disaat kegiatan berlangsung; 3. Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya
C	Pelaporan Kinerja		
	1. Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. Satker BPJN Sumbar akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).</li> <li>2. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;</li> <li>2. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker BPJN Sumbar sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini Satker Balai menggunakan E-Sakip</li> <li>2. Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya</li> </ol>

#### 3.6.4 Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 60,47% mengatakan “sangat sesuai” dan 37,98 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,78% responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 32 Hasil Kuisisioner Laporan Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala yang telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Bukti yang dapat mendukung poin informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja antara lain adalah adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan /Priodik yang disusun setiap bulannya dan diupload ke e-SAKIP, dimana poin-poin yang terdapat dalam laporan kinerja berkala seperti informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan terkait penyesuaian anggaran di BPJN Sumatera Barat. .

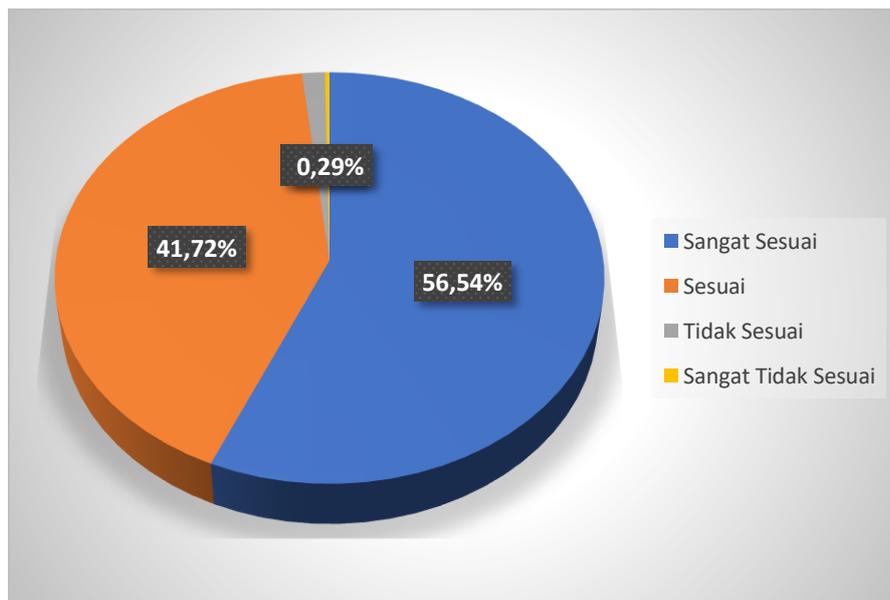
**FORM PENGIRIMAN DOKUMEN LAPORAN MONEV KINERJA BULANAN ESELON II / UPT / SATUAN KERJA**  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
STATUS 16 Januari 2025 ; 21:31:32 WIB

NO	KODE	NAMA SATKER	FORM PENGIRIMAN DOKUMEN LAPORAN BULANAN ESELON II/UPT/SATKER												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat															
1	044479313	SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT													
			07-Oct-24 14:19:32	07-Oct-24 15:03:07	11-Oct-24 14:47:58	11-Oct-24 14:54:43	05-Jun-24 08:55:25	12-Jul-24 15:50:24	07-Aug-24 14:46:45	05-Sep-24 12:14:22	11-Oct-24 09:20:43	17-Dec-24 14:14:43	05-Dec-24 09:17:57	14-Jan-25 12:24:26	
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Januari 2024 (edit Bab3 dan bab 4)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Februari 2024(edit bab 3 dan bab 4)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Maret 2024 (edit bab 3 dan bab 4)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan April 2024 (bab 3 dan bab 4)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Mei 2024	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Juni 2024	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Juli 2024	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Agustus 2024	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan September 2024 (Edit Subbab 2.3 dan subbab 4.2)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan Oktober 2024 (edit Bab 3)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker BPJN Sumbang Bulan November 2024	Laporan monev pencapaian kinerja bulan desember 2024 Satker BPJN Sumbang	
TOTAL															

Gambar 3. 33 Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan Satker BPJN Sumatera Barat TA 2024 pada E-SAKIP

### 3.6.5 Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 56,54% mengatakan “sangat sesuai” dan 41,72% mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,29 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 34 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Laporan kinerja periode sebelumnya dalam laporan kinerja juga harus digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dapat dilihat melalui adanya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPJN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 yang melampirkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2023 pada Satker BPJN Sumatera Barat dan telah ditandatangani oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Selanjutnya, hasil evaluasi ini juga telah ditindaklanjuti dengan disosialisasikan dalam acara penyusunan Laporan Kinerja PUPR Tahun 2024. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa informasi-informasi tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Nomor : PW/0201-BP/274 Bandung 24 April 2024  
 Sifat : Rahasia  
 Lampiran : 1 (satu) Berkas  
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2023

Yth. Kepala Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat  
 di -  
 Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

**A. Dasar Pengusan**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 02/SE/II/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14.2/KPTS/D/2024 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Unit Kerja UPT dan Satker Unit Kerja UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

**B. Tujuan Evaluasi**

- Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**C. Ruang Lingkup Evaluasi**

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja.



3. Penilaian...

- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyusunan strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

**D. Uraian Hasil Evaluasi**

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi AKIP Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator (**Memuaskan**), dengan pencapaian nilai **81,30%** dengan rincian per komponen:

NO	KOMPONEN	BORDET / NILAI MAKSIMAL (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2023 (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2023 (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	20,25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>79,05</b>	<b>81,30</b>

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi SAKIP di lingkungan Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen SAKIP sebagai berikut:

1. Perencanaan...

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan
1	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	1. Bukti pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan belum terdokumentasikan dengan baik; 2. Perencanaan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Perencanaan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
2	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjangka dan berkelanjutan	1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi); 2. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Masih kurangnya dokumentasi dan bukti dukung kegiatan terkait Sosialisasi SKP, Sampang SKP, dan Dialog Kerja yang perlu disampaikan; 2. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
3	Pelaporan Kinerja	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	-

d. Dokumen...

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan
	b. Dokumen Laporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); 2. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.

E. Rekomendasi...

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL EVALUASI AKIP SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN**  
**JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT TAHUN 2023**  
**DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Syaqui Kamal, S.T., M.T.  
NIP : 196801181997031002  
Jabatan : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan  
Unit Kerja : Direktorat Pembangunan Jalan
- Nama : Hesti Dwi Arstiyani, ST  
NIP : 196203262019122001  
Jabatan : Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan  
Unit Kerja : Direktorat Pembangunan Jalan

Bertindak sebagai Evaluator Satuan Kerja BPJN Sumatera Barat TA. 2023 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14.2/KPTS/Db/2024 Tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Unit Kerja/UPT dan Sakip Unit Kerja/UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama : Yulia Rahmadhani, ST., MT  
NIP : 1980728.200522.2.001  
Jabatan : Kepala Sakip KPJ  
Unit Kerja : BPJN Sumatera Barat

Bertindak sebagai Evaluator atas nama Satuan Kerja BPJN Sumatera Barat TA 2023 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi SAKIP tahun anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.

PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja/UPT dimasa yang akan datang.

PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Nama	Tanda Tangan
1. Syaqui Kamal, S.T., M.T.	
2. Hesti Dwi Arstiyani, ST	

**PIHAK KEDUA**

Nama	Tanda Tangan
1. Yulia Rahmadhani, ST., MT	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi  
 Penyeleenggaraan Jalan dan Jembatan,  
 Wilau Obasan  
 NIP 197110091997031002  
 Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:  
 Ptl. Direktorat Jenderal Bina Marga

**Lampiran Berita Acara Keepakatan Hasil Evaluasi**  
**Satuan Kerja BPJN Sumatera Barat**

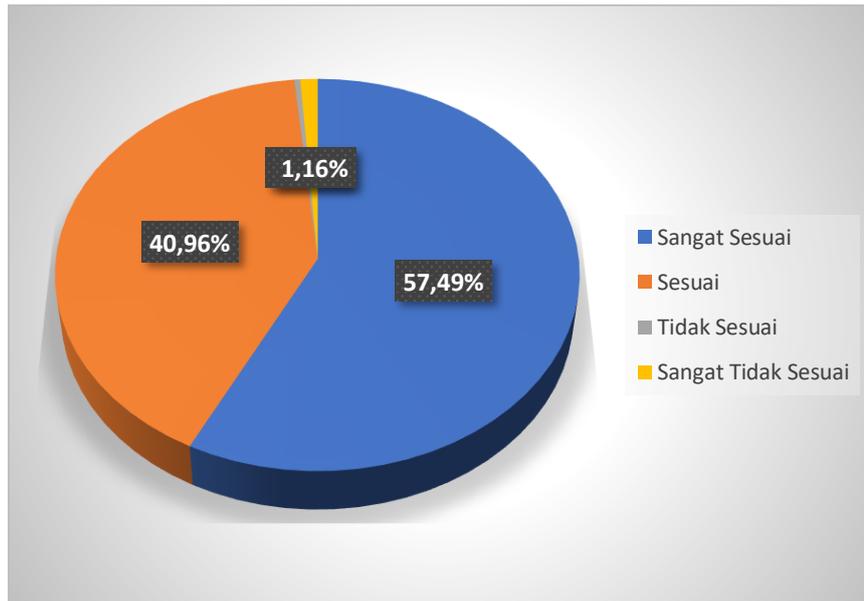
No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluasi
<b>A</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>		
1.	Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. Sakip BPJN Sumber akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya
<b>B</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>		
1.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Apikasi).	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Apikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	1. Sakip BPJN Sumber sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Apikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Sakip Bali dalam hal ini telah menggunakan E-Sakip, SIPP dan E-Kinerja.
2.	Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	2. Dilakukan untuk dapat didokumentasikan disaat kegiatan berlangsung.	2. Untuk kedepannya Sakip BPJN Sumber akan berusaha untuk dapat mendokumentasikan disaat kegiatan berlangsung
3.	Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	3. Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	3. Sakip BPJN Sumber akan meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya
<b>C</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>		
1.	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. Sakip BPJN Sumber akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya
<b>D</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>		
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi).	1. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Apikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	1. Sakip BPJN Sumber sudah menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2.	Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	2. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	2. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya

**Catatan :**  
 Lampiran ini harus diparaf para pihak atau wakilnya yang menandatangani BA di setiap lombanya

*Gambar 3. 35 Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja: LHE SAKIP UPT BPJN Sumatera Barat TA 2023*

### 3.6.6 Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 57,49 % mengatakan “sangat sesuai” dan 40,96 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 1,16 % responden mengatakan “tidak sesuai”.

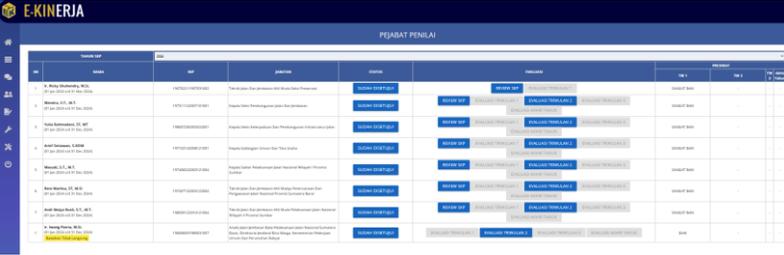


Gambar 3. 36 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab 2.2, salah satu bukti bahwa Informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK). Revisi PK pada 31 Desember 2024 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi catatan evaluasi SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB. Tindak lanjut yang dilakukan Satker BPJN Sumatera Barat adalah menanggapi evaluasi tersebut berupa Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja seperti yang terlihat pada subbab 1.4.2. menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.

Tabel 3. 21 Bukti Dukung Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024 : Progres Rencana Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi AKIP TA. 2023

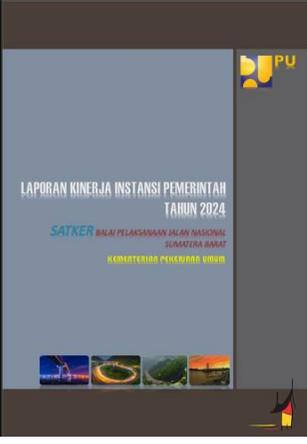
No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
1.	Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya	Telah tersusunnya PK revisi sesuai Template aplikasi Sipp	
2.	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;	Satker BPJN Sumbar sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja . Satker Balai dalam hal ini telah menggunakan ESakip, SiPP dan EKinerja.	Satker BPJN dalam pembuatan laporan Monitoring Pencapaian Kinerja Bulanan menggunakan data dari SiPP dan laporan tersebut diunggah dalam E-Sakip. Sampai dengan bulan Desember para pegawai di lingkungan BPJN Sumbar sudah	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
			<p>mengupload SKP triwulan III pada E-Kinerja. Daftar aplikasi untuk menunjang kegiatan di Lingkungan Satker BPJN Sumbar dapat dilihat pada Subbab 1.4.2 Teknologi Informasi</p>	 
3.	<p>Dilakukan untuk dapat didokumentasikan disaat kegiatan berlangsung;</p>	<p>Untuk Kedepannya Satker BPJN Sumbar akan berusaha untuk dapat mendokumentasikan disaat kegiatan berlangsung;</p>	<p>Beberapa kegiatan rapat terkait Verifikasi Lanjutan Kegiatan Melalui Instruksi Presiden Tahap 2 TA 2024, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis</p>	

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
			<p>Penatalaksanaan Penyelenggaraan Jalan Prov. Sumatera Barat , Kegiatan Rapat Penajaman TA 2025, dan Kegiatan Program Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2025 Infrastruktur PUPR Gel I</p>	

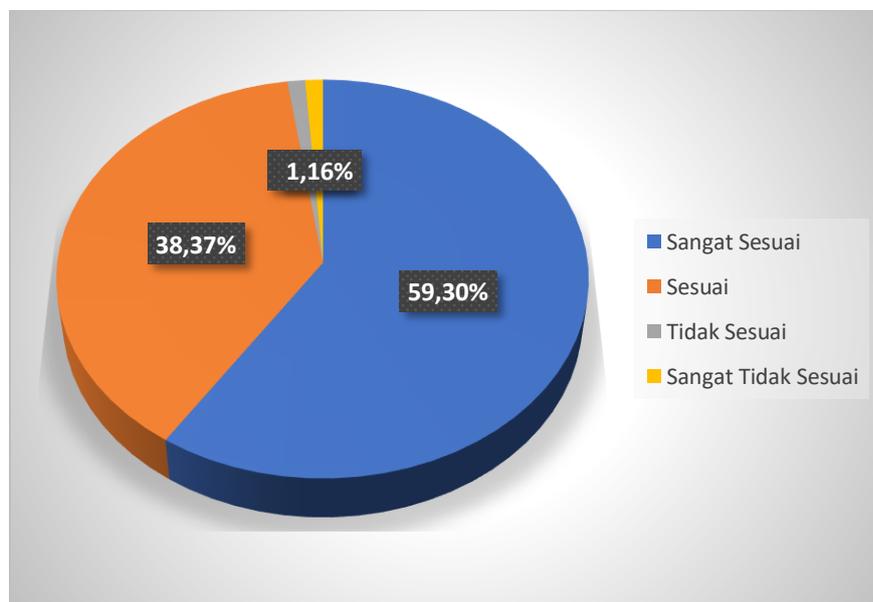
No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi																																																								
																																																												
4.	Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya	Telah tersusunnya PK revisi sesuai Template aplikasi Sipp	<table border="1" data-bbox="1379 754 2092 970"> <thead> <tr> <th>SASARAN PROGRAM</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>BASELINE 2023</th> <th>TARGET 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</td> <td>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td>2,78</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CBIR 001: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Output:</td> <td>2,00 Dokumen</td> <td>6,00 Dokumen</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</td> <td>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBK 962 Layanan Umum</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBK 994 Layanan Perkantoran</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBB 951 Layanan Sarana Internal</td> <td>1,00 Unit</td> <td>45,00 Unit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan</td> <td colspan="2">Anggaran</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td colspan="2">Rp. 20.092.587.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</td> <td colspan="2">Rp. 19.509.178.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 39.601.773.000</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80		CBIR 001: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Output:	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100,00 %	100,00 %		EBK 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBK 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit	Kegiatan		Anggaran		1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.587.000		2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		Rp. 19.509.178.000		Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024																																																									
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional																																																											
	IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %																																																									
	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80																																																									
	CBIR 001: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Output:	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen																																																									
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR																																																											
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %																																																									
	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100,00 %	100,00 %																																																									
	EBK 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																									
	EBK 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																									
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit																																																									
Kegiatan		Anggaran																																																										
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.587.000																																																										
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		Rp. 19.509.178.000																																																										
Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000																																																										



No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan	Dokumentasi
			Desember 2024. Daftar aplikasi untuk menunjang kegiatan di Lingkungan Satker BPJN Sumbar dapat dilihat pada Subbab 1.4.2 Teknologi Informasi	
7.	Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	Satker BPJN Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya	Telah tersusunnya Laporan Kinerja Satker BPJN Sumbar sesuai dengan format terbaru (Keputusan Dirjen Bina Marga No 14.1/KPTS/Db/2024)	

### 3.6.7 Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 59,30 % mengatakan “sangat sesuai” dan 38,37 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Sebesar 1,16 % responden mengatakan “tidak sesuai”.

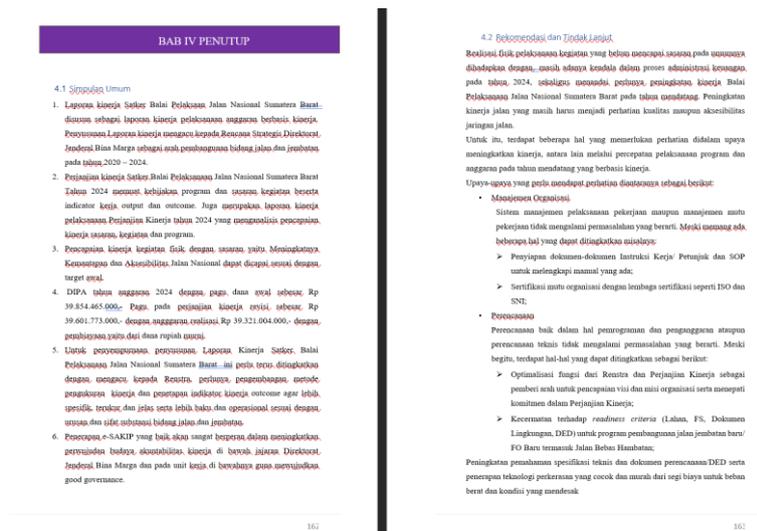


Gambar 3. 37 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup informasi: permasalahan serta rekomendasi dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi. Bukti yang mendukung informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi salah satunya dapat dilihat dalam proses manajemen risiko di level unit organisasi BPJN Sumatera Barat. Manajemen risiko merupakan faktor penting yang mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi melalui komitmen dan budaya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana manajemen risiko sendiri dilakukan berdasarkan pada pengendalian terhadap risikorisikoyang muncul dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Profil risiko yang telah disusun oleh Satker BPJN

Sumatera Barat sendiri disusun dengan mempertimbangkan sasaran kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang termuat dalam laporan kinerja ditahun sebelumnya.

Salah satu rekomendasi dari Laporan Kinerja Satker BPJN Sumatera Barat Tahun 2023 menitikberatkan pada Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu risiko yang ditetapkan dalam profil risiko BPJN Sumatera Barat tahun 2024 beserta inovasi pengendaliannya. Dengan demikian, diharapkan peningkatan budaya kinerja khususnya terkait dengan komitmen organisasi dalam melaksanakan pengendalian risiko tersebut dalam rangkaian peningkatan kinerja dapat terwujud. Adapun bukti dukung Profil Risiko dan Satker BPJN Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja organisasi dalam Laporan Kinerja Satker BPJN Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 38 Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada LAKIN 2024

Tabel 3. 22 Bukti Dukung Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Profil Resiko Unit Organisasi BPJN Sumatera Barat

4. Profil Resiko

No.	Tajuk Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Pembuat	Dampak	Nilai Risiko yang meyakinkan			Pengendalian yang ada					Nilai Risiko setelah Pengendalian	Prioritas Risiko	Sesuai Risiko	Intensi Pengendalian (yang belum pernah dilakukan)	Aksi/ Sumber Daya	Risiko yang direvisi				Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Kinerja
						6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17			
1	Layanan Simak	Keberhasilan pengumpulan informasi pemadatan data	Risiko Kinerja	Kurangnya Fasilitas/Kapabilitas dalam pengumpulan data	Penyediaan layanan	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	1	1	1	1	Kepala Sektor	Tawaran 1	ip-Dokumen-ig
2	Perencanaan Kelembagaan BPJN Sumatera	Terlaksananya pembuatan laporan tahunan kelembagaan secara AMP	Risiko Kinerja	Perubahan belum selesai pembuatan laporan tahunan	AMP tahun berjalan	4	4	4	4	10	Manual Perencanaan Kelembagaan	3	4	12	2	2	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	1	3	4	4	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Sertifikat Lab Operasi AMP-ig
3	Layanan Pemeliharaan Fasilitas	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas dan tidak ada keluhan	Risiko Kinerja	Perawatan pemeliharaan tidak berjalan dengan baik	Perawatan pemeliharaan	4	4	17	17	17	Manajemen Pemeliharaan Fasilitas	3	3	10	3	3	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	3	3	7	7	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Dokumen-ig
4	Kontrol Pengendali Mutu	Kontrol Pengendali Mutu berjalan dengan baik	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan kontrol pengendalian mutu	Mutu pelayanan	3	4	17	17	17	Manajemen Mutu	3	3	14	4	4	Mengurangi Dampak Risiko	MAN	2	3	10	10	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Dokumen-ig
5	Monev dan Katalisis Laboratorium BPJN Sumatera	Monev dan Katalisis Laboratorium berjalan dengan baik	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan monev dan katalisis	Monev dan Katalisis	3	4	17	17	17	Manajemen Monev dan Katalisis	3	3	10	5	5	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	1	2	3	3	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Perbaikan kepatuhan & katalisis kepatuhan kepatuhan-ig
6	Layanan Sarana Internal	Terlaksananya pelayanan sarana internal	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan sarana internal	Sarana internal	3	4	17	17	17	Manajemen Sarana Internal	3	4	15	5	5	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	1	3	5	5	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Bidang Jasa internal kepatuhan-ig
7	Sarana BPJN Sumatera	Terlaksananya pelayanan sarana BPJN Sumatera	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan sarana BPJN Sumatera	Sarana BPJN Sumatera	4	3	16	16	16	Manajemen Sarana BPJN Sumatera	3	3	8	7	7	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	3	3	7	7	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Dokumen-ig
8	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran berjalan dengan baik	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	4	3	10	10	10	Manajemen Anggaran	2	3	10	8	8	Mengurangi Kerugian dan Dampak Risiko	MAN	2	2	7	7	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Dokumen-ig
9	Layanan Pelaporan	Terlaksananya pelayanan laporan	Risiko Kinerja	Kurangnya pemeliharaan pelayanan laporan	Layanan Pelaporan	2	4	13	13	13	Manajemen Layanan Pelaporan	2	3	10	9	9	Mengurangi Dampak Risiko	MAN	1	2	3	3	Kepala Sektor	Tawaran 4	ip-Dokumen-ig

Padang, 28 Desember 2023  
 Kepala Sektor Kerja  
 BPJN Sumatera Barat  
 Thabrani, S.T., M.T.  
 NIP. 19670301 198803 1 003

3.7 Paket Disresmikan dan Penghargaan

1. Penghargaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arsh (One Way) Pada Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H)



## 2. Lomba Video Posko Mudik Lebaran 2024 (Kategori Balai)



### 3.8 Survei Kepuasan Masyarakat SKM Atas Penggunaan Layanan Publik

Berdasarkan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka. Angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4. IKM ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian PUPR. Analisis IKM ini dapat dijadikan masukan untuk unit pelayanan publik Kementerian PUPR sebagai salah satu sumber informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian PUPR.

IKM diukur melalui kinerja tiap-tiap unit pelayanan publik di bawah Kementerian PUPR. Unit pelayanan publik tersebut merupakan unit kerja/kantor pelayanan pada Kementerian PUPR, yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan

Data hasil survei terlampir.

### 3.9 Paket Strategis

Tidak Ada

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Simpulan Umum

Laporan kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat disusun sebagai laporan kinerja pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan Laporan kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai arah pembangunan bidang jalan dan jembatan pada tahun 2020 – 2024. Laporan kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Tahun 2024 memuat kebijakan program dan sasaran kegiatan beserta indikator kerja *output* dan *outcome*, juga merupakan laporan kinerja pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang menganalisis pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan program.

Pencapaian kinerja kegiatan fisik dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional dapat dicapai sesuai dengan target awal DIPA tahun anggaran 2024 dengan pagu dana awal sebesar Rp 39.854.465.000,- Pagu pada perjanjian kinerja revisi sebesar Rp 39.601.773.000,- dengan anggaran realisasi Rp 39.321.005.000,- dengan pembiayaan dari dana rupiah murni.

Untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat ini perlu terus ditingkatkan dengan mengacu kepada Renstra, perlunya pengembangan metode pengukuran kinerja dan penetapan indikator kinerja *outcome* agar lebih spesifik, terukur dan jelas serta lebih baku dan operasional sesuai dengan urusan dan sifat substansi bidang jalan dan jembatan.

Penerapan e-SAKIP yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja di bawah jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga dan pada unit kerja di bawahnya guna mewujudkan good governance.

#### 4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPJN Sumatera Barat dalam melaksanakan pekerjaan di bulan Juni didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Memperbaharui (updating) data kemajuan (progres) pekerjaan baik kontraktual ataupun non kontraktual pada <https://iemon.pu.go.id/> secara rutin pada hari senin dan kamis setiap minggunya.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada ouput yang mengalami keterlambatan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Semua administrasi kegiatan (non kontraktual) sudah harus diselesaikan paling lambat per tgl 20 setiap bulannya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas progres pelaksanaan kegiatan

#### 4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada 2024, beberapa kendala yang dialami oleh Satker Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan belum kuat.
2. Jumlah SDM yang belum memenuhi sehingga progress pekerjaan sedikit terlambat karena personil yang bersangkutan sedang mengerjakan pekerjaan lainnya.

#### 4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai sasaran pada umumnya dihadapkan dengan masih adanya kendala dalam proses administrasi keuangan pada tahun 2024, sekaligus menandai perlunya peningkatan kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada tahun mendatang. Peningkatan kinerja jalan yang masih harus menjadi perhatian kualitas maupun aksesibilitas jaringan jalan.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian didalam upaya meningkatkan kinerja, antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja.

Upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

- Manajemen Organisasi

Sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan maupun manajemen mutu pekerjaan tidak mengalami permasalahan yang berarti. Meski memang ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan misalnya:

- Penyiapan dokumen-dokumen Instruksi Kerja/ Petunjuk dan SOP untuk melengkapi manual yang ada;
- Sertifikasi mutu organisasi dengan lembaga sertifikasi seperti ISO dan SNI;

- Perencanaan

Perencanaan baik dalam hal pemrograman dan penganggaran ataupun perencanaan teknis tidak mengalami permasalahan yang berarti. Meski begitu, terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan sebagai berikut:

- Optimalisasi fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai pemberi arah untuk pencapaian visi dan misi organisasi serta menepati komitmen dalam Perjanjian Kinerja;
- Kecermatan terhadap *readiness criteria* (Lahan, FS, Dokumen Lingkungan, DED) untuk program pembangunan jalan jembatan baru/ FO Baru termasuk Jalan Bebas Hambatan;

Peningkatan pemahaman spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan/DED serta penerapan teknologi perkerasan yang cocok dan murah dari segi biaya untuk beban berat dan kondisi yang mendesak

## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : THABRANI  
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 5 Januari 2024



PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN



PIHAK PERTAMA

THABRANI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating Kondisi Jalan Nasional</i>	2,78	2,78
	<b>Rincian Output</b>		
	<b>CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	<b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>		
	<b>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00 %	100,00 %
	<b>Rincian Output</b>		
	<b>EBA 962 Layanan Umum</b>	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	<b>EBA 994 Layanan Perkantoran</b>	1,00 Layanan	1,00 Layanan
<b>EBB 951 Layanan Sarana Internal</b>	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran

Rp. 20.100.289.000

Rp. 19.754.176.000

Rp. 39.854.465.000



Padang, 5 Januari 2024  
Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  
Sumatera Barat,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<b>39.854.465</b>	<b>Total Anggaran</b>
	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						<b>20.100.289</b>	
	<i>JKSP</i>	<b>Rating Kondisi Jalan Nasional</b>					<b>20.100.289</b>	
		<b>CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	2,00	Dokumen			20.100.289	
			2,00	Dokumen	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>		<b>20.100.289</b>	
			2,00	Dokumen	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat		20.100.289	
			1,00	Dokumen	310 <i>Bantuan Teknis</i>		<b>7.639.874</b>	
			1,00	Dokumen		B BANTEK KPIJ SUMBAR	2.000.000	
			1,00	Dokumen		BZ BANTEK PRESERVASI SUMBAR	2.500.000	
			1,00	Dokumen		CZ <i>Konsultansi Pengendali Mutu Independen (PMI) Konstruksi Jalan Tol Ruas Pekan Baru - Padang Seksi Sicincin - Padang</i>	3.139.874	
			1,00	Dokumen	342 <i>Pengumpulan, pengolahan, updating dan analisa data</i>		<b>8.154.629</b>	
			1,00	Dokumen		BA <i>INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JARINGAN JALAN BPJN SUMBAR</i>	7.009.112	
			12,00	BLN		BB <i>PENDAMPINGAN SURVEY DAN VALIDASI DATA</i>	377.056	
			12,00	BLN		BC <i>PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN</i>	461.327	
			12,00	BLN		BD <i>DUKUNGAN VERIFIKASI DATA USULAN JARINGAN PEMOGRAMAN DAN PENANGANAN JALAN DAERAH</i>	300.544	
			12,00	BLN		BE <i>PERENCANAAN, EVALUASI PELAPORAN (PKS) BPJN SUMBAR</i>	6.590	
			12,00	BLN	401 <i>Monitoring dan Evaluasi</i>		<b>2.474.649</b>	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			12,00	BLN	A	MONITORING DAN EVALUASI UMUM DAN TATA USAHA	SUMATERA BARAT	471.580	
			12,00	BLN	D	MONITORING DAN EVALUASI PRESERVASI	SUMATERA BARAT	587.520	
			12,00	BLN	AP	PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	228.519	
			12,00	BLN	BF	MONITORING DAN EVALUASI KPIJ	SUMATERA BARAT	615.130	
			12,00	BLN	CA	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	571.900	
			12,00	BLN	402 Manajemen Pengendalian			1.831.137	
			12,00	BLN	AB	RAPAT KOORDINASI LINGKUNGAN BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	173.996	
			12,00	BLN	AC	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BMN	SUMATERA BARAT	269.758	
			12,00	BLN	AD	PENDAMPINGAN HUKUM BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	204.481	
			12,00	BLN	BH	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	212.986	
			12,00	BLN	CB	AKREDITASI DAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	374.467	
			12,00	BLN	CC	PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SMKKVE- KATALOG DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	219.308	
			12,00	BLN	CD	PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	165.708	
			12,00	BLN	DA	PEMERIKSAAN KELAIKAN AMP BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	210.433	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						19.754.176	
	KSP	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					19.754.176	
		EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan				2.345.663	
			1,00 Layanan	Provinsi Sumatera Barat			2.345.663	
			1,00 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			2.345.663	
				051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		779.676	
					BI ADMINISTRASI KEGIATAN KPIJ	SUMATERA BARAT	779.676	
				052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		807.980	
					AE PENERAPAN ZI DAN SPIP	SUMATERA BARAT	161.656	
					CE KEGIATAN UMUM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	328.970	
					DB KEGIATAN UMUM PPK PRESERVASI	SUMATERA BARAT	317.354	
				054	Pengelolaan keuangan		588.155	
					AF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK TATA USAHA	SUMATERA BARAT	588.155	
				235	Penyusunan Laporan Keuangan BMN		169.852	
					AG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN	SUMATERA BARAT	169.852	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan				17.227.213	
			1,00 Layanan	Provinsi Sumatera Barat			17.227.213	
			1,00 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			17.227.213	
				001	Gaji dan Tunjangan		1.339.685	
					AH Pembayaran Uang Makan dan Lembur	SUMATERA BARAT	1.339.685	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		15.887.528	
					AI OPERASIONAL BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	604.560	
					AJ HONORARIUM NON PNS BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	12.111.281	
					AK Honor Pengelola Satker BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	183.168	
					AL PEMELIHARAAN GEDUNG dan BANGUNAN	SUMATERA BARAT	330.264	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					AN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PPK TATA USAHA	SUMATERA BARAT	1.169.598	
					BK PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN KEGIATAN KPIJ	SUMATERA BARAT	633.048	
					CF PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	309.764	
					DC PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PRESERVASI	SUMATERA BARAT	545.845	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit				181.300	
			1,00 Unit	Provinsi Sumatera Barat			181.300	
			1,00 Unit	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			181.300	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			157.000	
					AP Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	SUMATERA BARAT	35.000	
					BL Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	SUMATERA BARAT	35.000	
					CG Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	SUMATERA BARAT	35.000	
					DD Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	SUMATERA BARAT	52.000	
				053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			24.300	
					BZ Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	SUMATERA BARAT	24.300	



REVISI

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : THABRANI

Jabatan : KEPALA SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PADANG, 31 DESEMBER 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

THABRANI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						<b>39,601,773</b>	<b>Total Anggaran</b>	
<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						<b>20,092,597</b>		
	<b>Rating Kondisi Jalan Nasional</b>					<b>20,092,597</b>		
	<b>CBR.001.Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>6.00 Dokumen</b>					<b>20,092,597</b>	
		<b>2.00 Dokumen</b>	<b>310 Bantuan Teknis</b>			<b>6,955,540</b>		
		1.00 Dokumen		B BANTEK BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	3,794,992		
		1.00 Dokumen		CZ Konsultansi Pengendali Mutu Independen PMI Konstruksi Jalan Tol Ruas Pekan Baru - Padang Seksi Sicincin - Padang	SUMATERA BARAT	3,160,548		
		<b>1.00 Dokumen</b>	<b>342 Pengumpulan pengolahan updating dan analisa data</b>			<b>8,473,905</b>		
		1.00 Dokumen		BA INSPEKSI SURVEI DATA KONDISI JARINGAN JALAN BPJN SUMBAR	KAB. A G A M	6,707,198		
				BB PENDAMPINGAN SURVEY DAN VALIDASI DATA	SUMATERA BARAT	509,545		
				BC PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	SUMATERA BARAT	1,084,242		

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				BD DUKUNGAN VERIFIKASI DATA USULAN JARINGAN PEMOGRAMAN DAN PENANGANAN JALAN DAERAH	SUMATERA BARAT	166,330	
				BE PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN PKS BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	6,590	
			<b>401</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>		<b>2,996,336</b>	
				A MONITORING DAN EVALUASI UMUM DAN TATA USAHA	SUMATERA BARAT	584,031	
				AP PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	244,319	
				BF MONITORING DAN EVALUASI KPIJ	SUMATERA BARAT	751,603	
				CA MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	748,686	
				D MONITORING DAN EVALUASI PRESERVASI	SUMATERA BARAT	667,697	
		<b>3.00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>402</b>		<b>1,666,816</b>	
				<b>Manajemen Pengendalian</b>			
				AB RAPAT KOORDINASI LINGKUNGAN BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	173,996	
		1.00	Dokumen	AC PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BMN	KOTA PADANG	289,725	
				AD PENDAMPINGAN HUKUM BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	343,881	
				AX PUBLIKASI	KOTA PADANG	100,000	
				BH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	96,261	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2.00 Dokumen		CB AKREDITASI DAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	438,278	
				CC PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SMKK E-KATALOG DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	3,011	
				CD PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	141,408	
				DA PEMERIKSAAN KELAIKAN AMP BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	80,256	
<b>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						<b>19,509,176</b>	
	<b>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>					<b>19,509,176</b>	
	<b>EBA.962.Layanan Umum</b>	<b>1.00 Layanan</b>				<b>2,345,663</b>	
			<b>051 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>			<b>725,186</b>	
				BI ADMINISTRASI KEGIATAN KPIJ	KOTA PADANG	725,186	
			<b>052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>			<b>793,580</b>	
				AE PENERAPAN ZI DAN SPIP	KOTA PADANG	147,256	
				CE ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	328,970	
				DB ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PRESERVASI	KOTA PADANG	317,354	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>054 Pengelolaan keuangan</b>			<b>646,673</b>	
				AF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK TATA USAHA	KOTA PADANG	646,673	
			<b>235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN</b>			<b>180,224</b>	
				AG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN	SUMATERA BARAT	180,224	
	<b>EBA.994.Layanan Perkantoran</b>	<b>1.00 Layanan</b>				<b>16,768,463</b>	
			<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>			<b>995,627</b>	
				AH Pembayaran Uang Makan dan Lembur	SUMATERA BARAT	995,627	
			<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>15,772,836</b>	
				AI OPERASIONAL BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	692,392	
				AJ HONORARIUM NON PNS BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	11,103,130	
				AK Honor Pengelola Satker BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	180,914	
				AL PEMELIHARAAN GEDUNG dan BANGUNAN	KOTA PADANG	330,264	
				AN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PPK TATA USAHA	KOTA PADANG	1,457,397	
				BK PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN KEGIATAN KPIJ	KOTA PADANG	783,048	
				CF PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	480,814	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				DC PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PRESERVASI	KOTA PADANG	545,845	
				EA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PPK KPB	KOTA PADANG	199,032	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	43.00 Unit				395,050	
		15.00 Unit	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			313,350	
		2.00 Unit		AP Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	45,000	
		3.00 Unit		BL Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	49,100	
		2.00 Unit		CG Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	35,000	
		2.00 Unit		DD Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	48,800	
		6.00 Unit		E Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	135,450	
		28.00 Unit	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			81,700	
		2.00 Unit		BL Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	20,900	
		15.00 Unit		DZ Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	27,500	
		11.00 Unit		EA Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	33,300	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		BASELINE 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional		IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional		
		IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100.00 %	100.00 %
	Parameter :	Rating Kondisi Jalan Nasional	2.78	2.82
		Rincian Output		
	CBR.001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	2.00 Dokumen	6.00 Dokumen
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
		IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %
	Parameter :	Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100.00 %	100.00 %
		Rincian Output		
	EBA.962	Layanan Umum	1.00 Layanan	1.00 Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00 Unit	43.00 Unit

**Kegiatan:**

- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

**Total Anggaran:****Anggaran:**

Rp. 20,092,597,000  
Rp. 19,509,176,000  
Rp. 39,601,773,000

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

PADANG, 31 DESEMBER 2024  
KEPALA SATKER BALAI  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT

THABRANI

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TA 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/EMON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI AKHIR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(8)*100	(7)=(6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(17)
						100,00	100,00				39.601.773	39.601.773	39.321.005	99,29	99,29	Total Anggaran
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									20.092.597	20.092.597	20.015.430	99,62	99,62	
		Rating kondisi jalan nasional									20.092.597	20.092.597	20.015.430	99,62	99,62	
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00				20.092.597	20.092.597	20.015.430	99,62	99,62	
			6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	Provinsi Sumatera Barat			20.092.597	20.092.597	20.015.430	99,62	99,62	
			6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			20.092.597	20.092.597	20.015.430	99,62	99,62	
								310	Bantuan Teknis		6.955.540	6.955.540	6.955.539	100,00	100,00	
									B. BANTEK BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	3.794.992	3.794.992	3.794.992	100,00	100,00	
									Konsultansi Pengendali Mutu/Independen PMI	SUMATERA BARAT	3.160.548	3.160.548	3.160.547	100,00	100,00	
									CZ. Konstruksi Jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang Sekisi Sicincin - Padang							
								342	Pengumpulan, pengolahan, updating dan analisa data		8.473.905	8.473.905	8.472.465	99,98	99,98	
									BA. INSPEKSI SURVEI DATA KONDISI JARINGAN JALAN BPJN SUMBAR	KAB. A G A M	6.707.198	6.707.198	6.707.197	100,00	100,00	
									BB. PENDAMPINGAN SURVEY DAN VALIDASI DATA	SUMATERA BARAT	509.545	509.545	509.074	99,91	99,91	
									BC. PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	SUMATERA BARAT	1.084.242	1.084.242	1.083.486	99,93	99,93	
									BD. DUKUNGAN VERIFIKASI DATA USULAN JARINGAN PENGORAMAN DAN PEWANGANAN JALAN DAERAH	SUMATERA BARAT	166.330	166.330	166.119	99,87	99,87	
									BE. PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN PKS BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	6.590	6.590	6.589	99,98	99,98	
								401	Monitoring dan Evaluasi		2.996.336	2.996.336	2.981.804	99,52	99,52	
									A. MONITORING DAN EVALUASI UMUM DAN TATA USAHA	SUMATERA BARAT	584.031	584.031	581.892	99,63	99,63	
									AP. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	244.319	244.319	241.478	98,84	98,84	
									BF. MONITORING DAN EVALUASI KPIJ	SUMATERA BARAT	751.603	751.603	746.266	99,29	99,29	
									CA. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	SUMATERA BARAT	748.686	748.686	748.365	99,96	99,96	
									D. MONITORING DAN EVALUASI PRESEKRSI	SUMATERA BARAT	667.697	667.697	663.803	99,42	99,42	
								402	Manajemen Pengendalian		1.666.816	1.666.816	1.605.622	96,33	96,33	
									AB. RAPAT KOORDINASI LINGKUNGAN BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	173.996	173.996	140.562	80,78	80,78	
									AC. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BMJ	KOTA PADANG	289.725	289.725	282.153	97,39	97,39	
									AD. PENDAMPINGAN HUKUM BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	343.881	343.881	335.581	97,59	97,59	
									AX. PUBLIKASI	KOTA PADANG	100.000	100.000	98.511	98,51	98,51	
									BH. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	96.261	96.261	96.245	99,98	99,98	
									CB. AKREDITASI DAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	438.278	438.278	438.155	99,97	99,97	
									CC. PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SMK E-KATALOG DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	3.011	3.011	3.010	99,97	99,97	
									CD. PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM DI BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	141.408	141.408	140.899	99,64	99,64	
									DA. PEMERIKSAAN KELAIKAN AMP BPJN SUMBAR	SUMATERA BARAT	80.256	80.256	70.506	87,85	87,85	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TA 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/EMON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI AKHIR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(8)*100	(7)=(6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(17)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										19.509.176	19.509.176	19.305.575	98,96	98,96	
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										19.509.176	19.509.176	19.305.575	98,96	98,96	
	EBA 962	Layanan Umum	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00				2.345.663	2.345.663	2.321.234	98,96	98,96	
			1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Provinsi Sumatera Barat			2.345.663	2.345.663	2.321.234	98,96	98,96	
			1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			2.345.663	2.345.663	2.321.234	98,96	98,96	
								051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		725.186	725.186	723.412	99,76	99,76	
									BI. ADMINISTRASI KEGIATAN KPIJ	KOTA PADANG	725.186	725.186	723.412	99,76	99,76	
								052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		793.590	793.590	772.515	97,35	97,35	
									AE. PENERAPAN ZI DAN SPIP	KOTA PADANG	147.256	147.256	143.280	97,30	97,30	
									ADMINISTRASI KEGIATAN CE. PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	328.970	328.970	316.061	96,08	96,08	
									ADMINISTRASI KEGIATAN DB. ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PRESERVASI	KOTA PADANG	317.354	317.354	313.174	98,68	98,68	
								054	Pengelolaan keuangan		646.673	646.673	646.410	99,96	99,96	
									AF. ADMINISTRASI KEGIATAN PPK TATA USAHA	KOTA PADANG	646.673	646.673	646.410	99,96	99,96	
								235	Penyusunan Laporan Keuangan BMN		180.224	180.224	178.897	99,26	99,26	
									AG. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN	SUMATERA BARAT	180.224	180.224	178.897	99,26	99,26	
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00				16.788.463	16.788.463	16.601.229	99,00	99,00	
			1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Provinsi Sumatera Barat			16.788.463	16.788.463	16.601.229	99,00	99,00	
			1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			16.788.463	16.788.463	16.601.229	99,00	99,00	
								001	Gaji dan Tunjangan		995.627	995.627	976.177	98,05	98,05	
									AH. Pembayaran Uang Makan dan Lembur	SUMATERA BARAT	995.627	995.627	976.177	98,05	98,05	
								002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		15.772.836	15.772.836	15.625.052	99,06	99,06	
									AI. OPERASIONAL BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	692.392	692.392	684.364	98,84	98,84	
									AJ. HONORARIUM NON PNS BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	11.103.130	11.103.130	11.087.714	99,86	99,86	
									AK. Honor Pengelola Satker BPJN SUMBAR	KOTA PADANG	180.914	180.914	156.210	86,34	86,34	
									AL. PEMELIHARAAN GEDUNG dan BANGUNAN	KOTA PADANG	330.264	330.264	328.820	99,56	99,56	
									AN. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PPK TATA USAHA	KOTA PADANG	1.457.397	1.457.397	1.365.785	93,71	93,71	
									BK. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN KEGIATAN KPIJ	KOTA PADANG	783.048	783.048	783.041	100,00	100,00	
									CF. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	KOTA PADANG	480.814	480.814	480.006	99,83	99,83	
									DC. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PRESERVASI	KOTA PADANG	545.845	545.845	545.533	99,94	99,94	
									EA. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN PPK KPBU	KOTA PADANG	199.032	199.032	193.579	97,26	97,26	
	EBA 951	Layanan Sarana Internal	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00				395.050	395.050	383.112	96,98	96,98	
			43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	Provinsi Sumatera Barat			395.050	395.050	383.112	96,98	96,98	
			43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat			395.050	395.050	383.112	96,98	96,98	
			15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		313.350	313.350	306.550	97,83	97,83	
			2,00	2,00	2,00	100,00	100,00		AP. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	45.000	45.000	41.310	91,80	91,80	
			3,00	3,00	3,00	100,00	100,00		BL. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	49.100	49.100	49.100	100,00	100,00	
			2,00	2,00	2,00	100,00	100,00		CG. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00	
			2,00	2,00	2,00	100,00	100,00		DD. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	48.800	48.800	48.790	99,98	99,98	
			6,00	6,00	6,00	100,00	100,00		E. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	KOTA PADANG	135.450	135.450	132.350	97,71	97,71	
			28,00	28,00	28,00	100,00	100,00	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran		81.700	81.700	76.562	93,71	93,71	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TA 2024  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/EMON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI AKHIR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(8)*100	(7)=(6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(17)
			2,00	2,00	2,00	100,00	100,00		Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	20.900	20.900	16.400	78,47	78,47	
			15,00	15,00	15,00	100,00	100,00		DZ. Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	27.500	27.500	27.262	99,13	99,13	
			11,00	11,00	11,00	100,00	100,00		EA. Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	KOTA PADANG	33.300	33.300	32.900	98,80	98,80	

**CAPAIAN IKSP TA. 2024**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT**

NO	IKSP	BASELINE 2023	TARGET			CAPAIAN			PENJELASAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN	MENGETAHUI *Paraf Kompetensi
			RENSTRA	PK AWAL	PK REVISI	NILAI KOMPETENSI	NILAI BALAI	NILAI AKHIR		
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (%)	76,00	76,00	80,00	76,00	76,00	76,00	76,00	Terdapat 1 (satu) nodes (Pelabuhan Teluk Tapang) yang semula menjadi target TA 2024 didrop karena Pelabuhan belum fungsional	
	Panjang jalan yang terbangun (km)	-	-	-	26,57	26,57	26,57	26,57	1. Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang Target 7.47 Km 2. Penanganan Jalan Dan Jembatan Toa Pejat - Rokot - Sioban (Simp. Logpon) Target 11.23 Km 3. Penanganan Jalan Sioban (Simp. Logpon) - Katiet Target 7.87 Km	
	Panjang jalan yang dilebarkan (14 m) (km)	-	-	-	1,60	1,60	1,60	1,60	1. Pelebaran Menambah Lajur Ruas Jalan Junction (Koto Baru) - Bts. Prov. Jambi Target 1.6 Km	
	Panjang jembatan yang terbangun (m)	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	Panjang FO/UP yang terbangun (m)	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	Panjang jembatan gantung yang terbangun (m)	-	-	-	156,00	153,17	153,17	153,17	terdapat paket pembangunan jembatan gantung siguntur sedang bekerja dalam masa denda	
	Jumlah unit jembatan gantung (unit)	-	-	-	2,00	1,00	1,00	1,00	Terdapat 1 unit Pembangunan JG MYC 2024-2025 sehingga capaian unit akan dihitung pada tahun 2025	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,20	2,78	2,82	2,82	2,82	2,82	Target PK Revisi tercapai	
3	Rating keselamatan jalan nasional	4,16	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	Target Renstra dan PK Revisi tercapai	
4	Kemantapan Jalan (%)	92,97					91,71	91,71	1. Sepanjang 18,2 km ruas jalan sioban - katiet (N.052) (1,28%) terdampak abrasi pantai sehingga dalam kondisi rusak berat. Terdapat paket pembangunan jalan alih trase pada segmen jalan yang abrasi. Segmen jalan yang abrasi masih terhitung dalam SK Jalan Nasional 2022. 2. Sepanjang 18 km segmen ruas jalan lubuk selasih - surian (N.053) (1,26%) merupakan bagian kawasan air dingin. Segmen ruas jalan tersebut dominasi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat akibat aktivitas tambang galian c pada sisi kiri dan kanan jalan. 3. Terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri smt 2 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei smt 2 2024	
5	Dukman (%)	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	Target tercapai	

**TARGET IKSP TA. 2025**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT**

NO	IKSP	TARGET				MENGETAHUI	
		RENSTRA	NILAI KOMPETENSI	NILAI BALAI	NILAI AKHIR	*Paraf Kompetensi	
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (%)	76,00	76,00	76,00	76,00		
	Panjang jalan yang terbangun (km)						
	Panjang jalan yang dilebarkan (14 m) (km)						
	Panjang jembatan yang terbangun (m)	-		0,00	0,00		
	Panjang FO/UP yang terbangun (m)	-		0,00	0,00		
	Panjang jembatan gantung yang terbangun (m)		596,00	596,00	596,00		
	Jumlah unit jembatan gantung (unit)		7,00	7,00	7,00		
2	Rating Kondisi Jalan Nasional						
3	Rating keselamatan jalan nasional						
4	Kemantapan Jalan (%)						
5	Dukman (%)						

Mengetahui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat,	
Nama	: Yulia Rahmadhani
Jabatan	: Kepala Seksi KPIJ BPJN Sumatera Barat
Tanggal	: 17 Januari 2025
Tandatangan	: 